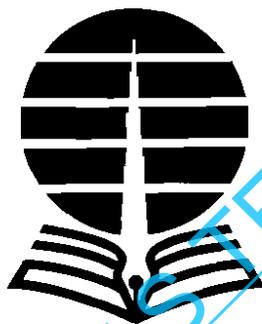


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN KUBE
(KELOMPOK USAHA BERSAMA)
DI KECAMATAN SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA
(Studi Pada Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sukamara)**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

MAT SALEH

NIM: 017982014

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2013

ABSTRAKSI

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sebagai negara berkembang menyebar pada seluruh daerah, termasuk di Kabupaten Sukamara. Sesuai dengan laporan BPS, penduduk miskin di Kabupaten Sukamara pada tahun 2011 sebanyak 2.897 jiwa atau sebesar 5,9% dari jumlah penduduk. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan pembangunan masyarakat yang menitikberatkan pada komunitas sebagai suatu kesatuan, mengutamakan prakarsa dan sumberdaya setempat, sinergi antara sumber daya internal dan eksternal serta terintegrasinya masyarakat lokal dan nasional.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini membahas tentang implementasi pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara tahun 2012. KUBE adalah salah satu program pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan program KUBE diserahkan kepada Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sukamara melalui Dinas Sosial Provinsi dengan dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, sosialisasi, bantuan stimulan dan pendampingan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pemberian bantuan KUBE di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara dan mendeskripsikan dan menganalisis faktor apa saja yang menghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan yang ditentukan secara *purposif*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua tahapan proses implementasi pemberian bantuan modal terhadap KUBE sasaran sudah dijalankan sesuai dengan juknis/SOP. Namun jika ditinjau dari sisi kualitas, hanya ada tiga tahapan yang sudah dilakukan dengan baik, yaitu tahap pembentukan tim koordinasi penanganan fakir miskin, perkerutan pendamping sosial dan tahap pencairan dana. Sedangkan tahapan lainnya masih belum sesuai dengan juknis, yaitu tahap penentuan anggota kelompok sasaran, penentuan jenis usaha, sosialisasi, dan tahap pembinaan dan evaluasi. Dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut Grindle, diketahui bahwa faktor-faktor yang menghambat implementasi dari sisi *content of policy* adalah kepentingan kelompok sasaran, kedudukan pengambil keputusan, pelaksana kebijakan, dan sumber daya yang disediakan. Sedangkan dari sisi *context of implementation* adalah kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, dan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Dengan kenyataan ini, maka hasil penelitian menyarankan agar adanya upaya monitoring, pembinaan dan evaluasi secara lebih baik untuk meningkatkan keterampilan anggota KUBE, pendamping dan implementator; penentuan jenis usaha yang lebih akomodatif; penganggaran dana operasional yang lebih memadai; memperjelas dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dan *stake holder* lainnya.

Kata Kunci : Kemiskinan, Kebijakan, Implementasi, Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

ABSTRACTION

Problems of poverty in Indonesia as a developing country is spreading throughout the region, including in the Regency Sukamara. According to the report of the Central Bureau of Statistics or BPS, the poor population in the District of Sukamara in 2011 as much as 2, 897 inhabitants or amounted to 5.9% of the population. One of the efforts made by the Government to resolve the issue is to do community development focuses on the community as a whole, giving priority to local resources and initiatives, synergies between internal and external resources as well as the integration of local and national community.

Thesis master's degree Program discusses about the implementation of the granting of the aid joint venture group in the village of Sukamara Sub District Sedawak Natai Sukamara in 2012. The joint venture group is one of the Government's programs through the Ministry of Social Welfare to improve communities through empowerment of the community itself. Program implementation was left to the joint venture group Social Regency Sukamara through Social Service Provincial assistance tasks with funds and plenty of authority. The formation process begins with the formation of the joint venture group as a result of social guidance, socialization, mentoring and stimulants help.

The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of policy on the granting of aid in district of Sukamara Regency Group joint venture Sukamara, describe and analyze what factors restricting implementation of these policies. This research is qualitative research using the method of data collection in the form of observation, interviews, and documentation. The interview was conducted against the informants specified in purposif.

The results of this research indicate that all stages of the implementation process of supplying capital to the joint venture group target is already running in accordance with operational standards of service. However, if the quality of the sides reviewed, there are only three stages that have already done well, namely the stage of formation of the team handling the poor coordination, social escort downsizing and disbursement stages. While other phases are still not in accordance with the operational standards of service, i.e. the stage of determination of the members of the target group, the determination of the type of business, socializing, and the stages of guidance and evaluation. By using a policy implementation model according to Grindle, note that the factors that impede implementation of the content of policy is the interests of the target group, the position of decision makers, policy executors, and resources provided. Whereas in the context of implementation is power, interests, and the strategy of the actors involved, and the level of compliance and responsiveness of the target group. With this fact, then the results of the study suggest that an attempt monitoring, coaching and evaluation better to improve the skills of the members of the joint venture group, companion and implementator; the determination of the type of business that is more accommodating; budgeting a more adequate operational funds; clarify and enhance the coordination and cooperation between relevant agencies and stake holder.

Keywords: Poverty, Policy, Implementation, Joint Venture Group

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN KUBE (KELOMPOK USAHA BERSAMA) DI KECAMATAN SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA** (Studi pada Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sukamara) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palangka Raya, Januari 2014

Yang Menyatakan



METERAI
TEMPEL
PALANGKA RAYA
51454ABF664049516
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP

MAT SALEH
NIM : 017982014

LEMBAR PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)

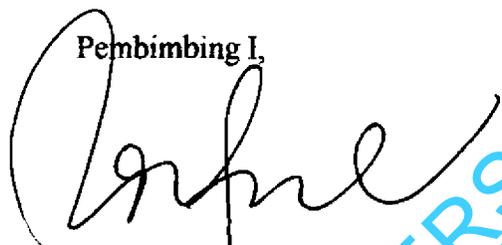
JUDUL TAPM : Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara(Studi pada Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sukamara)

NAMA : MAT SALEH

NIM : 017982014

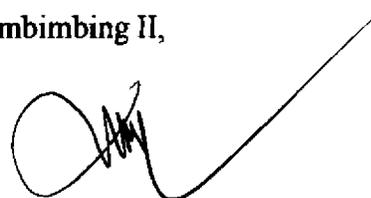
PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)

Pembimbing I,



Dr. IDA HAYU DWIMAWANTI, MM
NIP. 19670819 199403 2 003

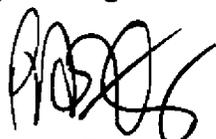
Pembimbing II,



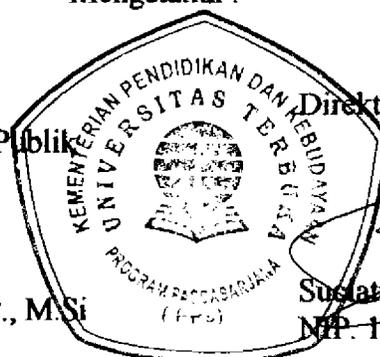
Dr. KUWING BABOE, M. Si
NIP. 19530603 197802 2 001

Mengetahui :

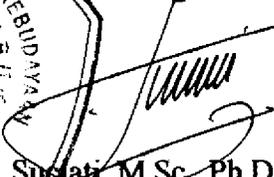
**Ketua Bidang Ilmu/
 Program Magister Administrasi Publik**



Florentina Ratih Wulandari, S.IP., M.Si
NIP. 19710609 199802 2 001



Direktur Program Pascasarjana



Suslari, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : MAT SALEH
 NIM : 017982014
 PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)
 JUDUL TAPM : **Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan KUBE
 (Kelompok Usaha Bersama) di Kecamatan Sukamara
 Kabupaten Sukamara (Studi pada Dinas Sosnakertrans
 Kabupaten Sukamara)**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
 Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 29 Januari 2014
 Waktu : 11.00-13.00 WIB
 Dan telah dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS

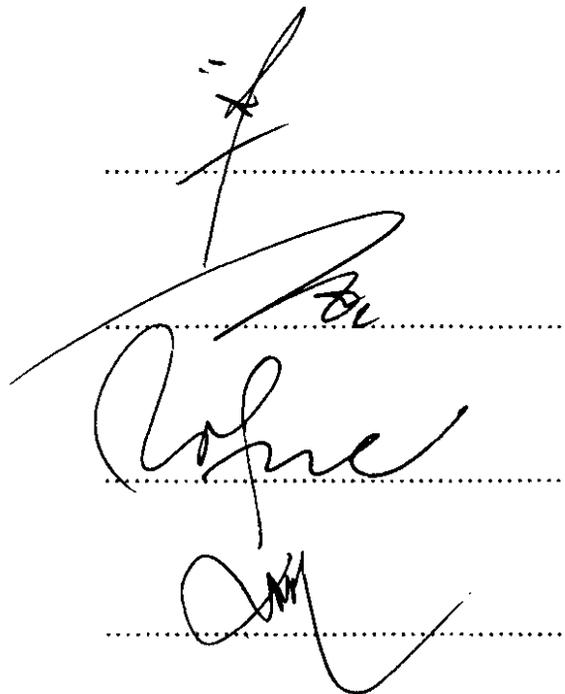
Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji :
 Dr. Sri Listyarni, M.Ed

Penguji Ahli :
 Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si

Pembimbing I :
 Dr. Ida Hayu Dwimawanti, MM

Pembimbing II :
 Dr. Kuwing Baboe, M. Si



The image shows four handwritten signatures in black ink, each placed above a horizontal dotted line. The signatures correspond to the names listed on the left: Dr. Sri Listyarni, M.Ed; Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si; Dr. Ida Hayu Dwimawanti, MM; and Dr. Kuwing Baboe, M. Si.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dengan baik. TAPM ini mengangkat judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN KUBE (KELOMPOK USAHA BERSAMA) DI KECAMATAN SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA”(Studi pada Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sukamara). Sebuah kebijakan yang sangat penting bagi pengentasan kemiskinan dalam upaya mengangkat kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya implementasinya di lapangan perlu dikawal secara baik.

Penulisan TAPM (Tesis) ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari perkuliahan sampai pada penulisan TAPM ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- 1). Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
- 2). Kepala UPBJJ-UT Palangka Raya selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
- 3). Pembimbing I dan Pembimbing II (**Dr. Ida Hayu Dwi Mawanti, MM** dan **Dr. Kuwing Baboe, M.Si**) yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
- 4). Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moril, khususnya kepada anak-anak dan istri yang selalu memberi dorongan semangat;

- 5). Sahabat yang telah dengan sabar mau menjadi partner diskusi, memberikan kritik/masukan dan dorongan semangat serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi perbaikan pelayanan publik dan pengembangan ilmu dimasa-masa yang akan datang.

Sukanara, Desember 2013

Penulis,

Mat Saleh

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Pernyataan	ii
Surat Layak Uji	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Abstraksi.....	vi
Abstraction	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori	9
1. Kebijakan Publik, Proses, dan Implementasi	9
2. Model Implementasi Kebijakan	22
3. Model Kebijakan	38
4. Bantuan KUBE	40
5. Penelitian Terdahulu yang Relevan	50
B. Kerangka Berfikir	52
C. Definisi Operasional	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	56
A. Desain Penelitian	56
B. Teknik Pengambilan Informan	61
C. Instrumen Penelitian	63
D. Prosedur Pengumpulan Data	63
E. Teknik Analisis Data	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian	68
B. Program Bantuan Modal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Sukamara	82
C. Implementasi Kebijakan Program Bantuan KUBE	105
1. Proses Pemberian Bantuan Modal Usaha KUBE	107
2. Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Modal KUBE di Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara	143

3. Faktor-Faktor yang Mendukung Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Modal KUBE di Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara	154
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	158
A. Kesimpulan	158
B. Saran	160
DAFTAR PUSTAKA	161
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Prosedur Pembuatan Kebijakan	17
Gambar 2.2. Model Implementasi Edward III	24
Gambar 2.3. Model implementasi Kebijakan Menurut Grindle	30
Gambar 2.4. Model umum kelembagaan dan pengorganisasian program pemberdayaan fakir miskin	48
Gambar 2.5. Kerangka Berfikir Penelitian	52
Gambar 3.1. Teknik Analisis Data: Model Analisis Interaktif	67
Gambar 4.1. Peta Lokasi Kecamatan Sukamara	71
Gambar 4.2. Struktur Organisasi KUBE Desa Natai Sedawak	127

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Data Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penumbuhan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaandi Kecamatan Kabupaten Sukamara tahun 2012	5
Tabel 4.1. Luas Wilayah Kabupaten Sukamara menurut Kecamatan	69
Tabel 4.2. Luas Wilayah Kecamatan Sukamara menurut Desa/Kelurahan	70
Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2004 – 2010	74
Tabel 4.4. Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Kecamatan Tahun 2010	75
Tabel 4.5. Luas Wilayah Kecamatan Sukamara menurut Desa/Kelurahan	76
Tabel 4.6. Lokasi dan Kemiringan Lahandan Ketinggian DPL Desa/Kel di Kecamatan Sukamara	77
Tabel 4.7. Penduduk Kecamatan Sukamara Menurut Desa/Kelurahan Dan Rata-Rata Pertumbuhan selama 5 tahun	78
Tabel 4.8. Banyaknya rumah tangga miskin dan penduduk miskin serta persentasenya per kecamatan.....	79
Tabel 4.9. Nilai Garis Kemiskinan Kabupaten Sukamara Tahun 2006-2008 ...	80
Tabel 4.10 Lokasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012	99
Tabel 4.11 Karakteristik Anggota KUBE Sasaran Berdasarkan Jenis Kelamin	122
Tabel 4.12 Karakteristik Anggota KUBE Sasaran Berdasarkan Jenis Pekerjaan	130
Tabel 4.13 Data Kelompok dan Keaktifan Anggota KUBE Sasaran	136
Tabel 4.14 Data Kemajuan Usaha KUBE Sasaran	139
Tabel 4.15 Karakteristik Anggota KUBE Sasaran Berdasarkan Usia	140
Tabel 4.16 Karakteristik Anggota KUBE Sasaran Berdasarkan Pendidikan	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sebagai negara berkembang menyebar pada seluruh daerah, termasuk di Kabupaten Sukamara. Oleh karena permasalahan kemiskinan selalu menjadi isu penting dalam setiap perumusan program dan pelaksanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat pemerintah daerah. Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya (<http://appifrend.wordpress.com/2011/12/25/makalah-masalah-kemiskinan-dan-penanggulangannya>). Jika tidak segera diselesaikan bukan tidak mungkin masalah kemiskinan akan semakin semakin berkembang dalam berbagai dimensi, seperti budaya, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan sebagainya yang akan semakin memperparah kemiskinan itu sendiri.

Permasalahan kemiskinan tidak hanya berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi masyarakat, tetapi juga terhadap ketahanan sosial dan ketahanan nasional (Cahyaningtays, 2008: 52). Data yang dikeluarkan BPS (2012: 2) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2011 sebesar 29,89 juta orang atau sekitar 12,36%. Sedangkan di Kabupaten Sukamara, jumlah penduduk miskin pada Agustus 2009 tercatat sebanyak 3.932 jiwa atau sebesar 9,25 % dari jumlah penduduk (BPS, 2009 : 30), sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 3.000 jiwa atau sebesar 6,61%, dan pada tahun 2011 sebanyak 2.897 jiwa atau sebesar 5,9% dari jumlah penduduk. Data ini didasarkan pada kriteria penduduk

miskin dengan pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan (kriteria kemiskinan absolut). Pada kenyataannya, jumlah penduduk miskin sesungguhnya bisa jadi melebihi dari angka yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang bersifat multidimensi adalah dengan melakukan pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat, menurut Dirjen Bangdes pada hakekatnya merupakan proses dinamis yang berkelanjutan dari masyarakat untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera dengan strategi menghindari kemungkinan tersudutnya masyarakat desa sebagai penanggung eksekusi dari pembangunan regional/daerah atau nasional. Dalam pengertian pembangunan masyarakat, terdapat beberapa unsur yaitu menitikberatkan pada komunitas sebagai suatu kesatuan, mengutamakan prakarsa dan sumberdaya setempat, sinergi antara sumber daya internal dan eksternal serta terintegrasinya masyarakat lokal dan nasional (Suparjan dan Suyarno, 2003:21-22).

Adisasmita (2006:116) memberikan batasan terhadap pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, dimana mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah secara bersama. Ada yang mengartikan pula bahwa pembangunan masyarakat adalah kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Secara lebih sederhana pembangunan masyarakat adalah pembangunan yang mendorong peran aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan mereka.

Salah satu bentuk program pengentasan kemiskinan yang dilakukan adalah pelaksanaan program bantuan bagi kelompok usaha bersama (KUBE). Program bantuan bagi kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE FM) yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Sukamara dianggap sangat membantu kehidupan masyarakat setempat. Dengan adanya program itu, para warga kurang mampu bisa membuka usaha guna meningkatkan taraf hidup perekonomiannya. Dengan bantuan modal yang diperoleh kelompok masyarakat dapat melakukan usaha sesuai dengan keahlian dan karakter lingkungan sekitarnya. Ungkapan positif terhadap adanya program tersebut disampaikan oleh salah seorang warga yang tinggal di Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara Suniah kepada Kalteng Pos, Surat Kabar Harian di Kalimantan Tengah. Menurut dia, selama setahun terakhir warga kurang mampu khususnya di Kelurahan Padang mulai merasa terbantu dengan adanya program tersebut. Lantaran adanya program itu pihaknya bisa membuka lapangan usaha guna meningkatkan perekonomian. Yaitu dengan cara meminjam uang dari program yang diterapkan dalam kelompok usaha bersama bagi warga fakir miskin tersebut, kemudian mengembalikannya saat usaha telah menghasilkan.

Program KUBE FM sebagai salah satu pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial yang dijalankan Kementerian Sosial merupakan salah satu program yang pelaksanaannya melalui suatu proses yang panjang dan berkesinambungan, tujuannya adalah meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dinyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara,

yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pelaksanaan KUBE FM sendiri didasarkan atas berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan hukum pelaksanaan program bantuan sosial fakir miskin melalui KUBE FM meliputi :

1. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.
2. UU Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 124 tahun 2001 dan Nomor 8 tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan.
5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/PENGHUK/2002 tentang penanggulangan kemiskinan.

Sesuai dengan tujuan yang ditetapkan Pemerintah Pusat, Program KUBE FM yang disalurkan melalui Pemprov Kalteng dengan sasarannya warga fakir miskin di Kabupaten Sukamara bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kurang mampu agar dapat mandiri dan membuka lapangan usaha. Untuk tahun 2011 program tersebut hanya diterapkan bagi warga kurang mampu yang ada didalam kotadengan kuota kelompok yang diperoleh dari Pusat sebanyak 35 kelompok. Sementara pada tahun 2012 program ini mengalami peningkatan jumlah kelompok sasaran, yaitu sebanyak 40 kelompok dengan rincian 8 kelompok didalam kota dan 42 kelompok ditargetkan berada diluar kota.

Tabel 1.1, Data Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penumbuhan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan di Kabupaten Sukamara tahun 2012

NO.	DESA/KELURAHAN	JUMLAH KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA
1.	Desa Natai Sedawak	8 Kelompok	80 orang
2.	Desa Kartamulia	8 kelompok	80 orang
3.	Desa Sukaraja	3 Kelompok	30 orang
4.	Desa Pangkalanmuntai	5 Kelompok	50 orang
5.	Desa Pulau Nibung	6 Kelompok	60 orang
6.	Desa Sungai Baru	3 Kelompok	30 orang
7.	Desa Sungai Bundung	3 Kelompok	30 orang
8.	Desa Sungai Raja	4 Kelompok	40 orang
	Jumlah	40 Kelompok	400 orang

Sumber : Dinas Sosnakertrans Kab. Sukamara tahun 2012 (telah diolah)

Pada tahun 2012, Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara bersama dengan tujuh desa lainnya menerima bantuan modal KUBE FM dari Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sukamara. Data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan perdesaan tahun 2012 melalui KUBE FM diarahkan pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Sukamara yang tersebar ada Desa Natai Sedawak, Kartamulia, Sukaraja dan Pangkalanmuntai. Kemudian pada Kecamatan Jelai yang tersebar pada Desa Pulau Nibung, Sungai Baru, Sungai Bundung dan Sungai Raja.

Adanya bantuan KUBE FM di Kabupaten Sukamara sudah mulai terlihat sejak beberapa tahun yang lalu. Hal ini dapat dilihat secara jelas dengan banyaknya terpasang papan nama kelompok pada rumah-rumah penduduk, warung, industri rumah tangga, dan lokasi kebun warga sebagai tanda bahwa kelompok tersebut telah mendapatkan bantuan modal. Pada sebagian lokasi tersebut terlihat kegiatan ekonomi produktif masyarakat, namun ada juga diantaranya yang tidak menunjukkan aktifitas apa-apa. Pada Desa Natai Sedawak misalnya, KUBE FM yang mendapat bantuan

sebanyak 8 KUBE dengan jumlah anggota mencapai 80 orang. Dari 8 KUBE tersebut terdapat 1 papan nama KUBE yang dibiarkan roboh dan tidak terawat (lihat Gambar 1 pada lampiran). Fenomena tersebut menarik untuk diungkap mengingat letak wilayah Desa Natai Sedawak yang berada persis pada wilayah perkotaan (ibu kota) yang dapat menjadi indikator bagi lokasi (desa) sasaran KUBE lainnya.

Tercapai tidaknya tujuan Program KUBE FM ditentukan oleh efektif tidaknya pelaksanaan program tersebut di lapangan. Efektivitas implementasi program harus memenuhi beberapa kriteria seperti tepat sasaran, tepat program, dan tepat pelaksanaan. Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, masyarakat sasaran penerima bantuan KUBE FM adalah keluarga miskin kluster pertamasebagaimana ditetapkan oleh Kemeterian Sosial.

Dari pengamatan awal di lapangan, ada indikasi penerima manfaat KUBE FM di Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara tidak semuanya sesuai dengan kriteria keluarga miskin kluster pertama. Beberapa keluarga yang sebenarnya tidak bisa digolongkan sebagai keluarga miskin tetapi mereka menerima bantuan, sedangkan keluargayang seharusnya masuk kriteria miskin justru tidak menerima. Hal ini mengindikasikan adanya proses pentahapan KUBE yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti penunjukan kelompok penerima yang asal-asalan. Di samping itu, pendampingan atau pembinaan KUBE terkesan kurang serius sehingga aktifitas kelompok tidak berjalan sebagaimana harapan.

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, perlu diadakan kajian mengenai implementasi pelaksanaan kebijakan KUBE di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Program KUBE FM di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara yang meliputi 3 item, yaitu Proses

Pembentukan KUBE, Pelaksanaan KUBE, dan Hasil Pelaksanaan KUBE. Untuk itu, peneliti mengambil judul penelitian ini sebagai berikut: “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN KUBE (KELOMPOK USAHA BERSAMA) DI KECAMATAN SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA”.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara?
2. Faktor apa saja yang menghambat implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor apa saja yang menghambat implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara akademis dan secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Kebijakan Publik, khususnya mengenai Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Dengan demikian penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah bagi peneliti lain yang mempunyai minat untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap pelaksanaan Pemberian Bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) sehingga mampu mengimplementasikan rencana dengan baik.

2. Kegunaan Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sukamara, khususnya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta bagi stekholder dalam upaya pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di Sukamara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik, Proses, dan Implementasi

a. Pengertian Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *kebijakan* dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dan sebagainya). Dalam pendapat lain, Mustopadidjaja (2003 : 5) menjelaskan :

“Pada dasarnya kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan. Dalam kehidupan administrasi negara, secara formal keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan”

Menurut Carl Friedrich (Wahab, 2002; dalam Makinuddin & Sasongko, 2006:18) :

“Kebijakan adalah “Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Selanjutnya dalam buku tersebut dijelaskan juga bahwa menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kebijakan adalah “Suatu deklarasi mengenai dasar pedoman untuk bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana”. Dalam konteks penyelenggaraan negara, kebijakan (*policy*) diartikan sebagai segala ketetapan, keputusan, dan semua bentuk

tata peraturan yang dibuat oleh lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Menurut Masduki (2007:37), kebijakan dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Kebijakan diartikan pula sebagai program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang terarah. Ada tiga aspek dalam konteks kebijakan yang penting dipahami. *Pertama*, adanya isu-isu utama kebijakan yang terkait dengan masalah sosial masa lampau, masa kini, dan masa depan. *Kedua*, proses guna memutuskan kebijakan yang akan dibuat mengacu pada peralatan atau sarana yang digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan. *Ketiga*, interaksi sekelompok aktor-aktor kunci atau yang populer disebut *stakeholder* selama proses perumusan kebijakan.

Pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah yang dihadapi, merumuskan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. Sedangkan, James E Anderson, memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan tersebut di atas, kesimpulannya adalah bahwa pada hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan : *what*, yaitu apa yang akan dikerjakan, *why*, yaitu bagaimana cara mengerjakannya, *who*, yaitu siapa yang mengerjakan, *where*, dimana tempat kebijakan tersebut dan *how*, yaitu bagaimana mengerjakannya. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut: isi cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil

dandilaksanakan. Di samping itu kesimpulan tentang pengertian kebijakan dimaksud, pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya.

Dalam menjalankan pemerintahan, sering kali kita mendengar istilah dari “kebijakan publik”. Banyak sekali para ahli yang telah memberikan definisi yang berkaitan dengan kebijakan publik ini, namun demikian banyak ilmuwan yang merasakan kesulitan untuk mendapatkan pengertian kebijakan publik yang benar-benar memuaskan. Hal tersebut dikarenakan sifat dari pada kebijakan publik yang terlalu luas dan tidak spesifik dan operasional.

Luasnya makna kebijakan publik misalnya disampaikan oleh Charles O. Jones di dalam mendefinisikan kebijakan publik sebagai antar hubungan di antara unit pemerintah tertentu dengan lingkungannya. Definisi ini sangat luas sekali nuansa pengertiannya, bahkan terdapat satu kesan sulit menemukan hakekat dari pada kebijakan publik itu sendiri.

Thomas R. Dye mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai *what government do, why they do it, and what difference it makes*. Sementara definisi lain dikemukakan oleh Harold Laswell dan A. Kaplan sebagai *a projected program on goals, values, and practices*. Definisi yang diberikan oleh David Easton mengenai kebijakan publik adalah sebagai *the impact of government activity* (Dwidjowijoto, 2006:23).

Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Pandangan lainnya dari kebijakan publik, melihat kebijakan publik sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan.

Berdasarkan beberapa pandangan tentang kebijakan tersebut, maka dengan mengikuti paham bahwa kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat, Irfan Islamy (1997: 20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:

- (1) Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
- (2) Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
- (3) Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;
- (4) Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Definisi tersebut memberikan gambaran pemahaman mengenai kebijakan publik, yaitu; tindakan, tujuan dan berkaitan dengan urusan publik. Kebijakan publik secara konsisten menunjukkan ciri tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Analisis kebijakan sendiri merupakan suatu aktivitas intelektual dan praktis ditujukan menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan (William N, Dunn, 2003).

Samudra Wibowa (1994:190) menjelaskan bahwa kebijakan negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara. Kesimpulan dari pandangan ini adalah: (1) kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah; dan (2) kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu. Hasil dari analisis kebijakan pada umumnya sebuah rekomendasi kebijakan yang lebih lanjut atau kebijakan alternatif yang lain.

Berbagai definisi lain mengenai Kebijakan Publik yang diberikan oleh para ahli adalah sebagai berikut (Dwidjowijoto, 2006:23):

- James Anderson (2004): *“a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with problem or matter of concern.”*
- James Lester & Robert Steward (2000): *“a process or a series or pattern of governmental activities or decisions that are design to remedy some public problem, either real or imagined.”*
- Austin Ranney: *“a selected line of action or declaration of inten.”*
- Steven A. Peterson (2003): *“government action to address some problem.”*
- B.G. Peters (1993): *“the sum of government activities, whether acting directly ot through agents, as it has an influence on the lives of citizens.”*

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh Administratur Negara atau Administratur Publik dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya, dengan maksud untuk mengatur kehidupan publik dan bukan kehidupan orang seorang atau golongan, sebagai respon atau jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada, yang dirumuskan dalam serangkaian peraturan tertentu.

Setiap kebijakan yang sebagian atau seluruhnya digagas, dikembangkan, dirumuskan dan dibuat oleh instansi-instansi, serta melibatkan (langsung atau tidak langsung) pejabat-pejabat pemerintah dapat diberi makna sebagai kebijakan publik (Wahab, 2012 : 16). Dari pemahaman ini dapat dijelaskan bahwa kebijakan publik sebenarnya juga dapat dipengaruhi oleh pihak lain selain lembaga pemerintah yaitu lembaga swasta atau sektor privat. Sebagai contoh bagaimana pemerintah

menetapkan besaran subsidi BBM, penetapan besaran UMR, mekanisme penyaluran BLM dll yang banyak dipengaruhi oleh organisasi-organisasi *civil society* atau para pengamat. Pengaruh sektor privat terhadap penentuan kebijakan publik dapat memberikan pengaruh positif atau negatif bergantung sebesar apa masuknya kepentingan pihak tertentu (sektor privat yang berkepentingan) dan sejauh mana kemampuan pemerintah dalam menentukan pilihan kebijakan yang akan diambil. Secara realita kebijakan yang baik itu adalah kebijakan yang mengakomodir sebesar-besarnya aspirasi dan masukan dari masyarakat terutama kepentingan kelompok sasaran.

Salah satu contoh dari kebijakan publik yang dibuat pemerintah adalah program penanganan fakir miskin melalui kegiatan pemberian bantuan modal usaha terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Program ini merupakan tugas pemerintah yang wajib dilaksanakan dalam mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Sila ke-5 dari Pancasila, dan Pasal 27 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Kebijakan negara untuk memberikan bantuan modal terhadap KUBE adalah merupakan pilihan dari sekian banyak alternatif kajian untuk menjawab berbagai permasalahan kebiskinan yang dihadapi rakyat. Diharapkan dengan program ini masyarakat miskin mendapatkan akses untuk berusaha berdasarkan keterampilan yang dimiliki yang dibantu dengan stimulan dari pemerintah. Tujuan akhir dari program ini adalah meningkatkan pendapatan keluarga miskin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Agar lebih terarah dalam merumuskan dan

mengimplementasikan program kesejahteraan sosial dan penanganan fakir miskin pemerintah merumuskan kebijakannya dalam serangkaian peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial, UU Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan fakir miskin, dan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 79/HUK/2011 tentang pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Masyarakat Miskin.

b. Proses Kebijakan Publik

Dunn (2003:22-28) memaparkan adanya beberapa proses pembuatan kebijakan publik. Proses-proses itu antara lain meliputi: (1) Perumusan Masalah; (2) Peramalan; (3) Rekomendasi; (4) Pemantauan; dan (5) Evaluasi.

- Perumusan Masalah

Perumusan masalah berkaitan dengan pengumpulan berbagai macam informasi dan pengetahuan yang berhubungan dan relevan dengan kebijakan. Perumusan masalah ini mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah yang ada. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab, memetakan tujuan-tujuan, memadukan berbagai pandangan, dan merancang peluang kebijakan-kebijakan baru.

- Peramalan

Peramalan menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang fleksibel, potensial, dan mengestimasi dampak dari kebijakan yang ada, mengenali

kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.

- **Rekomendasi**

Rekomendasi menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang ada. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

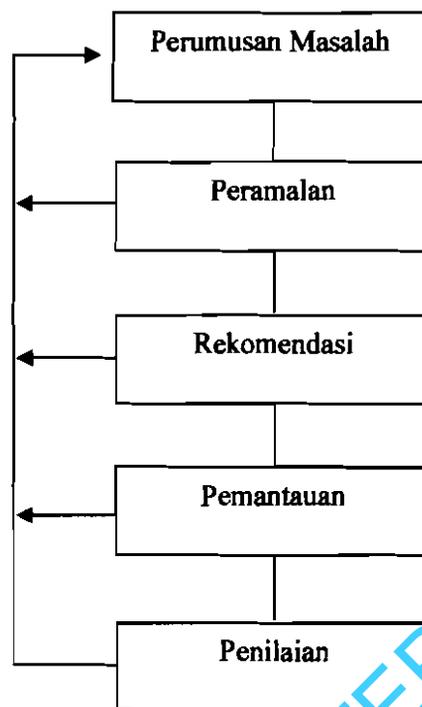
- **Pemantauan**

Pemantauan adalah serangkaian proses pengamatan secara teliti tahap demi tahap yang telah dilewati. Dari sini akan diperoleh informasi akibat-akibat yang timbul dari kebijakan sebelumnya yang relevan dengan kebijakan yang diambil.

- **Evaluasi**

Evaluasi menghasilkan informasi ada tidaknya ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan realitas yang dicapai. Evaluasi berguna dalam proses penilaian kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah diselesaikan, tetapi juga klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu penyesuaian kembali dan perumusan ulang masalah.

Proses-proses pembuatan Kebijakan itu dapat diilustrasikan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Prosedur Pembuatan Kebijakan

c. Implementasi Kebijakan

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah: “Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Webster dalam Wahab, 2004:64). Sarana untuk dapat menimbulkan dampak dimaksud dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, penyediaan anggaran dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan sebagai implementator.

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "*street level bureaucrats*" untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, dan pemerintah desa.

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Sunggono 1994:137). Berdasarkan pengertian tersebut maka implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan.

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam pelaksanaannya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di

bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Mazmanian dan Sebatier mendefinisikan implementasi sebagai berikut :

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”. (Mazmanian dan Sebatier dalam Wahab,2004:68).

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan setelah melewati serangkaian kajian apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang baik atau tidak bagi masyarakat sasaran (*target group*)

Bagian terpenting dari sebuah rangkaian kebijakan publik adalah implemetasi kebijakan. Keberhasilan dari sebuah kebijakan publik selain terletak pada proses perumusannya juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Rumusan kebijakan yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak diimplementasikan dengan benar, demikian pula sebaliknya. Keduanya merupakan satu kesatuan yang harus saling mendukung antara satu dengan yang lainnya.

Pengertian implementasi kebijakan menurut Patton dan Sawicki (dalam Tangkilisan, 2003: 9) adalah sebagai berikut : "Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi".

Riant Nugroho Dwijowijoto (2004:158) mengemukakan bahwa :

"Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut".

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan. Dunn mengistilahkan implementasi dengan lebih khusus dengan menyebutnya implementasi kebijakan (*policy implemtation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn, 2003:132).

Pengertian implementasi kebijakan menurut Edward III adalah sebagai berikut

:

"policy implementation as we have seen is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects". (Edward III, 1980:1).

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah :

“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2011:101-102).

Definisi diatas menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut (Dwijowijoto, 2004:158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasikan dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan programguna mencapai tujuan berdasarkan rumusan program dan peraturan yang telah ditetapkan baik secara langsung maupun melalui *derivate* dari kebijakan publik tersebut. Dalam mengimplementasikan kebijakan eksekutif selaku implementator

mengatur, mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi secara efektif dan efisien.

2. Model Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel yang saling berhubungan satu sama lain. Banyak ahli yang telah merumuskan model-model implementasi kebijakan berdasarkan pemahaman dan sudut pandang masing-masing dengan variabel-variabel yang berbeda. Model-model kebijakan tersebut dibuat guna menyederhanakan pemahaman mengenai konsep implementasi suatu kebijakan. Dengan memahami variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan maka dengan mudah kita dapat mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan. Berikut ini akan disajikan beberapa model implementasi kebijakan menurut beberapa pakar.

a. Model Van Horn dan Van Meter

Salah satu model implementasi kebijakan publik adalah formulasi dari Donald S. van Meter dan C.E. van Horn yang meliputi : ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi-sosial-politik, dan kecenderungan pelaksana (Subarsono, 2008:99).

Model implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (1975) ini adalah model yang paling klasik. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel

yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut :

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
- b. Karakteristik agen pelaksana/ implementor.
- c. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
- d. Kecenderungan (disposition) pelaksana/Implementor.

(Dwidjowijoto, 2004 : 438).

Lebih lanjut, Nugroho menjelaskan bahwa dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Yang dimaksud agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Kemudian pada variabel kondisi ekonomi, sosial, dan politik mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Selanjutnya yang dimaksud disposisi implementor mencakup tiga hal yang penting, yakni :

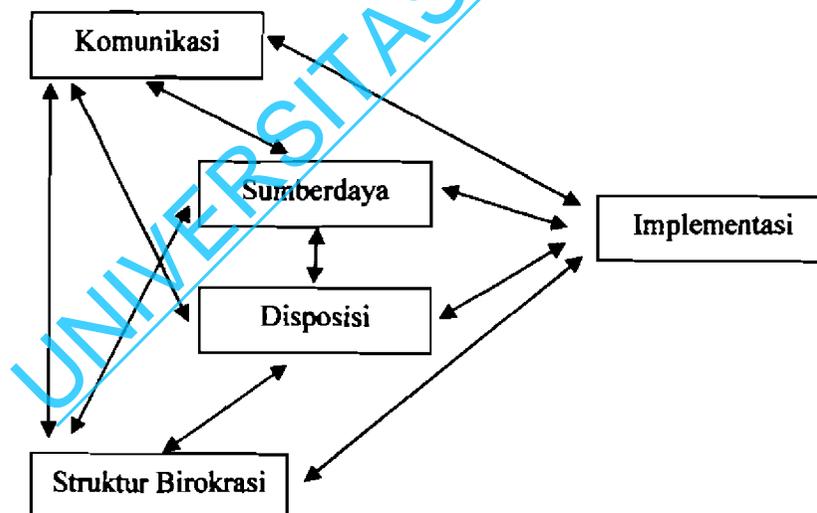
- a. Tanggapan, implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
- b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan,

c. Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

b. Model *George C. Edwards III* (1980)

Model Implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah (Indiahono, 2009:31-33) :

- a). Komunikasi,
- b). Sumber daya,
- c). Disposisi,
- d). Struktur Birokrasi.



Gambar 2.2. Model Implementasi Edward III
Sumber: Edward III, (1980:148)

Masing-masing variabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut (dalam <file:///G:/download/implementasi-kebijakan-george-edward.htm>) :

a).Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011 : 97 dalam file:///G:/download/ implementasi-kebijakan-george-edward.htm)

Widodo kemudian menambahkan bahwa :

Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

b). Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa: bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c). Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah

digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tidak jarang dalam menjalankan kebijakan implementator akan menghadapi hambatan di lapangan. Dalam situasi yang demikian komitmen yang tinggi dari implementator akan memberikan kontribusi yang penting.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d). Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

c. Model Merilee S. Grindle (1980)

Grindle (dalam Wibawa, 1994:127) mengemukakan teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi (*implementation as a political and administration process*). Dalam teori ini Grindle memandang bahwa suatu implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasinya (*context of implementation*). Dalam teorinya itu Grindle mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut.

Variabel isi kebijakan (*content of policy*) menurut Grindle mencakup beberapa indikator, yaitu:

- 1) kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan.
- 2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*.
- 3) derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan.
- 4) letak pengambilan keputusan.
- 5) pelaksana program telah disebutkan dengan rinci, dan
- 6) Dukungan sumber daya yang dilibatkan.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan (*context of implementation*) mencakup 3 indikator, yaitu:

1. seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
2. karakteristik lembaga dan rejim yang sedang berkuasa.

3. tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Di sini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

Ilustrasi yang menggambarkan hubungan2 variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) dalam mempengaruhi keberhasilan implemetasi kebijakan menurut Grindle adalah seperti terlihat pada Gambar 2.3. berikut :



Gambar 2.3. Model implementasi Kebijakan Menurut Grindle
Sumber: Grindle, Merilee S., 1980:11

Masing-masing variabel di atas dijelaskan oleh Rochyati

(dalam file:///G:/download/url-1.htm) sebagai berikut :

1). Content of Policy (Isi Kebijakan)

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, biasanya akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran bahkan mungkin dari implementornya sendiri yang mungkin merasa kesulitan melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sbb:

a). Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program.

Apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak (misalnya jenis kebijakan Redistribution menurut katagori Ripley dan Lowie), maka implementasinya akan lebih mudah karena tidak akan menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.

b). Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan lebih mudah diimplementasikan karena lebih mudah mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat.

c). Jangkauan perubahan yang diinginkan.

Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, biasanya akan semakin sulit pula dilaksanakan. Misalnya kebijakan anti Korupsi dan KKN yang telah berkali-kali dibuat oleh beberapa presiden RI dengan berbagai badan pemeriksa, tetap menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi di

dunia karena kebijakan tersebut menuntut banyak perubahan perilaku yang tidak dilaksanakan dengan konsekuen. Kredibilitas pesan kebijakan tidak terpenuhi karena isi kebijakan yang mengatur tentang adanya sanksi tidak dijalankan dengan konsisten.

d). Kedudukan pengambil keputusan.

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan (baik secara geografis ataupun organisatoris), akan semakin sulit pula implementasinya. Kasus demikian banyak terjadi pada kebijakan-kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak instansi.

e). Pelaksana program.

Manakala pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, maka tingkat keberhasilannya juga akan tinggi.

f). Sumber daya yang disediakan.

Tersedianya sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan, dengan sendirinya akan mempermudah pelaksanaannya. Sumberdaya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dll.

2). *Context of Implementation*(Konteks Implementasi)

Konteks dimana dan oleh siapa kebijakan tersebut diimplementasikan juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya, karena sebarang baik dan mudahnya kebijakan dan sebarang dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementornya. Karakter dari

pelaksana akan mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya, sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya.

Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut:

a). Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.

Strategi, sumber dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang diimplementasikannya. Apabila suatu kekuatan politik merasa berkepentingan atas suatu program, maka mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi sehingga mereka dapat menikmati outputnya.

b). Karakteristik lembaga dan penguasa.

Implementasi Suatu program dapat menimbulkan konflik bagi yang kepentingan-kepentingannya dipengaruhi. Strategi penyelesaian konflik mengenai "siapa mendapatkan apa" (misalnya penggusuran pasar tradisional menjadi supermarket) dapat menjadi petunjuk tak langsung mengenai ciri-ciri penguasa atau lembaga yang menjadi implemento

c). Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Kepatuhan kelompok sasaran sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu program. Biasanya kelompok yang merasa dirugikan atas suatu kebijakan akan bersikap antipati, begitu pula sebaliknya. Hal ini erat kaitannya dengan seberapa besar kepentingan mereka terakomodir dalam kebijakan yang diimplementasikan.

Faktor lain yang juga berpengaruh adalah skill yang dimiliki oleh kelompok sasaran. Skill ini diperlukan terutama pada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

d. Model Mazmanian dan Sabatier

Model implementasi kebijakan publik ini dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier (1983), yang mengemukakan tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu karakteristik dari masalah (*Trackability of the problem*), sebuah karakteristik kebijakan (*Ability of statute to structure implementation*) dan lingkungan kebijakan (*Non Statutory Variables Affecting Implementation*) (Subarsono, 2008 : 94).

Model Mazmanian dan Sabatier disebut model Kerangka Analisis Implementasi *Framework for Implementation analysis* :

a. Karakteristik masalah

1). Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.

Disatu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi

penduduk atau harga beras yang tiba-tiba naik. Dipihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya sesuatu diimplementasikan.

2). Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.

Ini berarti suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih kuat, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda-beda.

3). Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.

Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasaran tidak terlalu besar.

4). Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

b. Karakteristik kebijakan

1). Kejelasan isi kebijakan

Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan lebih mudah untuk diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan kebijakan ini merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi.

- 2). Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis
Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi
- 3). Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.
Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya.
- 4). Seberapa besar ada keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.
Kegagalan sebuah program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
- 5). Kejelasan dan konsistensi aturan.
- 6). Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
Kasus korupsi yang terjadi di negara-negara dunia ketiga, khususnya di Indonesia salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat dalam melaksanakan tugas pekerjaan atau program-program.
- 7). Seberapa luas akses kelompok di luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat di dalamnya akan relatif mendapatkan dukungan daripada

program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.

c. Lingkungan kebijakan

1). Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.

Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi sebuah program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

2). Dukungan publik terhadap kebijakan

Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif, seperti kenaikan harga BBM atau kenaikan pajak akan kurang mendapat dukungan publik.

3). Sikap dari kelompok pemilih (*constituent groups*)

Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain: 1) kelompok pemilih dapat melakukan investasi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud mengubah keputusan; 2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja yang dijalankan oleh

badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.

4). Tingkat komitmen keterampilan dari aparat dan implementor.

Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat dari badan-badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

3. Model Kebijakan

Model kebijakan adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu (Dunn, 2003). Model kebijakan dapat dinyatakan sebagai konsep, diagram, grafik, atau persamaan matematika.

Dalam konteks studi perumusan kebijakan publik, terdapat sejumlah model perumusan kebijakan. Thomas R. Dye (1995, dalam Dwidjowijoto, 2006:74) merumuskan model-model ke dalam sembilan model formulasi kebijakan, yaitu: (1) model kelembagaan, (2) model proses, (3) model kelompok (4) model elit, (5) model rasional, (6) model Inkremental, (7) model teori permainan, (8) model pilihan publik, dan (9) model sistem.

1. Model kelembagaan

Model ini adalah model yang paling sederhana dan paling sempit dalam formulasi kebijakan publik. Model ini didasarkan pada fungsi-fungsi kelembagaan pemerintah. Dalam model kelembagaan ini, tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah.

2. Model proses

Asumsi dari model ini ialah bahwa politik merupakan suatu rangkaian proses, sehingga kebijakan publik juga merupakan rangkaian proses yang menyertai kegiatan politik.

3. Model teori kelompok

Model teori kelompok mengasumsikan kebijakan sebagai sebuah titik keseimbangan (equilibrium). Interaksi dalam kelompok akan menghasilkan keseimbangan dan keseimbangan ini adalah sesuatu yang terbaik.

4. Model elit

Model elit ini memandang bahwa kebijakan publik selalu mengandung bias karena merupakan preferensi politik dari para pemegang kekuasaan atau kelompok elit.

5. Model rasional

Model rasional ini mengasumsikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seharusnya memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat (*maximum social gain*).

6. Model inkremental

Model inkremental atau disebut juga model pragmatis, melihat kebijakan sebagai sebuah variasi atau kelanjutan dari kebijakan yang pernah dibuat di masa lalu.

7. Model teori permainan

Model ini disebut juga sebagai model konspiratif. Pembuatan kebijakan tak lebih sebagai suatu permainan di mana setiap langkah kebijakan akan bertemu

dengan kombinasi langkah lanjut dan langkah balasan seperti dalam permainan catur.

8. Model pilihan publik

Model ini mengandaikan manusia sebagai homo economicus yang memiliki kepentingan-kepentingan yang harus dipuaskan. Kebijakan adalah sebuah proses formulasi keputusan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan tersebut.

9. Model sistem

Formulasi kebijakan publik dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil dari sebuah sistem politik.

4. Bantuan KUBE

Program Bantuan KUBE adalah salah satu Program Pemerintah dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Program KUBE dilaksanakan sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara yang tertinggi. Sila kelima dari Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” secara jelas menunjukkan bahwa kewajiban negara adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kewajiban negara ini dipertegas lagi di dalam Pasal 27 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian di dalam Pasal 34 UUD 1945 dinyatakan secara jelas bahwa kewajiban negara adalah memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Sila kelima Pancasila dan pasal-pasal dalam UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan

perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah yang mengatur secara lebih rinci mengenai pelaksanaan kewajiban negara tersebut.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Bab IV Pasal 19-23 mengatur mengenai upaya penanggulangan kemiskinan. Di dalam pasal 19 disebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Di dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa tujuan penanggulangan kemiskinan ini adalah untuk (a) meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin, (b) memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar, (c) mewujudkan kondisi lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan, dan (d) memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1984 memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin. Pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 PP Nomor 42 tahun 1984 menyatakan secara tegas bahwa Fakir Miskin berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial berupa bantuan sosial dan/atau sehabilitasi sosial. Bantuan sosial diberikan kepada fakir miskin dengan maksud agar mereka dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dengan cara memberikan bantuan modal usaha. Sedangkan rehabilitasi

sosial terhadap fakir miskin dimaksudkan agar mereka mampu melaksanakan dan mengembangkan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat.

Dalam upaya menjalankan program bagi fakir miskin, Kementerian Sosial RI diberikan kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan program pemberdayaan fakir miskin mulai dari kegiatan usaha seleksi, pembinaan, pengembangan, dan pembinaan lanjutan. Kegiatan seleksi terhadap keluarga sasaran dimaksudkan agar bantuan yang akan digulirkan tepat sasaran, tepat kebutuhan dan tepat waktunya. Dalam hal ini Kementerian Sosial dapat secara langsung melaksanakan sendiri programnya atau dengan melibatkan Pemerintah Daerah melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Usaha pembinaan terhadap fakir miskin meliputi kegiatan antara lain:

- a. pembinaan kesadaran berswadaya;
- b. pembinaan mental;
- c. pembinaan fisik;
- d. pembinaan keterampilan;
- e. pembinaan kesadaran hidup bermasyarakat.

Salah satu bentuk bantuan sosial bagi fakir miskin adalah adanya pemberian bantuan modal usaha terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang secara swadaya dibentuk dan dikelola sendiri oleh masyarakat. Program pemberian bantuan permodalan bagi KUBE diatur dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 84 Tahun 1997. Program KUBE ini adalah salah satu pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial yang dijalankan oleh Kementerian Sosial yang pelaksanaannya melalui suatu proses yang panjang dan berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat.

Hikmat dan Saragih (2005:61) mengemukakan bahwa bantuan KUBE dari pemerintah meliputi bantuan bergulir modal usaha ekonomi produktif, bantuan penguatan modal usaha kelompok, santunan hidup dan akses jaminan kesejahteraan sosial keluarga fakir miskin, rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, insentif tabungan sejahtera, dan fasilitas usaha kesejahteraan sosial.

Bantuan bergulir modal usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bertujuan untuk meningkatkan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat miskin, meningkatkan motivasi, interaksi dan kerja sama kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber sosial-ekonomi di tingkat lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak terkait. Kegiatan usaha sosial ekonomi produktif yang dikembangkan meliputi berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri rumah tangga, jasa, dan kegiatan ekonomi lainnya. Pemberian bantuan dilaksanakan dalam bentuk fasilitas ekonomi bantuan modal usaha.

Penguatan modal usaha melalui LKM-KUBE Sejahtera bertujuan memperkuat organisasi pengelola simpan pinjam, pengguliran dana bantuan sosial, meningkatkan kepedulian warga mampu terhadap upaya pengentasan kemiskinan, memperkuat akses KUBE terhadap permodalan melalui mekanisme perbankan, serta memajukan LKM sebagai embrio koperasi.

Santunan hidup dan jaminan akses kesejahteraan sosial keluarga fakir miskin bertujuan untuk memperkuat ketahanan sosial keluarga miskin dalam menghadapi resiko bekerja, memelihara kelangsungan pendidikan anak, serta peningkatan kualitas kesehatan dan gizi keluarga, santunan sosial kematian dan situasi sulit/darurat

lainnya. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan sosial sementara, secara langsung atau tidak langsung melalui bank yang dapat dipergunakan atas kesepakatan anggota KUBE dan rekomendasi pendamping sosial.

Rehabilitasi rumah tidak layak huni dan daerah kumuh bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan pemukiman dalam bentuk rehabilitasi pemukiman tidak layak huni dan penataan lingkungan kumuh. Kegiatan pokok mencakup bimbingan dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat sekitar, gerakan membangun rumah dan lingkungan sehat, kerja bakti sosial, perbaikan rumah dan sanitasi lingkungan daerah kumuh, pembangunan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar, serta fasilitas pelayanan publik lainnya, pemberian bantuan bahan bangunan dan sarana-prasarana lingkungan.

Insentif tabungan sejahtera bertujuan untuk memotivasi fakir miskin anggota KUBE untuk menabung dan mengakumulasi aset yang berguna untuk peningkatan taraf dan kualitas kesejahterannya melalui pemberian insentif khusus. Insentif ini disediakan oleh pemerintah dalam bentuk dana pendampingan untuk setiap jumlah yang ditabung hingga mencapai batas tertentu. Fasilitasi usaha kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perlindungan sosial berbasis masyarakat.

Pemberdayaan fakir miskin melalui pemberian bantuan KUBE mengacu pada prinsip-prinsip berikut:

1. Pelayanan berpihak kepada fakir miskin, artinya dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

2. Menguntungkan, artinya semua kegiatan usaha yang dilaksanakan anggota KUBE harus sudah diperhitungkan dengan matang kelayakan usahanya untuk menghindari kerugian.
3. Berkelanjutan, artinya usaha yang dilakukan oleh anggota KUBE dapat merintis usaha baru yang lebih prospektif atau dapat dikembangkan.
4. Manajemen dan administrasi yang standar sehingga pelaporan keuangan dapat diberikan secara rutin dan transparan.

Implementasi kebijakan pemberian bantuan KUBE untuk penduduk miskin ini adalah sebagai berikut (Hikmat & Saragih, 2005):

1. Pemerintah Pusat

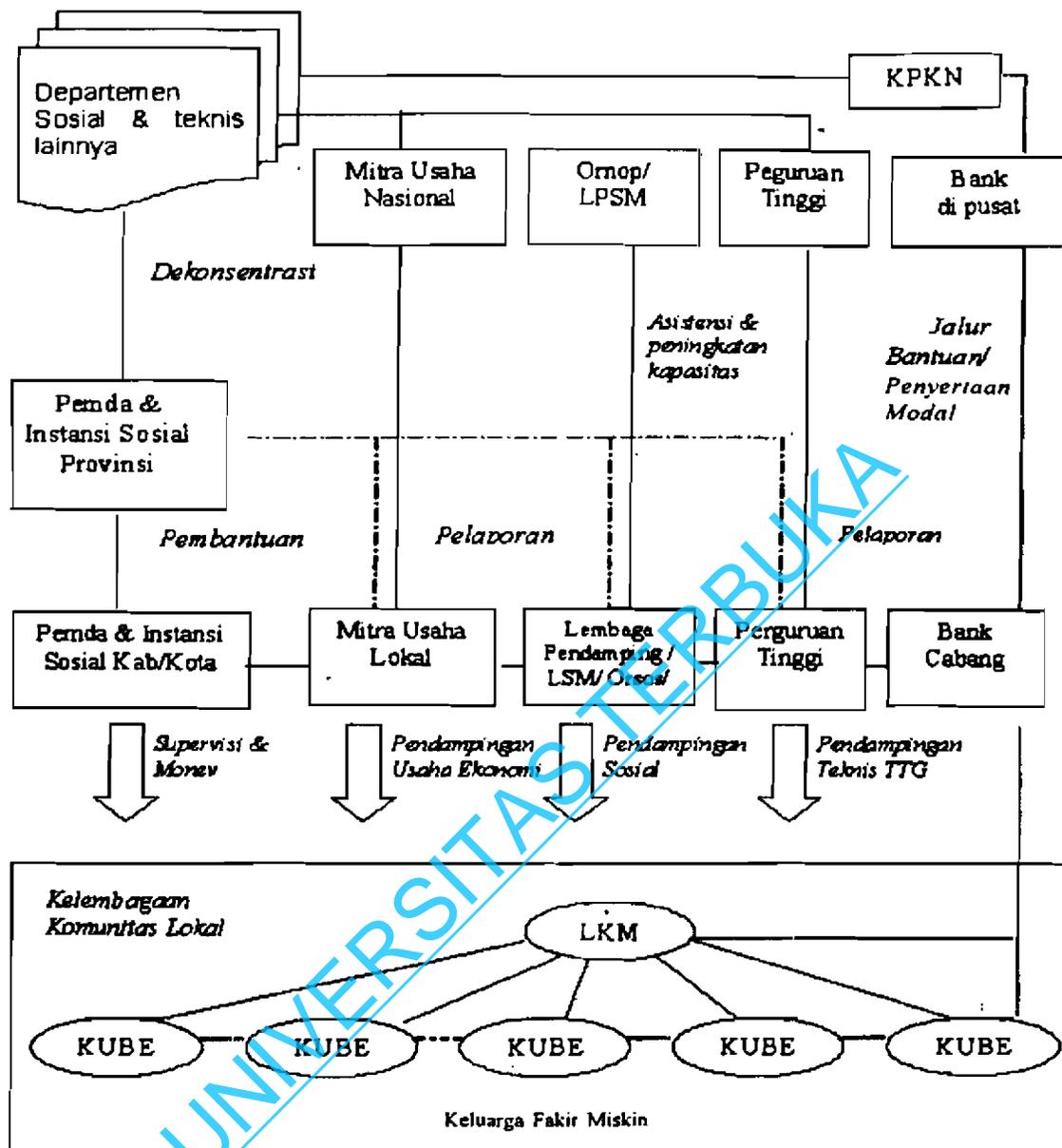
Pada tingkat pusat, Departemen Sosial sebagai penanggungjawab fungsional merumuskan kebijakan teknis, mengambil inisiatif perumusan dan penetapan legislasi, standarisasi, akreditasi, dan pengendalian program, serta memfasilitasi dukungan dana sesuai ketentuan yang berlaku. Kewenangan departemen sosial secara rinci adalah:

- a. Menetapkan kebijakan teknis pemberdayaan fakir miskin.
- b. Menetapkan prioritas pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan dan kemampuan.
- c. Mengambil inisiatif penetapan peraturan perundang-undangan.
- d. Menetapkan standarisasi dan pedoman-pedoman kegiatan termasuk indikator kinerja.
- e. Menetapkan mekanisme pelaksanaan kegiatan, prosedur tetap, dan pedoman teknis operasional.
- f. Melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja program.

2. Pemerintah Provinsi
 - a. Gubernur bertanggungjawab merumuskan kebijakan operasional, melaksanakan program penanganan yang bersifat dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta melakukan pemantauan dan evaluasi dalam lingkup provinsi atau antar kabupaten/kota.
 - b. Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan program penanganan kemiskinan kepada pemerintah pusat, khususnya kepada menteri sosial secara berkala.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota
 - a. Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan program penanganan yang bersifat dekonsentrasi dan tugas pembantuan, termasuk penyediaan dana pendamping dari APBD kabupaten/kota, serta penghimpunan dana-dana masyarakat dan dunia usaha di wilayah kabupaten/kota.
 - b. Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan program penanganan kemiskinan kepada DPRD kabupaten/kota, Gubernur, dan Menteri Sosial.
4. Mitra Kerja
 - a. mitra kerja ikut bertanggungjawab terhadap program penanganan kemiskinan.
 - b. Mitra kerja dunia usaha nasional dan lokal bertanggungjawab dalam memberikan jaminan lapangan kerja, penyediaan sarana-prasarana usaha sosial-ekonomi, jaminan akses pasar, dan jaminan sosial keluarga miskin.

- c. Mitra kerja bidang sosial bertanggungjawab dalam pendampingan sosial keluarga miskin melalui pendekatan pekerjaan sosial mulai dari identifikasi sasaran dan potensi, analisis kebutuhan, pembentukan kelompok, dinamisasi kegiatan dalam kelompok, pembentukan lembaga keuangan mikro, pembentukan koperasi, akses terhadap layanan sosial dasar dan usaha-usaha kesejahteraan sosial lain.
- d. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan perbankan bertanggungjawab dalam pengembangan pengelolaan bantuan keuangan bagi KUBE melalui sistem penjaminan usaha.
- e. Kelembagaan lokal atau masyarakat (RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan) bertanggungjawab dalam memfasilitasi perencanaan, pendampingan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada tingkat lokal.

Bagan berikut adalah model umum kelembagaan pemberdayaan fakir miskin.



Gambar 2.4. Model umum kelembagaan dan pengorganisasian program pemberdayaan fakir miskin

Mekanisme pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan penduduk miskin melalui keterpaduan KUBE dan LKM dilakukan dengan proses sebagai berikut:

Tahap Persiapan

1. Sosialisasi
 - a. Sosialisasi bertujuan memberi penjelasan program dan menggalang komitmen dari berbagai instansi terkait maupun pelaku pembangunan lainnya agar mendukung gerakan penanggulangan kemiskinan di daerahnya.
 - b. Sosialisasi dilaksanakan di tingkat propinsi yang diikuti instansi terkait dan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan mitra kerja lainnya.
2. Kajian wilayah dan analisis sosial ekonomi
 - a. Kajian wilayah untuk mengidentifikasi kelembagaan sosial ekonomi yang ada di lokasi kegiatan, potensi, peluang, dan sumber daya pengembangan usaha mikro serta mengenal kegiatan ekonomi mikro yang ada di daerah.
 - b. Kajian wilayah dan analisa sosial ekonomi dilaksanakan oleh pendamping dengan melibatkan masyarakat setempat, melalui pendekatan *participatory Rural Appraisal (PRA)* atau pendekatan lain yang sesuai.
3. Koordinasi dan pendekatan individu
 - a. Koordinasi dan pendekatan individu dilakukan untuk memperoleh dukungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota kecamatan dan desa/kelurahan serta tokoh-tokoh masyarakat di sekitar lokasi program.
 - b. Koordinasi dilakukan oleh ko-TPM dan TPM secara terus-menerus.
4. Kontrak sosial
 - a. Kontrak sosial dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dari berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan program kegiatan.

- b. Warga masyarakat sepakat untuk bergabung dalam wadah KUBE dan LKM.
- c. Kontrak sosial dilakukan bersama antara pemerintah, pendamping, keluarga fakir miskin calon anggota KUBE.

Tahap Pembentukan KUBE

Pembentukan kelembagaan KUBE dilaksanakan dengan proses sebagai berikut:

1. Identifikasi keluarga fakir miskin.
Identifikasi dilaksanakan oleh pendamping, dimaksudkan untuk mendapatkan data calon peserta program.
2. Sosialisasi program kepada keluarga fakir miskin.
Sosialisasi dilaksanakan oleh pendamping, merupakan upaya penyebarluasan informasi tentang konsepsi, tahapan kegiatan, dan syarat keikutsertaan dalam program.
3. Pra Latihan Wajib Kelompok
Pra LWK merupakan kegiatan pemantapan menjelang dilaksanakannya LWK bagi anggota KUBE.
4. Latihan Wajib Kelompok
LWK merupakan kegiatan pembentukan dan mempersiapkan anggota KUBE dalam mengikuti pelaksanaan program.

5. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemberian bantuan modal terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pernah dilakukan oleh Puji Meilita Sugiana, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada Bulan Juli Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2012 dengan judul **Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui program pemberdayaan Ekonomi kelompok usaha bersama (KUBE) di Jakarta Selatan**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan program KUBE sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan dan mengetahui hambatan dalam implementasi kebijakan program KUBE. Penelitian yang dilakukan tersebut merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan.

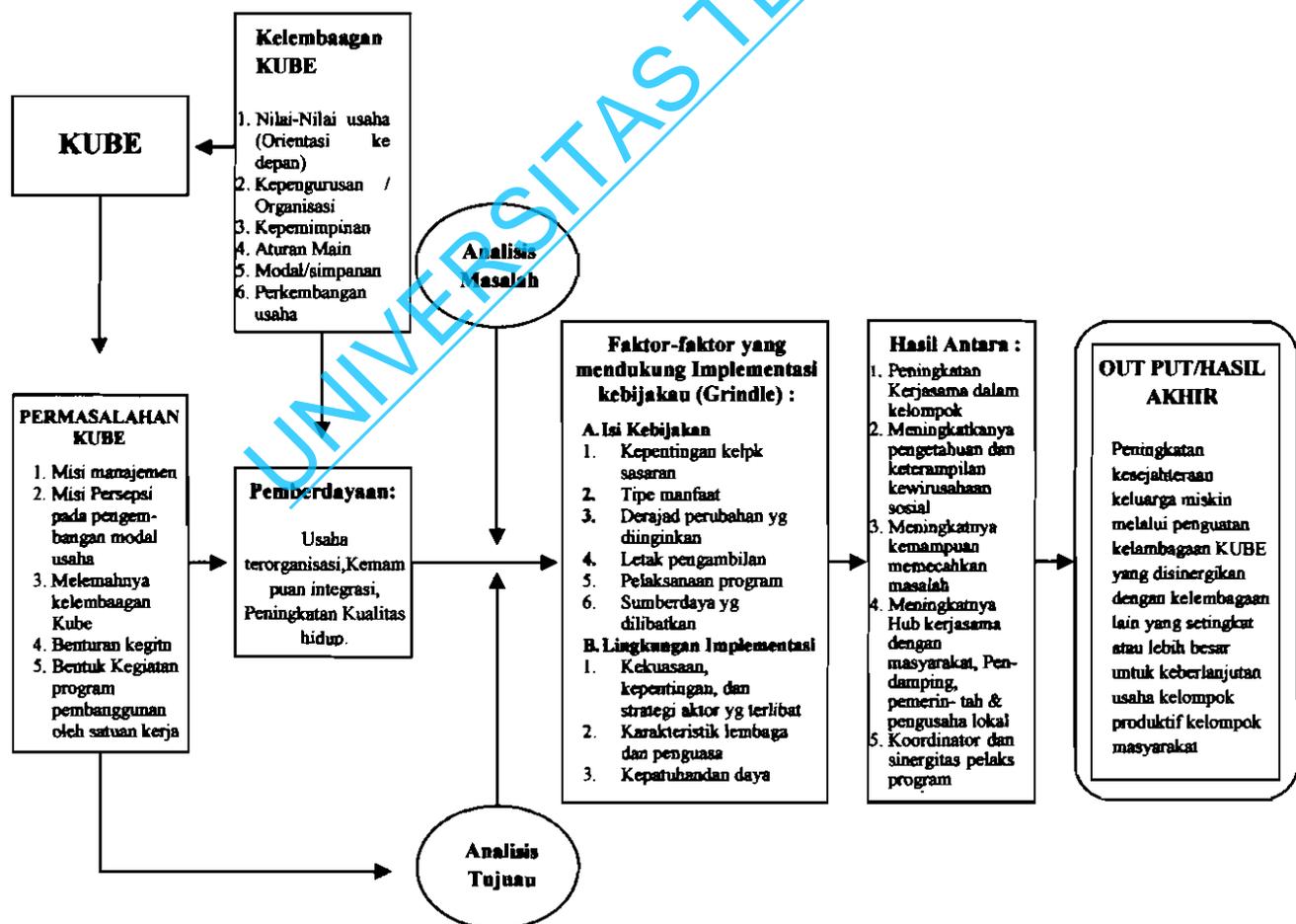
Dalam melakukan analisis terhadap kebijakan yang diteliti penulis menggunakan Model Mazmanian dan Sabatier yang juga disebut dengan model Kerangka Analisis Implementasi *Framework for Implementation analysis*, yang melihat implementasi kebijakan dari sisi Karakteristik Masalah, Karakteristik Kebijakan, dan Lingkungan Kebijakan.

Hasil dari penelitian ini adalah banyaknya ditemukan jenis usaha yang macet dikarenakan pendampingan yang kurang, sehingga membuat program ini seakan sia-sia dan menimbulkan masalah baru. Selain itu, pembentukan KUBE yang dilakukan oleh sebagian pihak yang memiliki kepentingan serta masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan anggota juga menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan program. Masalah lainnya adalah kurangnya keterampilan yang diberikan, bantuan yang diterima tidak utuh dan diberikan (diadakan) melalui pihak ketiga, serta kendala kemampuan manajerial pemasaran dalam bentuk kemasan produk. Alhasil, pelaksanaan KUBE belum menjadi jawaban yang pasti dalam pengentasan kemiskinan di ibu kota.

Pada bagian akhir penelitian ini, peneliti menyarankan untuk melakukan penilaian terhadap kebutuhan kelompok sasaran. Selain itu Pendampingan terhadap KUBE perlu ditingkatkan dan dikembangkan sehingga efektivitas KUBE dalam meningkatkan keterampilan para anggota menjadi lebih tinggi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan sasarnya secara lebih besar.

B. Kerangka Berfikir

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan dasar teori yang telah diuraikan, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 2.5. Kerangka Berfikir Penelitian

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari bias dan kerancuan dalam penafsiran, diperlukan suatu pembatasan masalah sebagai definisi operasional dari penelitian ini. Dalam penelitian ini yang akan dibahas secara rinci adalah indikator-indikator dalam implementasi pemberian bantuan KUBE di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara sebagai berikut:

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Yang dimaksud dengan Implementasi Kebijakan adalah suatu tindak lanjut setelah suatu kebijakan ditetapkan, baik strategi-strategi maupun operasionalnya guna mencapai tujuan dari program kebijakan tersebut. Kebijakan dimaksud adalah pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara. Dalam hal ini terlebih dulu peneliti akan menelaah proses pemberian bantuan KUBE berdasarkan SOP atau juklak-juknis yang ada. Kemudian juklak-juknis tersebut dibandingkan dengan implementasinya di lapangan.

2. Analisa Implementasi Kebijakan

Setiap kebijakan publik sejatinya melibatkan kepentingan berbagai pihak/aktor yang didasari dengan tujuannya masing-masing. Kepentingan pihak-pihak tersebut sudah mulai muncul mulai dari tahap perumusan kebijakan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi. Ali, Alam dan Wantu (2012 : 59) mengkatagorikan pihak-pihak yang mempengaruhi kebijakan publik menjadi dua sub sistem, yaitu : sub sistem *stakeholder* dan sub sistem lingkungan kebijakan. Sub sistem stakeholder dapat berasal dari unsur masyarakat (pengamat, ahli, ilmuwan), anggota atau kelompok warga,

organisasi sosial masyarakat, media massa dan pemerintah sebagai pemegang otoritas. Sedangkan sub sistem lingkungan kebijakan adalah segala sesuatu yang berada dan berpengaruh terhadap perumusan suatu kebijakan. Sesuatu tersebut dapat berupa situasi yang berkaitan dengan realitas geografis, sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan sebagainya.

Dalam konteks otonomi daerah kerap kali kita jumpai bahwa kepentingan politik penguasa lokal begitu kental dalam mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik di daerah. Hal ini tentu saja akan berpengaruh juga terhadap tepat atau tidaknya penentuan sasaran suatu kebijakan. Pada sisi lain, terbatasnya SDM dan anggaran serta kondisi sosial masyarakat (ekonomi, pendidikan, budaya, dll) akan berkontribusi terhadap efektif atau tidaknya implementasi sebuah kebijakan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka setelah melakukan perbandingan antara SOP/juklak-juknis dengan kenyataan penerapan di lapangan, peneliti akan menggali data melalui informan yang ditunjuk. Berdasarkan data tersebut peneliti melakukan analisis pada setiap indikator, sehingga peneliti dapat mengetahui secara jelas faktor apa saja yang menghambat implementasi pemberian bantuan KUBE tersebut. Fenomena yang ditemui akan dianalisis menggunakan konsep Grindle, yaitu berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut :

- a). *Content of Policy* (Isi Kebijakan), yang akan menjelaskan indikator-indikator berikut ini :
 - 1). Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program.
 - 2). Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

- 3). Jangkauan perubahan yang diinginkan.
- 4). Kedudukan pengambil keputusan.
- 5). Pelaksana program.
- 6). Sumber daya yang disediakan.

b). Context of Implementation(Konteks Implementasi), yang akan menjelaskan indikator-indikator berikut ini :

- 1). Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
- 2). Karakteristik lembaga dan penguasa.
- 3). Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

3. Bantuan KUBE

Yang dimaksud dengan bantuan KUBE dalam penelitian ini adalah bantuan KUBE untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan penelitian kualitatif ini penulis bermaksud memahami fenomena dengan melakukan pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik. Data yang diperoleh dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2000:6). Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan sedikit luas.

Sedangkan secara umum, penelitian deskriptif dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2004: 11). Dalam penelitian deskriptif ini, peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis. Peneliti akan melakukan eskplorasi dan menggambarkan fenomena yang terlihat dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.

Peneliti memandang bahwa penelitian kualitatif sangat tepat digunakan dalam penelitian ini. Alasan penggunaan pendekatan kualitatif ini karena *pertama*, permasalahan yang dikaji dalam penelitian mengenai penerapan kebijakan terhadap

penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini peneliti sangat membutuhkan data lapangan yang sifatnya kontekstual dan aktual. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hahikat hubungan antara peneliti dengan obyek yang akan diteliti. *Ketiga* metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif, dimana setiap fenomena dan data yang diperoleh dijelaskan dalam bentuk narasi kalimat sehingga menjadi suatu penjelasan yang utuh. Laporan yang diberikan dalam penelitian ini berupa kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan secara jelas.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, menyatunya antara peneliti sebagai subyek dengan masalah yang akan diteliti sebagai obyek memegang peranan yang sangat penting. Hal tersebut akan sangat menentukan baik dalam tingkat pemahaman peneliti terhadap subyek maupun dalam hal kemudahan peneliti dalam menggali data di lapangan, karena peneliti tidak dianggap asing oleh obyek penelitian. Dalam hal ini apabila peneliti cukup dikenal oleh subyek maka lebih mudah untuk mengungkapkan makna yang sebenarnya.

Faktor penting yang menjadi dasar pertimbangan peneliti dalam menentukan lokasi penelitian adalah adanya fenomena ketimpangan atau ketidaksesuaian implementasi kebijakan pemberian bantuan KUBE dari yang seharusnya dilaksanakan. Umumnya, implementasi kebijakan di lapangan didasari oleh SOP atau

juknis sedemikian rupa yang menjadi panduan bagi implementator dan penerima/target sasaran serta stekholder lainnya. Dalam hal ini, menurut hasil pengamatan sementara peneliti sehari-hari, terdapat kemandegan dalam beberapa hal, sehingga jalannya implementasi bantuan KUBE kurang efektif.

Berdasarkan asumsi pendekatan kualitatif yang demikian maka penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sukamara terhadap implementasi kebijakan bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) tahun 2012. Penentuan lokasi penelitian ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa secara administratif, Kecamatan Sukamara merupakan tolak ukur bagi kecamatan lainnya mengingat Kecamatan Sukamara adalah Ibu Kota dari Kabupaten Sukamara. Lebih khusus lokasi penelitian akan diarahkan pada KUBE-KUBE yang menurut implementator berjalan paling baik di Kecamatan Sukamara tersebut.

Disamping pertimbangan di atas, ketersediaan waktu, biaya dan tenaga juga menjadi dasar pertimbangan peneliti dalam menentukan lokasi penelitian (Moleong, 2000:86). Berdasarkan pertimbangan tersebut dan diperkuat dengan hasil wawancara dengan pihak dinas yang menjadi informan 1 dan informan 2 maka penelitian dilakukan di Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara.

Sedangkan untuk waktu penelitian, sesuai kalender akademik UT, dilaksanakan mulai pada Bulan April sd Juli 2013.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini menitikberatkan pada implementasi kebijakan pemberian bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah dan faktor-faktor yang menghambat proses implementasi kebijakan tersebut di lapangan.

Secara lebih rinci fokus penelitian diungkap dengan berpedoman pada model implementasi kebijakan menurut Grindle, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. **Content of policy (Isi kebijakan)** bantuan KUBE, hal ini mencakup :

- 1). Kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* yang dipengaruhi oleh adanya program/kebijakan.
- 2). Jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*.
- 3). Jangkauan perubahan yang diinginkan.
- 4). Apakah letak kebijakan tersebut sudah tepat.
- 5). Apakah kebijakan tersebut telah menyebut implementasinya dengan rinci.
- 6). Apakah program tersebut didukung oleh sebuah sumber daya yang memadai

b. **Context of implementation (lingkungan implementasi)** program bantuan KUBE, mencakup :

- 1). Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
- 2). Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa
- 3). Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

4. Unit Analisis

Menurut peneliti, unit analisis adalah unit yang akan diteliti dan dijelaskan serta merupakan objek dari penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah KUBE di Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, baik dalam kedudukannya sebagai individu terpisah, maupun sebagai keseluruhan anggota masyarakat.

5. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu :

1). Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengumpulan data dari Informen melalui wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan pemberian bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan faktor-faktor apa saja yang menghambat serta mendukungnya. Wawancara dilakukan kepada Pejabat Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sukamara yang secara teknis mendapat tugas melaksanakan implementasi kebijakan dan anggota KUBE di Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah.

2). Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer maupun oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut (Umar, 2004:100). Data sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh dari data-data kegiatan sosialisasi, pendampingan, materi dan notulen rapat/sosialisasi/pendampingan, arsip, dokumentasi kegiatan, data kelompok, dan lain-lain yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan pemberian bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah.

B. Teknik Pengambilan Informan

Dalam penelitian ini perspektifnya adalah operasional karena bersifat mengamati dan menganalisa implementasi suatu kebijakan pemerintah dalam hal pemberian bantuan modal KUBE. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses implementasi suatu kebijakan yang secara khusus mengenai implementasi kebijakan pemberian bantuan modal KUBE, oleh karenanya maka dibutuhkan teknik pengambilan informan yang tepat dalam kelompok orang yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini peneliti mengambil informan secara *purposif*, yaitu terhadap orang-orang yang memahami implementasi kebijakan atau yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan yang diteliti.

Dengan menggunakan teknik *purposif*, informan awal yang ditentukan adalah staff atau pejabat di Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sukamara yang bertugas melaksanakan program Pemberian Bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) karena dianggap menguasai permasalahan yang diteliti (*key informan*). Informasi selanjutnya diminta kepada anggota atau pengurus KUBE yang menurut informan awal paling berhasil mengelola bantuan modal KUBE mereka.

Dengan memperhatikan karakter informan maka dalam penelitian ini jumlah informan yang dibutuhkan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu. Proses penelitian berlangsung dari satu informan ke informan yang lain. Secara spesifik, informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. **Husni Thamrin**, Kepala Bidang Sosial Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sukamara; dari narasumber ini dapat diperoleh informasi mengenai dasar pelaksanaan program, tujuan, sasaran, bagaimana perkembangan KUBE di

- Kabupaten Sukamara pada umumnya. Informan ini juga memberikan informasi tentang hambatan yang dihadapi.
2. **Chandra Susilo, S. Sos**, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sukamara; dari nara sumber ini diharapkan diperoleh informasi yang lebih operasional, yaitu berupa latar belakang program, data-data, tujuan, manfaat, hambatan dan kelompok mana yang dipandang paling berhasil oleh implementator.
 3. **Anggota atau pengurus KUBE**, yaitu diarahkan pada KUBE yang menurut informan 1 dan informan 2 dianggap paling berhasil dalam menjalankan usahanya. Pengurus atau anggota KUBE dipilih 1 orang untuk mewakili setiap kelompok. Pemilihan informan dari anggota atau pengurus KUBE ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari sisi pelaksana kebijakan di lapangan. Dari sini diharapkan diperoleh informasi bagaimana pendataan dimulai, bagaimana proses pembentukan KUBE, dinamika kelompok, penentuan jenis usaha, pengelolaan usaha, hambatan dan tantangan yang dihadapi, dan lain-lain. Proses penggalan data akan diteruskan kepada pihak-pihak yang dianggap penting jika data dari pengurus atau anggota KUBE dirasa belum cukup atau dirasa perlu dilakukan pengujian kebenarannya. Tetapi jika data yang didapat dipandang cukup maka penggalan data dihentikan. Dengan memperhatikan kesibukan pengurus atau anggota KUBE sasaran maka informan dari KUBE yang berhasil diwawancarai adalah **Suryadi** (Ketua Kelompok 3), **Saiman** (Bendahara Kelompok 1), **Jaelani** (Bendahara Kelompok 4), **Jainuri** (Bendahara Kelompok 2), **Arbani dan Joko** (Anggota Kelompok 8), **Muhtar** (Ketua Kelompok 5), dan **Murat** (Anggota Kelompok 7)

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data di obyek penelitian. Dalam penelitian kualitatif masalah validitas dan reliabilitas instrumen sangat tergantung dari keahlian peneliti, karena persoalan alat (*instrument*) merupakan persoalan yang kritis pada setiap penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi alat utama adalah peneliti itu sendiri (Pawito, 2008: 6). Dalam kedudukannya sebagai *key instrument* atau instrumen kunci, peneliti melaksanakan penggalan data sendiri berdasarkan kriteria-kriteria yang dipahami untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Sedangkan instrumen pendukung dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara (*interview guide*), peralatan tulis menulis, kamera foto dan alat perekam suara. Alat perekam digunakan untuk merekam data lisan saat wawancara, kamera untuk mengambil gambar atau foto, sedangkan alat tulis digunakan untuk mencatat fenomena dan kejadian yang ditemui lapangan.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga (3) macam teknik untuk melakukan pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara langsung mengenai fenomena atau tingkah laku obyek penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan.

Pengamatan yang dilakukan meliputi pengamatan secara umum akan hal-hal

yang berkaitan dengan masalah penelitian. Validitas data dari hasil obserasi ini akan sangat bergantung pada kemampuan observer/peneliti (Basrowi dan Suwandi, 2008 : 94).

Observasi dalam penelitian ini dilakukan berkali-kali dan tidak terjadwal. Observasi sudah dimulai sejak sebelum menentukan judul penelitian, saat penyusunan proposal, hingga pada saat penelitian dilaksanakan. Melalui observasi diharapkan dapat terlihat keadaan objektif di lokasi penelitian guna membuka dan memperkaya wawasan sehingga data yang diperoleh dapat dikaji, diperluas dan dicari jawabannya pada saat wawancara mendalam. Pengamatan ini dilakukan dengan mencatat, membuat sketsa atau gambar dan foto.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung oleh peneliti dengan informan. Wawancara dapat berupa wawancara personal, wawancara intersep, dan wawancara telepon. Wawancara dilakukan dengan para informan kunci yang mengetahui masalah-masalah pokok yang berkaitan dengan masalah penelitian. Melalui wawancara diharapkan diperoleh suatu gambaran yang berkaitan dengan penelitian sekaligus sebagai bahan untuk perbandingan hasil pengamatan dengan SOP/Petunjuk Teknis program/kegiatan.

Wawancara dilakukan secara langsung terhadap informan yang ditunjuk, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan. Dalam wawancara ini informan diberikan keleluasaan untuk menjawab apa adanya

sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Proses wawancara direkam dengan alat perekam yang telah disiapkan sebelumnya sebagai dokumen yang akan disajikan kemudian.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mencari data-datayang berkaitan dengan masalah penelitian atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Jika dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain, metode dokumentasi ini tidak sulit, dalam arti apabila terdapat kekeliruan sumber datanya masih tetap atau belum berubah karena dalam metode ini yang diamati adalah benda mati.

Dokumentasi yang akan digali antara lain SOP atau juklak-juknis kegiatan, Surat Keputusan, Data Kelompok, tupoksi dinas dan lain-lain. Jika dipandang perlu dokumen juga akan digali dari instansi lain yang terkait.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton (1989: 268) dalam Moleong (2000 : 103) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Langkah-langkah analisis yang digunakan untuk memahami komponen-komponen data dalam penelitian ini adalah reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Data hasil wawancara di lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian di pilah-pilah hal yang pokok, di fokuskan untuk di pilih yang terpenting kemudian di cari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan di sortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

2. Display Data

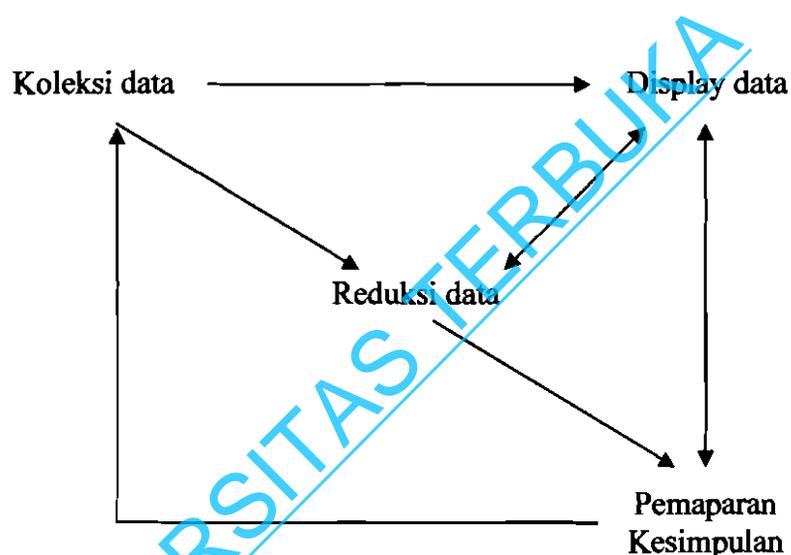
Display data (penyajian data) dimaksudkan agar lebih mepermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data peneliti. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu (Tabel, gambar atau grafik) sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data tersebut kemudian dipilah-pilah menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data dan reduksi.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan/verifikasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meninjau ulang pada laporan-laporan untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif. Dengan meninjau ulang laporan-laporan akan

mempermudah dalam upaya untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

Secara sederhana teknik analisis data seperti digambarkan pada diagram berikut :



Gambar 3.1. Model Analisis Interaktif dari Miles dan Huberman (1994) dalam (Basrowi dan Suwandi, 2008 : 210)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini disajikan berbagai hasil penelitian yang diperoleh seperti: kondisi umum lokasi penelitian, implementasi atau pelaksanaan program bantuan KUBE di lokasi penelitian, yang meliputi proses, sasaran, dan evaluasi; dan faktor-faktor yang menghambat proses implementasi tersebut.

A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Wilayah Kabupaten Sukamara

Kabupaten Sukamara merupakan pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis Kabupaten Sukamara terletak pada $2^{\circ} 19'$ Lintang Selatan (LS) sampai dengan $3^{\circ} 07'$ LS dan $110^{\circ} 25'$ Bujur Timur (BT) sampai dengan $111^{\circ} 9'$ BT dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau

Sebelah Timur : Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat

Sebelah Selatan : Laut Jawa

Sebelah Barat : Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2002 Kabupaten Sukamara terdiri atas 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sukamara, Kecamatan Jelai dan Kecamatan Balai Riam. Pada Tahun 2006 dilakukan pemekaran wilayah menjadi 5 kecamatan berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2006 yang terdiri dari :

Kecamatan Sukamara, Kecamatan Jelai, Kecamatan Pantai Lunci, Kecamatan Balai Riam, dan Kecamatan Permata Kecubung. Secara keseluruhan, luas Kabupaten Sukamara 3.827 km² dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2008 sebanyak 42.508 jiwa (BPS Kab. Sukamara, 2009 : 2) dan 44.952 jiwa pada tahun 2010 (BPS Kab. Sukamara, 2011 : 47). Luas wilayah tiap kecamatan di Kabupaten Sukamara adalah seperti disajikan pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1. Luas Wilayah Kabupaten Sukamara menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase Luas Terhadap Kabupaten
1.	Jelai	796,00	20,80
2.	Sukamara	1.028,00	26,86
3.	Balai Riam	539,00	14,08
4.	Pantai Lunci	804,00	21,01
5.	Permata Kecubung	660,00	17,25
	Sukamara	3.827,00	100,00

Sumber : Setda Kabupaten Sukamara (BPS, 2009 : 6)

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sukamara sebelah barat dan utara merupakan daerah daratan rendah sehingga potensial untuk daerah perkebunan sawit maupun kebun karet dengan ketinggian antara 0 – 100 meter di atas permukaan laut. Sedangkan wilayah selatan adalah berbatasan langsung dengan laut jawa dimana ada 8 (delapan) desa yang berada di tepi pantai. Wilayah ini sangat potensial dikembangkan untuk daerah perikanan seperti tambak ikan dan daerah pertanian tanaman pangan terutama padi sawah.

2. Profil Wilayah Kecamatan Sukamara

a. Letak Geografis

Sukamara adalah merupakan Ibu Kota kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan (Ibu Kota) dari Kabupaten Sukamara. Letak wilayahnya yang berada di tengah-tengah dengan jumlah penduduk yang paling padat dibanding kecamatan lainnya membuat Kecamatan Sukamara sangat strategis dan cocok untuk dijadikan pusat pemerintahan. Selain itu berdasarkan sejarah wilayah Kecamatan Sukamara memang sejak lama telah menjadi pusat pemerintahan ketika Sukamara menjadi Daerah Pembantu Bupati Kotawaringin Barat di tahun 1990an.

Kecamatan Sukamara menempati wilayah dengan luasan sebesar 1.028 km², terdiri dari 2 kelurahan dan 6 desa, yaitu : Kelurahan Padang, Kelurahan Mendawai, Desa Natai Sedawak, Desa Pudu, Desa Kartamulia, Desa Sukaraja, Desa Petarikan, dan Desa Pangkalanmuntai. Luas wilayah untuk tiap-tiap desa dan kelurahan adalah sebagaimana tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2. Luas Wilayah Kecamatan Sukamara menurut Desa/Kelurahan

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase Luas Terhadap Kabupaten
1.	Mendawai	147	3,84
2.	Natai Sedawak	134	3,50
3.	Pudu	101	2,64
4.	Padang	156	4,08
5.	Kartamulia	148	3,84
6.	Sukaraja	107	2,80
7.	Pangkalan Muntai	112	2,93
8.	Petarikan	123	3,21
	Sukamara	1.028	26,86

Sumber : Setda Kabupaten Sukamara (BPS, 2009 : 7)

Secara geografis, Kecamatan Sukamara terletak di antara $2,17^{\circ}$ dan $2,46^{\circ}$ Lintang Selatan, dan $111,6^{\circ}$ sampai $111,25^{\circ}$ Bujur Timur.

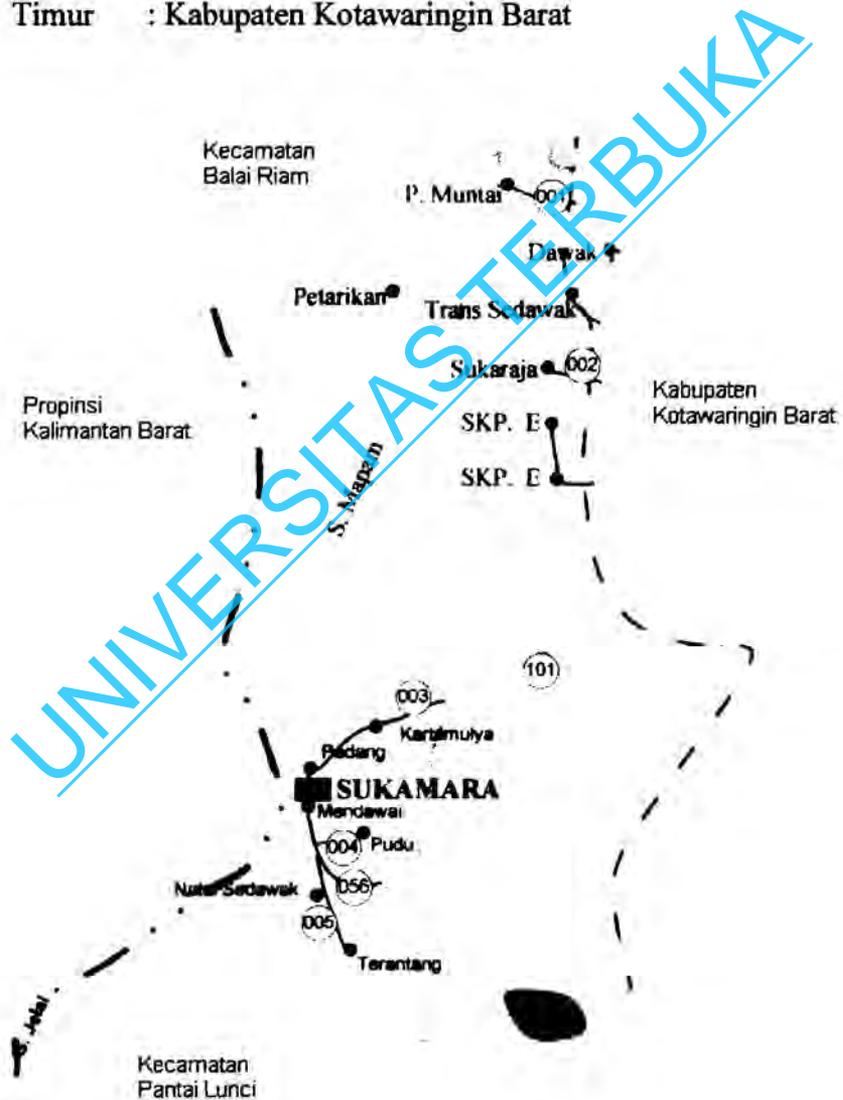
Batas-batas wilayah Kecamatan Sukamara adalah sebagai berikut:

Utara : Kecamatan Balai Riam dan Kecamatan Permata Kecubung

Selatan : Kecamatan Pantai Lunci

Barat : Kecamatan Manis Mata Provinsi Kalimantan Barat

Timur : Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 4.1. Peta Lokasi Kecamatan Sukamara

Secara administratif, wilayah Kecamatan Sukamara yang secara langsung berfungsi sebagai Ibu Kota Kabupaten adalah mencakup wilayah Kelurahan Padang, Kelurahan Mendawai, Desa Pudu dan Desa Natai Sedawak. Kelurahan Padang dan Kelurahan Mendawai adalah dua wilayah yang sejak Sukamara berstatus kecamatan sudah menjadi satu kawasan. Sejak awal kedua kelurahan ini sudah menjadi jantung kota Sukamara. Diantara keduanya sudah tidak jelas lagi batasnya terutama dalam hal kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial sehari-hari, keduanya sudah ramai dihuni yang ditandai dengan pemukiman padat. Karena penduduk mendiami wilayah ini secara linier di pinggir sungai jelai maka sebagian besar mata pencaharian mereka adalah mencari ikan dan berdagang, dan ada puladiantara mereka yang bertani, terutama mereka yang bermukim di daerah daratan yang jauh dari sungai. Pekerjaan sebagai nelayan umumnya dilakukan oleh penduduk asli, sedangkan bertani dan berdagang umumnya dilakukan oleh kaum pendatang dari Jawa dan Cina. Sedikit sekali dari mereka yang menjadi pegawai pemerintah (PNS).

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dan sekaligus sebagai Ibu Kota dari Kabupaten Sukamara, Kecamatan Sukamara dituntut untuk terus menerus mengembangkan dirinya sesuai dengan dinamika pembangunan yang sedang berjalan. Perkembangan pembangunan Kabupaten Sukamara yang sangat pesat, di samping menimbulkan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, juga menimbulkan dampak negatif, seperti masalah ekonomi, narkoba, kriminalitas, kemiskinan dan

sebagainya. Permasalahan ini terus menjadi perhatian dan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Sukamara untuk terus memperbaiki diri seiring perkembangan zaman yang semakin modern dan maju.

b. Bentang Alam dan Iklim

Sukamara termasuk daerah yang berada di dataran rendah, dengan ketinggian tanah berkisar antara 5 sampai 30 m dpl. Bentang alamnya sebagian berada di sekitar pinggiran laut dan sebagian di daerah aliran sungai. Secara umum, daerah Sukamara beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya jatuh antara bulan Juni sampai dengan bulan September, sementara musim hujan jatuh antara bulan Oktober sampai bulan Mei. Curah hujan tertinggi biasanya jatuh pada bulan November.

c. Demografi (Penduduk)

Dari segi jumlah populasi penduduknya, Kecamatan Sukamara merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di banding kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Sukamara. Jumlah penduduk Kabupaten Sukamara tahun 2008 sebanyak 42.508 jiwa dan tahun 2010 sebanyak 44.952 jiwa. Dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk maka diperoleh kepadatan penduduk Kabupaten Sukamara yang tergolong jarang yakni sekitar 11 jiwa per km². Lebih lengkapnya jumlah penduduk Kabupaten Sukamara seperti tertera pada Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2004 – 2010

No.	Kecamatan	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jelai	4.728	4.860	5.490	4.627	4.412
2.	Pantai Lunci	5.038	4.759	5.164	5.306	4.846
3.	Sukamara	15.399	18.830	19.278	20.999	19.623
4.	Balai Riam	5.099	5.879	6.059	6.363	6.649
5.	Permata Kecubung	5.916	5.248	6.517	5.958	9.422
Kabupaten Sukamara		36.180	39.576	42.508	43.253	44.952

Sumber : BPS Kabupaten Sukamara (2011 : 56)

Di Kabupaten Sukamara, penduduk angkatan kerja yang sudah memiliki pekerjaan adalah sebesar 94,68%. Mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian, yaitu sebanyak 9.940 jiwa. Penduduk lainnya bekerja pada sektor jasa 3.476 jiwa, industri pengolahan 2.864 jiwa, perdagangan 1.483 jiwa, dan lain-lain. Selain itu, angka beban tanggungan di Kabupaten Sukamara sebesar 50,69 (BPS Kabupaten Sukamara, 2011 : 48). Untuk sektor pertanian, umumnya penduduk bekerja pada perkebunan sawit yang banyak tersebar di Kabupaten Sukamara atau pada perkebunan rakyat yang didominasi oleh perkebunan sawit dan karet. Secara lebih rinci, jenis lapangan pekerjaan utama penduduk Kabupaten Sukamara menurut kecamatan seperti pada Tabel. 4.4 berikut :

Tabel 4.4. Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Kecamatan Tahun 2010

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	Kecamatan					Jumlah
		Jelai	Pantai Lunci	Sukamara	Balai Riam	Permata Kecubung	
1.	Pertanian	1.060	902	2.520	1403	4.055	9.940
2.	Pertambangan dan Penggalian	11	6	29	14	81	141
3.	Listrik dan Air Minum	33	62	507	233	42	877
4.	Bangunan dan Konstruksi	2	4	37	11	3	57
5.	Perdagangan	92	58	1.099	133	101	1.483
6.	Industri Pengolahan	336	139	1.565	435	387	2.862
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	68	87	556	125	27	862
8.	Bank dan Lembaga Keuangan	0	0	94	39	0	133
9.	Jasa-Jasa	307	206	2.314	385	264	3.476
	Jumlah	1.909	1.464	8.721	2.777	4.964	19.831

Sumber : BPS Kabupaten Sukamara (2011 : 59)

d. Potensi Pertanian dan Peternakan

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sukamara sebelah barat dan utara merupakan daerah daratan dengan ketinggian 7 – 100 meter dari atas permukaan laut, sedangkan wilayah selatan yang berbatasan dengan Laut Jawa merupakan dataran rendah yang cukup potensial untuk sektor perikanan dan pertanian terutama padi sawah.

Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi sangat besar dalam menunjang sumber pendapatan asli daerah maupun sebagai penyerap tenaga kerja. Tak heran jika sebagian besar penduduk angkatan kerja Kecamatan Sukamara mengandalkan pertanian sebagai sumber penghasilan utamanya. Sektor pertanian mencakup pertanian tanaman bahan makanan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.

Potensi pertanian tersebut didukung oleh luas wilayah Kecamatan Sukamara. Luas wilayah Kecamatan Sukamara adalah total 1.028 km², dengan perincian luas per masing-masing desa/kelurahan sebagai berikut:

Tabel 4.5. Luas Wilayah Kecamatan Sukamara menurut Desa/Kelurahan

No.	Wilayah	Status	Luas (Km ²)	% terhadap luas Kabupaten
1	Mendawai	K	147	3,84
2	Natai Sedawak	D	134	3,50
3	Pudu	D	101	2,64
4	Padang	K	156	4,08
5	Karta Mulia	D	148	3,87
6	Sukaraja	D	107	2,80
7	Pangkalan Muntai	D	112	2,93
8	Petarikan	D	123	3,21

Sumber: BPS Kabupaten Sukamara

3. Profil Desa Natai Seawak

Desa Natai Sedawak adalah merupakan daerah yang pada awalnya dominan dihuni oleh masyarakat pedalaman Kalimantan Tengah dengan mata pencaharian umumnya berladang dan mencari/menebang kayu (perambah hutan). Desa Natai Sedawak berjarak ± 5,36 km dari Ibu Kota Kecamatan (BPS Kab. Sukamara, 2009 : 11). Pada awalnya antara Desa Natai Sedawak ke Ibu Kota Kecamatan dibatasi oleh daerah hutan dan kebun/ladang-ladang penduduk dengan sedikit pemukiman. Namun ketika Sukamara dimekarkan menjadi kabupaten baru daerah ini berkembang sedemikian pesat karena hampir semua kantor pemerintahan daerah dibangun di wilayah ini. Bahkan kantor Bupati Sukamara sebagai pusat pemerintahan daerah juga dibangun di Desa Natai Sedawak. Pembangunan ini diikuti dengan pembangunan infrastruktur lainnya, seperti jalan, selokan, sekolah, rumah sakit, taman hiburan, kantor kejaksaan, kantor Kementerian Agama, dll. Dengan berbagai

pembangunan tersebut, dalam kurun waktu \pm 10 tahun, Desa Natai Sedawak menjelma menjadi kota baru yang akan terus dibangun mengikuti perkembangan Sukamara sebagai kabupaten.

Secara administratif, Desa Natai Sedawak mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Desa Pudu dan Kelurahan Mendawai
- Selatan : Kecamatan Pantai Lunci
- Barat : Kecamatan Manis Mata Provinsi Kalimantan Barat
- Timur : Kecamatan Pantai Lunci

Desa Natai Sedawak memiliki luas wilayah sebesar 134 km² atau sebesar 3,50% dari luas kabupaten (BPS Kab. Sukamara, 2013 : 7). Sebagaimana umumnya wilayah Kecamatan Sukamara, bentang alam Desa Natai Sedawak berupa dataran rendah (landai) yang terdiri dari hutan sedang, rawa-rawa dan daerah pinggiran sungai dengan potensi pertanian tanaman perkebunan (sawit, karet), tanaman pangan, peternakan dan perikanan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.6. berikut :

Tabel 4.6. Lokasi dan Kemiringan Lahan dan Ketinggian DPL Desa/Kel di Kec. Sukamara

No	Desa/Kel	Lokasi				Kemiringan Lahan		
		Puncak	Lereng	Lembah	Hampanan	Landai	Sedang	Curam
1.	Mendawai				v	v		
2.	Natai Sedawak				v	v		
3.	Pudu				v	v		
4.	Padang				v	v		
5.	K Mulia				v	v		
6.	Sukaraja				v	v		
7.	P. Muntai		v				v	
8.	Petarikan		v				v	

Sumber : BPS Kab. Sukamara (2011 : 13)

Penduduk Desa Natai Sedawak sejak tahun 2005 hingga tahun 2010 adalah seperti tertera pada Tabel 4.7. berikut :

Tabel 4.7. Penduduk Kecamatan Sukamara Menurut desa/kelurahan dan rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun.

No	Desa/Kel	Jumlah Penduduk					Rata-Rata pertumbuhan
		2006	2007	2008	2009	2010	
1.	Mendawai	5628	6671	6991	8350	8369	8,26
2.	N Sedawak	743	1071	1053	957	1235	11,02
3.	Pudu	243	319	324	462	476	14,39
4.	Padang	4650	3751	4228	4198	4121	-2,39
5.	K Mulia	2164	4548	3135	4528	2396	2,06
6.	Sukaraja	486	505	484	484	472	-0,58
7.	P. Muntai	1153	1350	1903	1519	1774	9,00
8.	Petarikan	332	613	1160	501	762	18,08

Sumber : BPS Kab. Sukamara (2010 : 28)

Berdasarkan catatan di kantor Desa Natai Sedawak, jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 sebanyak 100 orang atau sebesar 8,10%, sedangkan pada tahun 2011 dan 2012 jumlahnya menurun menjadi masing-masing 85 orang dan 60 orang. Menurut Kepala Desa Natai Sedawak, data tersebut diambil berdasarkan data penduduk yang memperoleh jatah raskin dan BLT/BLSM (selengkapnya data ditampilkan pada lampiran).

Berdasarkan laporan BPS Kabupaten Sukamara pada tahun 2012, penghasilan utama sebagian besar penduduk Desa Natai Sedawak adalah di sektor pertanian, yaitu pada sub sektor perkebunan dan perikanan tangkap (BPS Kab. Sukamara, 2013 : 16-27).

Dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan di Desa Natai Sedawak, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara telah melaksanakan berbagai program, mulai dari program yang bersifat pemberdayaan sampai pada program yang bersifat konsumtif dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, bantuan program yang

telah diberikan berupa bantuan raskin, BLT/BLSM, bantuan bibit pertanian (sawit, karet, benih padi, dll), bibit ternak (sapi, bebek), benih ikan, bantuan dana pembukaan dan pengolahan lahan dan lain-lain. Sedangkan program pemberdayaan melalui bantuan modal KUBE untuk pertama kalinya diterima pada tahun 2012 dengan sasaran sebanyak 8 kelompok dengan masing-masing kelompok berjumlah 10 orang atau jumlah sasaran sebanyak 80 orang.

4. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Sukamara

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukamara pada Agustus 2009 sebanyak 3.932 jiwa atau sebesar 9,25 % dari jumlah penduduk (BPS, 2009 : 30), sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 3.000 jiwa atau sebesar 6,61%, dan pada tahun 2011 sebanyak 2.897 jiwa atau sebesar 5,9% dari jumlah penduduk. Data ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan penduduk miskin sebesar 1.035 jiwa atau sebesar 3,35% dalam kurun waktu 2 tahun. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukamara tahun 2009 pada tiap kecamatan seperti tertera pada tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.8. Banyaknya rumah tangga miskin dan penduduk miskin serta persentasenya per kecamatan.

Kecamatan	Jumlah RT	Jumlah Penduduk	RT Miskin		Penduduk Miskin	
			Jml	Persentase	Jml	Persentase
Jelai	1.360	5.490	162	11,91	671	12,22
Pantai Lunci	1.284	5.164	154	11,99	824	15,95
Sukamara	5.710	19.278	393	6,88	1.336	6,93
Balai Riam	1.697	6.059	79	4,66	334	5,52
P. Kecubung	1.846	6.517	154	8,34	767	11,77
Jumlah	11.897	42.508	942	7,92	3932	9,25

Sumber : BPS Kabupaten Sukamara (2009 : 38)

Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh besarnya Garis

Kemiskinan (GK), karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki

rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Pada tahun 2008, Garis Kemiskinan naik sebesar 11,30 persen, yaitu dari Rp 207.268,- per kapita per bulan pada tahun 2007 menjadi Rp 230.697,- per kapita per bulan pada 2008. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Tabel 4.9. Nilai Garis Kemiskinan Kabupaten Sukamara Tahun 2006-2008

Tahun	GKM	GKNM	GK
2006	Rp. 148.025,-	Rp. 47.780,-	Rp. 195.805,-
2007	Rp. 155.258,-	Rp. 52.010,-	Rp. 207.268,-
2008	Rp. 169.095,-	Rp. 61.602,-	Rp. 230.697,-

Sumber : BPS Kabupaten Sukamara (2009 : 29)

Pada Tabel 4.9 terlihat sebaran penduduk miskin di seluruh wilayah Kabupaten Sukamara yang terbanyak berada di Kecamatan Sukamara, yaitu sebanyak 1.336 jiwa, kemudian diikuti secara berturut-turut Kecamatan Pantai Lunci sebesar 824 jiwa, Permata Kecubung 767 jiwa, Jelai 671, dan Balai Riam 334 jiwa. Namun jika dinilai dari besarnya jumlah penduduk, persentase penduduk miskin terbesar berada pada Kecamatan Pantai Lunci, yaitu sebesar 15,95%. Sementara di Kecamatan Sukamara sebagai Ibu Kota Kabupaten sebesar 6,93%, dan terkecil berada di Kecamatan Balai Riam, yaitu sebesar 5,52%.

Secara umum faktor-faktor penyebab utama kemiskinan (BPS Kabupaten Sukamara, 2009 : 21) adalah sebagai berikut :

1. Karena geografis, termasuk kondisi alam yang kurang mendukung.
2. Sumber daya alam, antara lain lahan yang kurang subur dan eksploitasi SDA yang berlebihan.
3. Sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitas masih rendah.
4. Teknologi dan sarana pendukungnya masih terbatas/belum banyak dikenal atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
5. Sarana dan prasarana dengan jangkauan/pelayanan yang terbatas

Sedangkan Faktor-faktor penyebab utama kemiskinan secara khusus adalah sebagai berikut :

1. Sikap dan kebiasaan hidup keluarga yang tidak produktif, rendahnya taraf pendidikan, dan kesehatan.
2. Terbatasnya lapangan kerja dan ketidakberdayaan masyarakat terlibat dalam ekonomi pasar.
3. Terbatasnya kapasitas wilayah. Hal ini terjadi karena minimnya infrastruktur wilayah yang selanjutnya berdampak pada keterisolasian. Disamping itu SDA yang selama ini menjadi andalan perekonomian rakyat (rotan, kebun karet, perikanan, dll) semakin terbatas dan semakin sulit diakses karena benturan kepentingan (lahan perusahaan sawit, isu lingkungan, dll)
4. Terbatasnya dukungan sistem dan kelembagaan sosial ekonomi dan politik.
5. Perubahan siklus ekonomi (adanya krisis moneter).
6. Perubahan musim dan bencana alam.
7. Dampak suatu kebijakan pemerintah (misalnya penarikan subsidi).

Di Kabupaten Sukamara, wilayah yang dihuni oleh penduduk miskin umumnya karena infrastrukturnya yang masih rendah. Akses jalan yang masih kurang baik membuat mereka terbatas dalam melakukan kegiatan ekonomi, seperti sulitnya memasarkan hasil pertanian. Disamping itu desa-desa yang berpenduduk miskin umumnya terlihat di daerah pesisir pantai, dimana sebagian besar lahan mereka tidak subur, sehingga selain menggantungkan hidup pada hasil laut mereka juga berkerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedikit sekali mereka yang melakukan kegiatan bertani.

Sementara itu penduduk miskin yang berada di daerah perkotaan umumnya karena faktor pendidikan dan kebiasaan masa lalu mereka yang terlalu bergantung pada hasil alam. Pada era tahun 1990 – 2000, penduduk Kabupaten Sukamara secara umum tergolong makmur. Saat itu hasil alam, yaitu kayu memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penghasilan penduduk, sehingga bekerja pada sektor kayu menjadi primadona. Namun ketika keluar kebijakan pemerintah yang melarang pekerjaan illegal logging, banyak orang kehilangan mata pencaharian. Dampaknya adalah, menurunnya pendapatan penduduk yang berujung pada bertambahnya jumlah penduduk miskin.

B. Program Bantuan Modal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Sukamara

Program pemberian bantuan modal KUBE adalah merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukamara. Pemberian bantuan modal KUBE merupakan program Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada

Pemerintah Provinsi melalui tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Oleh Pemerintah Provinsi program ini dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk dilaksanakan.

Pemberian bantuan KUBE di Kabupaten Sukamara sudah mulai dilakukan sejak tahun 2005. Ketika itu kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara. Bantuan yang diberikan masih berupa bantuan yang bersifat konsumtif dan berupa barang, misalnya bantuan bibit ternak sapi, itik, bantuan mahan makanan dan lain-lain. Tidak banyak informasi yang dapat digali mengenai bantuan KUBE pada masa-masa ini.

Sejak tahun 2010, program bantuan modal KUBE mulai dikelola oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukamara, yaitu setelah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara.

Berdasarkan SOP/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kalimantan Tengah Tahun 2012, pelaksanaan program pemberian bantuan modal KUBE dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kriteria dan Sasaran Penerima Bantuan

a. Kriteria Sasaran

Sasaran program penanggulangan kemiskinan perdesaan adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan sangat miskin/fakir miskin, sesuai UU Nomor 13 Tahun 2011. Adapun kriteria penerima bantuan sebagai berikut :

- 1) Kepala Keluarga (KK) pencari nafkah utama (laki-laki/perempuan) berusia 18 s/d. 55 tahun dan sudah pernah menikah.

- 2) Penghasilan yang diperoleh tiap bulan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari (penghasilan rendah/ berada dibawah garis sangat miskin yang diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan berdasarkan standar BPS masing-masing kabupaten/kota lokasi bantuan).
- 3) Ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial).
- 4) Keterbatasan kepemilikan pakaian, hanya mampu memiliki 1 stel pakaian per orang per tahun.
- 5) Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarganya yang sakit.
- 6) Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.
- 7) Tidak memiliki harta (asset) yang dapat dimanfaatkan hasilnya atau dijual untuk membiayai kebutuhan hidupnya.
- 8) Bertempat tinggal tidak layak huni.
- 9) Sulit memperoleh air bersih.

b. Sasaran

Kategori sasaran KUBE didasarkan pada penilaian terhadap sejumlah indikator yang mencakup bidang kelembagaan, sosial dan ekonomi :

- 1). Jumlah anggota KUBE 10 orang Kepala Keluarga.
- 2). Mempunyai struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas, yaitu :
 - a). Melaksanakan pertemuan minimal sebulan sekali.
 - b). Topic pertemuan bersifat variatif sesuai dengan permasalahan yang dihadapi kelompok.

- c). Kehadiran anggota.
 - d). Partisipasi anggota dalam memberikan masukan bagi pemecahan masalah atau kemajuan KUBE.
- 3). Mempunyai administrasi kegiatan, seperti buku daftar anggota kelompok, buku tamu, buku kegiatan, buku kas/keuangan, buku inventaris, buku simpan pinjam dan lainnya.
 - 4). Jenis usaha satu macam.
 - 5). Memiliki Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS), besarnya disepakati oleh anggota.
 - 6). Kualitas dan kuantitas pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
 - 7). Optimalisasi/kreatifitas pendayagunaan potensi dan sumber-sumber ekonomi.

2. Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Fakir Miskin

a. Pengertian

Tim Koordinasi Fakir Miskin intern pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

b. Tujuan

Membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan penentuan sasaran dan lokasi penerima bantuan serta pendamping KUBE.

c. Sasaran

Tim ini berasal dari intern Dinas Sosial Provinsi sebanyak 10 orang meliputi :

- a). Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
- b). Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kalimantan tengah.
- c). Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

- d). Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin.
- e). Kepala Sub Bagian Perencanaan.
- f). Pelaksana pada Seksi Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin dan Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Program.

3. Seleksi pendamping sosial

a. Pengertian

Memilih calon pendamping KUBE Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaaan Kalimantan Tengah Tahun 2012.

b. Tujuan

Menentukan pendamping KUBE yang diajukan oleh Dinas Sosial Kabupaten yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

c. Sasaran

- a. Calon peserta berasal dari unsur Karang Taruna, PSM, TKSK, dan Tokoh Masyarakat lokasi bantuan.
- b. Pendidikan minimal SLTA.

d. Pelaksana

- a. Tim Penilai 5 orang dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Panitia 4 orang dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Peserta sebanyak 52 orang dari 26 desa lokasi bantuan masing-masing desa 2 orang.
- d. Kegiatan ini dilaksanakan di Ibukota Provinsi (Palangka Raya).

e. Hasil yang diharapkan

Terpilihnya pendamping yang berkualitas, dengan harapan pendampingan berjalan maksimal dan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan.

4. Sosialisasi Program Penanganan Fakir Miskin

a. Pengertian

Pertemuan bagi Kepala Dinas Sosial/Kepala Bidang Kabupaten, Camat, Kepala Desa dan Instansi terkait (BRI dan BAPPEDA) pada lokasi bantuan, Petugas Perencanaan dan Petugas Verifikasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Tujuan

Memberikan pemahaman pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan, mencakup materi tentang kebijakan, program, kegiatan pendukung dan lain-lain sesuai kebutuhan daerah.

c. Sasaran

- a) Kepala Dinas atau Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial lokasi bantuan.
- b) BRI unit lokasi bantuan.
- c) BAPPEDA Kabupaten/Perencana Keuangan Daerah.
- d) Camat lokasi bantuan.
- e) Kepala Desa lokasi bantuan.
- f) Petugas Perencana dan Verifikasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

d. Pelaksana

- a) Narasumber 5 orang terdiri dari 4 orang Dinas Sosial Provinsi dan 1 orang narasumberpusat dari Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kementrian Sosial RI.
- b) Panitia, 5 orang dari Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Tengah.
- c) Peserta sebanyak 45 orang dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Kepala Dinas Sosial/Kepala Bidang Sosial Kabupaten lokasi bantuan sebanyak 4 orang.
 - 2) BAPPEDA Kabupaten lokasi bantuan sebanyak 4 orang.
 - 3) BRI lokasi bantuan sebanyak 4 orang.
 - 4) Camat lokasi bantuan sebanyak 4 orang
 - 5) Kepala Desa lokasi bantuan sebanyak 26 orang.
 - 6) Petugas Perencana dan Verifikasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 3 orang.
- d) Kegiatan ini dilaksanakan di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah (Palangka Raya).

e. Hasil yang diharapkan

Tercipta kesamaan persepsi, pola pikir dan pola tindak bagi peserta sosialisasi sebagai bekal pelaksanaan kegiatan di lapangan.

5. Bimbingan Teknis Pendamping Sosial**a. Pengertian**

Pertemuan untuk menyampaikan informasi kepada para pendamping KUBE Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 secara teoritis dan teknis

b. Tujuan

- a) Memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan tentang Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kepada Para Pendamping KUBE Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kalimantan Tengah 2012.
- b) Memberikan informasi teknis pemberian bantuan kepada Keluarga Binaan Sosial (KBS) melalui rekening KUBE (Cash Transfer).
- c) Menyatukan persepsi tentang teknis pelaksanaan pendampingan.
- d) Agar para pendamping KUBE dapat memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang telah ditetapkan dengan baik, tertib, dan maksimal.

c. Sasaran

Para Pembina dan Pendamping KUBE Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kalimantan Tengah Tahun 2012.

d. Pelaksana

- a) Pengerah sebanyak 1 orang (Kepala Dinas Sosial Prov. Kal-Teng)
- b) Nara sumber 5 orang (1 orang narasumber Pusat dan 4 orang nara sumber Daerah).
- c) Panitia 5 orang (pelaksanaan dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah).
- d) Peserta sebanyak 34 orang dengan perincian sebagai berikut :
 - Pembina / Pendamping KUBE Kabupaten, 4 orang
 - Pendamping Kecamatan, 4 orang
 - Pendamping Desa, 26 orang

e). Kegiatan dilaksanakan di Palangka Raya.

e. Hasil yang diharapkan

a) Terciptanya pemahaman Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Tahun 2012 bagi para Pembina dan Pendamping KUBE.

b) Terciptanya peningkatan pengetahuan, wawasan serta keterampilan para Pendamping Sosial Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kalimantan Tengah Tahun 2012.

6. Verifikasi KUBE Tahun 2012

a. Pengertian

Kegiatan pencocokan data Fkir Miskin calon penerima bantuan KUBE tahun 2012 dari hasil pemetaan tahun 2011 dengan kondisi lapangan saat ini (menverifikasi kembali calon penerima bantuan KUBE Fakir Miskin tahun 2012 dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang akan dikembangkan). **Hasil Verifikasi dilampiri fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan Kartu Raskin/ Keterangan Miskin.**

b. Tujuan

Untuk memperoleh data akhir (finalisasi data) penerima bantuan KUBE Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kalimantan Tengah Tahun 2012.

c. Saran

Penerima bantuan KUBE Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kalimantan Tengah Tahun 2012.

d. Pelaksana

Pendamping Desa, Pendamping Kecamatan, Petugas dari Dinas Sosial Kabupaten dan Petugas dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

e. Hasil yang diharapkan

Tersedianya data penerima bantuan KUBE Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kalimantan Tengah Tahun 2012 yang valid serta Usaha Ekonomi Produktif yang akan dikembangkan, dengan menyertakan surat pernyataan Kepala Dinas Sosial Kabupaten atas validasi data yang diverifikasi.

7. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Penerima Bantuan**a. Pengertian**

Pertemuan untuk memotivasi calon penerima bantuan KUBE Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012. Kegiatan ini dilaksanakan 4 (empat) Kabupaten lokasi bantuan tahun 2012, yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Sukamara.

b. Tujuan

Meningkatkan motivasi, pengetahuan dan keterampilan anggota KUBE dalam mengelola KUBE.

c. Sasaran

Pengurus KUBE yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara masing-masing KUBE Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kalimantan Tengah Tahun 2012.

d. Pelaksana

- a. Narasumber 3 orang terdiri dari 2 orang dari Dinas Sosial Kabupaten/Instansi Terkait dan 1 orang dari Dinas Sosial Provinsi.
- b. Panitia/Petugas masing-masing lokasi/angkatan sebanyak 4 orang yaitu 2 orang dari Dinas Sosial Kabupaten dan 2 orang dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Kegiatan dilaksanakan di lokasi bantuan (sebelum menerima bantuan)

e. Hasil yang diharapkan

Terbekalnya tambahan pengetahuan dan keterampilan bagi pengurus dan anggota KUBE serta terciptanya persamaan persepsi, pola pikir dan pola tindak sebagai bekal mengelola bantuan KUBE.

8. Oprasional Pendamping Sosial**a. Pengertian**

Yaitu pembiayaan untuk memperlancar pendampingan KUBE dilapangan. Honor/Tali Asih Pendamping KUBE diberikan melalui system cash transper selama 9 bulan atau selama melaksanakan pendampingan sosial.

b. Tujuan

Memberikan bantuan oprasional kepada pendamping KUBE dalam menjalankan tugas pendampingan yang diberikan selama 9 bulan atau selama melaksanakan pendampingan sosial.

c. Sasaran

- a. Pendamping Provinsi (PNS dilingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah).
- b. Pendamping Kabupaten (PNS dilingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial/ Bidang Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Barito Timur).
- c. Pendamping Kecamatan (bukan PNS diutamakan TKSK)
- d. Pendamping Desa (bukan PNS diutamakan Karang Taruna, PSM, Tokoh Masyarakat yang telah terpilih dalam seleksi pendamping KUBE yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah).

d. Hasil yang diharapkan

Pendamping KUBE dapat melaksanakan tugasnya dengan tertib, lancar, maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

e. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan ini dari Dana Dekonsentrasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012.

9. Fungsi dan Tugas Pendamping Sosial

- a). **Fungsi Administrasi**, yaitu pendamping sosial melakukan pekerjaan yang terkait dengan pengelolaan administrasi selama proses pendampingan.

Tugas-tugas yang dilaksanakan antara lain adalah :

- 1) **Tugas Perencanaan**, yaitu melaksanakan tugas penyusunan rencana kegiatan pendampingan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tertentu dalam rangka pengembangan KUBE Masyarakat Miskin.

- 2) **Tugas Pencatatan dan Pendataan**, yaitu melaksanakan tugas pencatatan dan pendataan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan berikut kondisi obyektif yang dialaminya. Pencatatan juga dilakukan terhadap berbagai aktivitas kegiatan pendampingan serta perkembangan KUBE secara berkala dalam bentuk catatan harian.
 - 3) **Tugas Monitoring dan Evaluasi**, yaitu melaksanakan tugas pemantauan terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh KUBE serta melakukan penilaian terhadap kebaikan dan kelemahan guna peningkatan hasil yang akan dicapai pada waktu kegiatan berikutnya.
 - 4) **Tugas Pelaporan dan Dokumentasi**, yaitu melaksanakan tugas penyusunan laporan terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan pendampingan, sekaligus menyampaikan laporan tersebut pada pihak-pihak yang terkait dan mengarsipkannya sebagai dokumentasi kegiatan.
- b). **Fungsi Operasional**, yaitu pendamping melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok pendamping, baik dalam dukungan, konsultasi, saran maupun memfasilitasi KUBE.

Tugas-tugas yang dilaksanakan antara lain adalah :

- 1) **Penyuluhan sosial**, yaitu melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyampaian informasi sebagai upaya bimbingan dan motivasi kepada KUBE dan lingkungannya, sehingga tumbuh kesadaran dan keinginan KUBE berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan usaha kesejahteraan sosial. Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara lisan

(dialog tatap muka), tulisan (media cetak atau gambar), atau berupa peragaan atau praktek langsung.

- 2) **Peningkatan kapasitas**, yaitu melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemberian kemampuan berorganisasi melalui KUBE sebagai salah satu bentuk penguatan hasil yang dicapai melalui kegiatan penyuluhan sosial berdasarkan kondisi obyektif yang dihadapi KUBE.
 - 3) **Fasilitasi**, yaitu melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan peningkatan akses pemanfaatan fasilitas umum dan pelayanan sosial dasar yang sesuai dengan kebutuhan KUBE, baik fasilitasi/pelayanan yang berada di dalam maupun diluar lingkungan masyarakat dampingan.
 - 4) **Kedaruratan**, yaitu melaksanakan tugas-tugas dalam situasi mendesak atau darurat yang berkaitan dengan pemberian dukungan materi maupun non materi atau pencapaian sumber dan potensi kelembagaan yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh KUBE.
 - 5) **Advokasi**, yaitu melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan untuk memperjuangkan kepentingan KUBE, termasuk hak-hak keluarga masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- c) **Fungsi Koordinasi dan Kerjasama**, yaitu pendamping melakukan berbagai upaya untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak (networking) kelembagaan yang berada diluar lingkungan masyarakat.

Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah :

- 1) **Tugas kemitraan**, yaitu melaksanakan tugas kerja sama dengan pihak-pihak tertentu, khususnya lembaga dari luar negeri, dalam memanfaatkan atau mengembangkan potensi dan sumber KUBE.
- 2) **Tugas Aksesibilitas**, yaitu melaksanakan tugas menciptakan iklim yang kondusif, membuka informasi atau peluang kepada KUBE untuk menjangkau fasilitas umum dan pelayanan sosial dasar yang berada diluar lingkungan mereka serta menjelaskan bagaimana tata cara atau prosedurnya.
- 3) **Tugas Rujukan**, yaitu melaksanakan tugas untuk mengkaitkan KUBE dengan system sumber yang lebih luas di luar lingkungan tempat tinggalnya serta memberikan alternative atau pertimbangan terhadap positif-negatifnya system sumber yang akan dimanfaatkan tersebut.

10. Peranan Pendamping Sosial

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kegiatan Pendampingan Sosial, para pendamping social dapat menjalankan berbagai peranan berikut ini :

- 1) **Perencana**. Perencanaan memerlukan visi berorientasi kedepan sebagai kekuatan pendorong dalam mengembangkan potensi dan peningkatan kemampuan. Pendamping sosial sebagai perencana bertugas membantu KUBE menetapkan tujuan dan merumuskan perencanaan yang efektif, dengan terlebih dahulu memperoleh gambaran awal tentang struktur sosial ekonomi aktual masyarakat yang dapat mempengaruhi upaya pemberdayaan yang akan dilaksanakan.

- 2) **Pembimbing.** Sebagai pembimbing, pendamping sosial dituntut kemampuan dan keterampilannya untuk mengajak, mengarahkan dan membina KUBE, sehingga mengerti, memahami dan melaksanakan hasil bimbingan secara aktif dan kreatif.
- 3) **Pemberi informasi.** Pendamping sosial memberikan penjelasan tentang gambaran umum program pengentasan kemiskinan, manfaat melakukan aktivitas dengan pendekatan KUBE, cara mengembangkan kegiatan sosial, ekonomi, dan kelembagaan KUBE, cara memanfaatkan lembaga keuangan mikro, kerja sama dengan pendamping sosial, menjalin kemitraan, dan sebagainya.
- 4) **Motivator.** Pendamping sosial memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada KUBE, sehingga mereka dapat mengenali masalah dan kekuatan yang dimilikinya. Bertitik dari kesadaran tersebut, pendamping sosial dapat memunculkan partisipasi KUBE, sehingga diharapkan dapat merubah sikap pola pikir dan pengembangan potensinya melalui upaya pemberdayaan yang dilaksanakan.
- 5) **Penghubung.** Sebagai penghubung, pendamping sosial diharapkan menghubungkan KUBE dengan sumber-sumber yang dibutuhkan. Pendamping sosial bertugas mengumpulkan, menemukenali, memanfaatkan dan melestarikan sumber-sumber tersebut.
- 6) **Fasilitator.** Pendamping sosial memberikan berbagai kemudahan, baik berupa barang, peralatan maupun ketentuan, sehingga membantu KUBE meningkatkan kemampuan melaksanakan berbagai aktifitas sosial, ekonomi dan kelembagaan, serta mengatasi berbagai kendala dan masalah.
- 7) **Mobilisator dan Aktor.** Sebagai mobilisator dan aktor, pendamping sosial menghimpun, mendayagunakan, mengembangkan dan mempertanggung

jawabkan seluruh sumber dan mengalokasikannya untuk mencapai kualitas pemberdayaan yang optimal.

- 8) **Advokad.** Pendamping sosial sebagai advokat bertugas membantu KUBE memperjuangkan kepentingan, hak dan tanggung jawab sosialnya kepada pihak lain.
- 9) **Evaluator.** Pendamping sosial dapat memberikan penilaian, saran dan masukan kepada KUBE tentang pilihan mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Disamping itu pendamping sosial juga dapat memberikan penilaian terhadap keseluruhan program guna meningkatkan kualitas program pendamping sosial.

11. Bantuan Stimulan UEP KUBE di Perdesaan

a. Pengertian

Yaitu pemberian bantuan KUBE Fakir Miskin di wilayah Perdesaan sesuai dengan Hasil Pemetaan Tahun 2011 dan Hasil Verifikasi Tahun 2012 sebanyak 1.200 KK / 120 KUBE.

b. Tujuan

Untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan berusaha sebagai keluarga fakir miskin melalui KUBE agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Sedangkan tujuan pembentukan KUBE adalah menciptakan media pemberdayaan dalam rangka mengatasi kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan keberpungisian sosial keluarga fakir miskin.

c. Sasaran

Penerima bantuan stimulant UEP KUBE Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kalimantan Tengah Tahun 2012 sebanyak 1.200 KK / 120 KUBE

d. Lokasi

Lokasi kegiatan adalah desa yang sudah di tentukan/dipilih menjadi lokasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Tahun 2012, sesuai hasil pemetaan Tahun 2011, dengan persebaran sebagai berikut :

Tabel 4.10. Lokasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	JUMLAH KK	KET
1	Kotawaringin Timur	1. Mentaya Hulu	10 Desa	300	30 KUBE
2	Barito Selatan	2. Karau Kuala	6 Desa	300	30 KUBE
3	Sukamara	3. Sukamara	4 Desa	240	24 KUBE
		4. Jelai	4 Desa	160	16 KUBE
4	Barito Timur	5. Karusen Janang	5 Desa	200	20 KUBE
	JUMLAH SELURUHNYA			1.200	120 KUBE

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kalteng (2012)

12. Hal-hal yang perlu di perhatikan

- a. Bantuan di berikan kepada KBS melalui rekening KUBE (Cash Transfer), oleh karena itu sebelum menerima bantuan setiap KUBE harus membuka nomor Rekening di BRI terdekat atas nama KUBE.
- b. Setiap KUBE terdiri dari 10 orang Keluarga Binaan Sosial (KBS)
- c. Kepengurusan KUBE terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara dan 7 orang anggota, di pilih secara musyawarah oleh KBS dengan di bimbing pendamping KUBE.
- d. Setiap KUBE diperbolehkan mengusulkan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

- e. Sebelum pencairan dana, seluruh anggota KUBE harus menyusun proposal sesuai usaha yang akan di kembangkan dibimbing/dipandu oleh pendamping KUBE dan Lurah setempat dalam bingkai kelompok.
- f. Proposal harus dilampiri surat Keterangan Kesanggupan KUBE membelanjakan barang sesuai bunyi proposal dan anggota KUBE hanya bisa membelanjakan barang sesuai proposal yang di ajukan dibimbing/ dipandu oleh pendamping KUBE dan Lurah setempat.
- g. Anggota KUBE tidak diperkenankan membelanjakan barang diluar usulan dalam proposal yang diajukan
- h. Proposal KUBE harus ditanda tangani oleh :
 - 1) Ketua KUBE
 - 2) Bendaharawan KUBE
 - 3) Sekertaris KUBE
 - 4) Disetujui oleh pendamping KUBE desa dan diketahui oleh Lurah dan Kepala Dinas Sosial setempat.
- i. Usahayang dikembangkan KUBE harus dikelola secara bersama-sama antar anggota kelompok (secara berkelompok bukan perorangan) dengan bimbingan pendamping KUBE desa bersama pendamping kecamatan dan pendamping/pembina kabupaten secara profesional.
- j. Pendamping/pembina kabupaten, pendamping kecamatan, dan pendamping desa di seleksi Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Tengah untuk diterbitkan surat keputusan.
- k. Tidak dibenarkan Keluarga Binaan Sosial yang mengelola KUBE diperlakukan sebagai buruh/orang upahan.

- l. Pelaksanaan kegiatan usaha harus melibatkan anggota kelompok, setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama, untuk itu setiap anggota kelompok mendapat pembagian hasil keuntungan usaha dengan mempertimbangkan keaktifan dan prestasi kerjanya dalam pengelolaan KUBE.
- m. Pembina / Pendamping KUBE harus memberikan bimbingan / pembinaan kepada para Keluarga Binaan Sosial, baik secara individu/keluarga maupun secara kelompok yang menyangkut pelaksanaan usaha secara bersama-sama.
- n. Pembina/Pendamping KUBE berkewajiban untuk mengamati dan mengikuti perkembangan Kelompok Usaha Bersama dan harus dapat membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi para Keluarga Binaan Sosial dilapangan.
- o. Sebelum memulai kegiatan usaha para Keluarga Binaan Sosial membuat perencanaan yang matang berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan melihat pangsa pasar yang tersedia dengan memperkirakan keuntungan yang akan diperoleh, dipandu petugas pendamping/Pembina KUBE.
- p. Pendamping KUBE bertanggung jawab kepada Dinas Sosial Kabupaten dan secara berkala diwajibkan untuk membuat laporan perkembangan/ kemajuan KUBE yang didampinginya.
- q. Dari laporan petugas pendamping, Pembina/Pendamping Kabupaten diwajibkan membuat laporan secara periodik dan disampaikan ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
- r. Pembina KUBE Provinsi bertanggung jawab mengkompilasi laporan pendampingan sosial dan memonitor pelaksanaan pendampingan dilapangan.

13. Hasil yang diharapkan

- a. Adanya kemampuan Keluarga Binaan Sosial (KBS) untuk meningkatkan penghasilan keluarganya.
- b. Keluarga Binaan Sosial (KBS) dapat berpartisipasi dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- c. Termotivasinya penerima bantuan untuk mengembangkan bantuan yang di terimanya melalui KUBE dengan maksimal.

14. Monitoring dan Evaluasi

a. Pengertian

Monitoring adalah pemantauan penilaian langsung maupun tidak langsung tentang kondisi perkembangan KUBE Tahun 2012, sedangkan evaluasi adalah penilaian terhadap hasil pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 sejak kondisi awal persiapan sampai dengan kondisi akhir kegiatan.

b. Tujuan

Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan kegiatan, yang berkaitan dengan dukungan dan hambatan pelaksanaan serta mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan apakah sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan.

c. Sasaran

- a. KBS penerima bantuan stimulant UEP KUBE Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Tahun 2012.

b. Pendamping Sosial Kabupaten, Kecamatan dan Desa Tahun 2012.

d. Pelaksana

Petugas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan Petugas Dinas Kabupaten lokasi bantuan stimulant UEP KUBE Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Tahun 2012.

e. Hasil yang di harapkan

Terpantaunya bantuan KUBE Tahun 2012 di lapangan, selanjutnya apabila terdapat permasalahan secara dini dapat di carikan solusi pemecahannya sehingga memperkecil timbulnya kegagalan.

15. Penyusunan Laporan Kegiatan

a. Kegiatan

Pembuatan laporan secara tertulis tentang pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kalimantan Tengah Tahun 2012.

b. Tujuan

Untuk melaporkan hal-hal yang telah di laksanakan sebagai salah satu bahan pertanggung jawaban Dinas Sosial Provinsi dalam penggunaan dana dekonsentrasi. Hasil laporan digunakan oleh Pusat sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi kegiatan di daerah, pertimbangan memberikan *fanismen* atau *reward* kepada daerah, sebagai bahan dasar dan informasi hasil pemberdayaan.

c. System Pelaporan

Laporan pelaksanaan kegiatan dari KUBE, Pendamping dan Pembina KUBE di tujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten denga tembusan kepada

Kepala Dinas Sosia Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

d. Jenis laporan

- a) Laporan bulanan
- b) Laporan triwulan,
- c) Laporan tahunan.

e. Hasil yang diharapkan

Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kalimantan Tengah Tahun 2012.

16. Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Pengembangan KUBE

a. Pengertian

Pelatihan yang di berikan kepada penerima bantuan untuk menambah wawasan, keterampilan dan meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang di tumbuhkan oleh KUBE.

b. Tujuan

- a) Agar para KBS mengetahui tatacara berwirausaha dan mampu melaksanakan wirausaha yang baik dan benar.
- b) Agar para KBS mempunyai kemampuan dan kemauan mengembangkan bantuan yang di terimanya.
- c) Agar para KBS mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi KUBE yang baik dan baenar.

c. Sasaran/Pelaksanaan

Anggota KUBE/KBS yang mendapatkan bantuan stimulant UEP KUBE Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kalimantan Tengah Tahun 2012.

d. Hasil yang diharapkan

- a) KBS penerima bantuan stimulant UEP KUBE tahun 2012 memiliki tambahan pengetahuan dan keterampilan khususnya tatacara berwirausaha dan tehnik pengembangan usaha serta manajemen KUBE.
- b) KBS termotipasi untuk mengembangkan dan memajukan UEP dalam kelompoknya.
- c) KUBE dapat berkembang dan maju.

C. Implementasi Kebijakan Program Bantuan KUBE

Sampai dengan tahun 2013 ini, Kabupaten Sukamara sudah 3 (tiga) kali menerima bantuan KUBE, yaitu pada tahun 2011, 2012, dan 2013. Perincian dari bantuan KUBE tersebut adalah sebagai berikut; untuk tahun 2011 bantuan yang diterima adalah bantuan untuk perkotaan bagi 30 kelompok, tahun 2012 bantuan untuk pedesaan bagi 40 kelompok, dan pada tahun 2013 sebanyak 25 kelompok. Untuk Kecamatan Sukamara, bantuan KUBE yang dialokasikan pada tahun 2012 sebanyak 24 kelompok yang terbagi di 4 (empat) desa, yaitu 8 kelompok di Desa Nantai Sedawak, 8 kelompok di Desa Kartamulia, 3 kelompok di Desa Sukaraja, dan 5 kelompok lainnya di Desa Pangkalan Muntai.

Dasar hukum pelaksanaan program KUBE di Kecamatan Sukamara ini adalah Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Di

samping itu, beberapa perundang-undangan lain yang menjadi pedoman pelaksanaan program bantuan KUBE tersebut adalah: 1) PP No. 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin, 2) Kepmensos RI Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin, 3) Kepmensos RI Nomor 194/HUK/1997 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat, 4) Kepmensos RI Nomor 53/HUK/2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Latar belakang pelaksanaan KUBE di Sukamara, pada dasarnya adalah adanya fakta bahwa di Kecamatan Sukamara masih banyak warga masyarakat yang dikategorikan miskin yang terdaftar dalam data BPS Kabupaten. Di samping itu, faktor lain yang melatarbelakangi pelaksanaan KUBE ini adalah adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak produktif atau adanya waktu-waktu luang di dalam masyarakat yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif. Mengenai latar belakang kegiatan, informan 2 (Chandra Susilo) menjelaskan sebagai berikut :

“Kalau latar belakang, memang pada dasarnya kita mengambil dari data kemiskinan yang sudah ada dari BPS, yang kedua kita lihat dari faktor tingkat kesibukan dan pekerjaan. Itu yang melatar belakangnya.”

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan program bantuan KUBE ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota KUBE baik secara kelompok maupun pribadi, dan yang lebih utama adalah untuk membantu perekonomian keluarga, untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan 1 yang disampaikan dalam wawancara :

“Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan baik dari anggota KUBE maupun pribadi yang lebih utama adalah untuk membantu perekonomian keluarga, untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.”

1. Proses Pemberian Bantuan Modal Usaha KUBE

a. Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Fakir Miskin

Tim Koordinasi Penanganan Fakir Miskin merupakan badan ad hoc yang dibentuk oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung pelaksanaan Program Bantuan KUBE keluarga miskin di Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan dari pembentukan Tim Koordinasi Internal tersebut adalah untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan penentuan sasaran dan lokasi penerima bantuan serta pendamping KUBE. Dengan demikian, pelaksanaan program bisa berjalan lebih terarah dan lebih tepat sasaran.

Tim Koordinasi Penanganan Fakir Miskin Internal Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah beranggotakan unsur-unsur internal Dinas Sosial Provinsi sebanyak 10 orang, yaitu yang terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2) Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.
- 4) Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin.
- 5) Kepala Sub Bagian Perencanaan.
- 6) Pelaksana pada Seksi Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin dan Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Program.

Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Fakir Miskin oleh Dinsos Kalimantan Tengah merupakan wujud komitmen dari pemerintah untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan. Tugas dari tim ini adalah penentu akhir dari penetapan pendamping dan KUBE calon penerima bantuan di tingkat provinsi yang diusulkan oleh Dinsos kabupaten, data selanjutnya dikirim ke pusat

sebagai bahan laporan. Letaknya yang sedemikian jauh (di Ibu Kota Provinsi) menyebabkan tim tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk memverifikasi setiap data yang diusulkan. Akibatnya setiap kesalahan tidak dapat dideteksi sejak dini. Menurut Grindle, letak pengambilan keputusan yang jauh ini (tersebar) akan menyulitkan atau menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.

b. Seleksi Pendamping Sosial

Untuk memperoleh pendamping desa yang berkualitas sehingga bisa bekerja secara maksimal dan dapat berkontribusi menurunkan angka kemiskinan, maka dilakukan seleksi pendamping desa oleh Tim Koordinasi. Seleksi pendamping desa dilaksanakan terhadap 52 orang dari perwakilan 26 desa, dimana masing-masing desa mengajukan dua orang calon pendamping untuk diseleksi.

Pendamping sosial diajukan oleh Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sukamara kepada Tim Penilai dari Dinas Sosial Pravinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari 5 orang. Dalam praktiknya, pendamping sosial ini terdiri dari 3 katagori, yaitu pendamping kabupaten, pendamping kecamatan dan pendamping desa. Semuanya diambil dari lokasi bantuan.

Pendamping kabupaten langsung dijabat oleh Kasi Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sukamara. Hal ini seperti disampaikan oleh informan 1 (Husni Thamrin) yang menyatakan :

.....”*Pendamping kabupaten untuk 2012 itu Mas Chandra (maksudnya Chandra Susilo, S. Sos)*”.

Sedangkan pendamping kecamatan dan pendamping desa diusulkan dari tokoh pemuda atau unsur Karang Taruna dari kecamatan dan desa lokasi bantuan dilaksanakan.

Pendamping sosial tingkat desa bertugas mendampingi kelompok sasaran program KUBE dalam mengelola dana bantuan modal KUBE dari pemerintah untuk kegiatan ekonomi produktif. Dalam melaksanakan kegiatan pendampingan, fungsi pendamping desa meliputi:

1) Fungsi Administrasi

Dalam menjalankan fungsi ini, pendamping melakukan tugas perencanaan, pencatatan, monitoring evaluasi, pelaporan dan dokumentasi.

2) Fungsi Operasional

Fungsi ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan sosial, peningkatan kapasitas kelompok binaan, fasilitasi kelompok, advokasi maupun tugas kedaruratan.

3) Fungsi Koordinasi

Fungsi koordinasi dilakukan dengan membangun kemitraan dan jaringan, membuka akses dengan lembaga lain serta melakukan referral atau rujukan bagi warga binaan yang membutuhkan pelayanan dari lembaga ini.

Terkait tugas pendamping, informan 2 selaku Kasi Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan menjelaskan sebagai berikut :

“Pendamping itu tugasnya membantu apabila kelompok mengalami kesulitan baik dari pengelolaan, verifikasi dan pembuatan laporan, masalah komunikasi dengan dinas terkait. Jadi tugas pendamping membantu kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas yang memungkinkan kelompok ini melaksanakan tugas.”

Selain itu, pendamping juga melakukan peran-peran sebagai perencana, pendamping, pemberi informasi, motivator, penghubung, fasilitator, mobilisator, advokat, peneliti dan evaluator. Pendamping kecamatan dan pendamping desa memiliki fungsi yang sangat vital dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Keduanya harus mampu memadukan dan mensinergikan kebutuhan dan rencana Program Pemberdayaan Fakir Miskin serta menumbuhkan partisipasi anggota KUBE.

Beberapa nilai yang menjadi dasar dalam menentukan pendamping terpilih adalah dengan mempertimbangkan karakter pendamping sosial yang sedapat mungkin memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Empathy terhadap permasalahan dan kondisi yang dialami warga miskin.
- 2) Menghargai martabat dan harga diri keluarga binaan sosial.
- 3) Mengedepankan kesejahteraan antara dirinya dengan kelompok dampungannya.
- 4) Menghargai keterbukaan, positif terhadap perbedaan pandangan dan nilai orang lain.
- 5) Mengedepankan partisipasi, proses dialog sejati dan komunikasi yang terbuka dalam setiap proses fasilitas kelompok.
- 6) Nilai jati diri berbangsa dan bernegara dalam NKRI.

Dalam program penanggulangan kemiskinan melalui bantuan UEP KUBE, pendamping sosial menjalankan tugasnya selama kelompok sasaran masih aktif menjalankan usahanya. Memang jika ditinjau dari sisi pendanaan, mereka hanya mendapat insentif maksimal selama 2 tahun saja. Namun jika

diminta oleh kelompok mereka akan tetap memberikan bimbingan. Hasil wawancara dengan informan 1 diperoleh informasi sebagai berikut :

“Sebenarnya pendampingan itu selamanya. Insentif pendamping ditanggung selama 1 tahun. Terus ditambah dengan dana sharing dari Dinas Sosial Kabupaten selama 1 tahun. Jadi berjumlah 2 tahun yang ditanggung. Tapi pendampingan itu tetap seterusnya”.

Dari sisi penggajian/pemberian insentif, penjelasan informan 1 agak berbeda dengan penjelasan yang ada dalam juknis kegiatan. Dalam Juknis disebutkan bahwa untuk memperlancar pendampingan KUBE di lapangan, honor/tali asih pendamping KUBE diberikan melalui system cash transfer selama 9 bulan atau selama melaksanakan pendampingan sosial.

Hasil wawancara dengan informan 2 juga diperoleh keterangan yang agak berbeda. Pada saat diajukan pertanyaan tentang masa tugas pendampingan, informan 2 menyebutkan : *“biasanya kalo dari provinsi itu sekitar 6 bulan sejak diluncurkan”.* Dari penjelasan ini peneliti mengartikan bahwa tidak ada pendampingan lagi setelah 6 bulan, namun disanggah oleh informan 2. Lebih lanjut informan 2 menjelaskan :

“Bukan begitu, yang saya maksud dari segi honorariumnya. Kalo tugas-tugasnya apabila masih diperlukan, diminta laporan, mereka tetap mengerjakan”.

Walaupun ada perbedaan penjelasan antara informan 1 dan informan 2 mengenai lamanya pendamping desa menerima honorarium/insentif, namun keduanya sama-sama menjelaskan bahwa pendamping akan tetap melaksanakan pendampingan jika diminta walaupun masa pemberian honorariaum telah habis.

Karena memegang peranan yang sangat vital, maka keahlian, pengetahuan, keaktifan dan komitmen pendamping sosial dalam melakukan

pendampingan memegang peranan teramat penting bagi keberhasilan program. Dalam menjalankan tugasnya pendamping sosial seyogyanya memiliki pengetahuan yang memadai agar fungsi dan peran pendamping sebagaimana yang telah ditetapkan dalam juknis dapat dijalankan. Oleh karena itu seleksi pendamping mesti dilakukan secara baik.

Namun harapan tersebut di atas sepertinya tidak terwujud, walaupun tahapan perekrutan pendamping sosial telah dilakukan. Hal ini terjadi karena tim koordinasi (sebagai tim penilai) di tingkat provinsi hanya menerima begitu saja daftar usulan yang disampaikan oleh Dinsos kabupaten. Akibatnya tidak didapatkan kualifikasi pendamping sebagaimana harapan. Ditambah lagi pendamping sosial tidak mendapatkan pembekalan yang memadai.

c. Sosialisasi Program Penanganan Fakir Miskin

Sosialisasi program dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan. Out put dari sosialisasi yang dilaksanakan adalah agar tercipta kesamaan persepsi, pola pikir dan pola tindak bagi peserta sosialisasi sehingga tercipta kesamaan kebijakan dan tindakan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, diperoleh keterangan bahwa sosialisasi dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan perdesaan melalui pemberdayaan KUBE ini dilakukan sebanyak 3 kali untuk segmen yang berbeda, yaitu untuk para pembina, pendamping, dan anggota KUBE. Sosialisasi program dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan

Tengah dengan melibatkan nara sumber sebanyak 5 orang terdiri dari 4 orang dari Dinas Sosial Provinsi dan 1 orang narasumber dari Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kementerian Sosial RI. Peserta yang dilibatkan dalam sosialisasi ini berasal dari unsur Kepala Dinas Sosial/Kepala Bidang Sosial Kabupaten lokasi bantuan, BAPPEDA Kabupaten lokasi bantuan, BRI lokasi bantuan, Camat lokasi bantuan, Kepala Desa lokasi bantuan, dan Petugas Perencana dan Verifikasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Materi yang diberikan atau dibahas dalam pelaksanaan sosialisasi mencakup kebijakan penanggulangan kemiskinan, program yang akan dilaksanakan, kegiatan pendukung dan lain-lain sesuai kebutuhan daerah.

Dalam wawancara yang dilakukan, informan 1 menjelaskan sebagai berikut :

"Kalau sosialisasi di provinsi satu kali. Satu kali untuk pembina,..... Pembina itu terdiri dari Kepala Dinas Sosial (sosnakertrans) kabupaten, terus ditambah dengan BRI, terus BAPPEDA, dan ditambah dengan Kepala Desa..... Untuk pendamping sosialisasinya ada, tersendiri. Pendamping ke provinsi, yaitu pendamping kabupaten, pendamping kecamatan, dan pendamping desa..... Kalau tingkat kabupaten langsung kepada KUBE nya".

Dari penjelasan informan 1 tersebut, disebutkan bahwa sosialisasi yang ke-2 juga dilakukan diprovinsi khusus untuk pendamping kabupaten, pendamping kecamatan, dan pendamping desa lokasi kegiatan. Materi yang disampaikan hampir sama, namun lebih ditekankan pada penjelasan mengenai tugas, fungsi dan peranan pendamping di lapangan.

Sosialisasi yang berikutnya dilaksanakan adalah sosialisasi tingkat kabupaten. Sosialisasi ini langsung dilaksanakan di kecamatan lokasi penerima bantuan., dengan peserta masing-masing kelompok 3 orang yang terdiri dari

ketua, sekretaris dan bendahara. Senada dengan keterangan informan 1, dalam sosialisasi tingkat kabupaten ini informan 2 menjelaskan sebagai berikut :

“Untuk tingkat kabupaten, biasanya dilaksanakan di kecamatan yang mendapat bantuan. Itu khusus untuk para anggota KUBE..... Kalau tidak salah dari 10 orang itu 3 yang diundang, ketua, sekretaris, bendahara”.

Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sukamara melibatkan pemateri dari provinsi (Pak Karno). Materi yang disampaikan pada sosialisasi terhadap KUBE calon penerima bantuan ini ditekankan pada jenis usaha yang harus dijalankan, sistem peyaluran bantuan, sistem pendampingan dan cara pertanggungjawaban. Dalam hal materi sosialisasi, Informan 1 menyebutkan :

“Materinya mengenai verifikasi KUBE tahun 2012, bimbingan teknis sosial, operasional pendamping sosial, hanya menjelaskan bagaimana caranya untuk pengelolaan keuangan tersebut dan tanggung jawabnya, disitulah yang disosialisasikan”.

Petugas Dinas Sosnakertrans yang terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut menganggap peserta sosialisasi memahami dengan baik materi yang disampaikan, karena telah disampaikan dengan jelas dan terarah. Selaku Kasi Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, informan 2 menerangkan :

“Kalo mengerti kayaknya mengerti. Karena yang saya lihat waktu itu sosialisasi itu sudah cukup jelas dan terarah yang disampaikan, tergantung penangkapan peserta saja”.

Namun, hasil wawancara terhadap pengurus KUBE yang mengikuti sosialisasi menyebutkan bahwa materi sosialisasi kurang lengkap. Pemateri tidak menjelaskan bagaimana cara menjalankan usaha agar cepat berkembang, tidak diajarkan bagaimana membuat laporan dan pertanggung jawaban, juga tidak

menyinggung bagaimana langkah yang harus diambil jika ternak/usaha mengalami gangguan dikemudian hari. Dalam hal ini informan 3 (Suryadi) mengatakan :

“Belum ngerti. Yang disampaikan Cuma begini, uang ini tunai, tidak boleh dipotong atau dikurangi sepeserpun. Kalau sampai ada potongan, laporkan”.

Sedangkan informan 6(Jainuri) mengakui mengikuti sosialisasi dan menjelaskan sebagai berikut :

“Materinya,..... begitu-begitu aja..... Misalnya memang pembuatan laporan tidak disampaikan”.

Hal senada juga disampaikan oleh informan 7 dan 8. Kedua informan tersebut menyatakan sebagai berikut :

“Masalah pengembangan sapi itu aja. Kalau masalah lain-lainnya tidak ada” (informan 7).... “Mengenai cara laporan itu belum ada. Memang ada ditanya, minimal katanya sekali setahun. Kalau bisa katanya 2 kali setahun, pemeriksaan” (informan 8).

Nampaknya memang sosialisasi berjalan kurang begitu baik dan terkesan seremony karena belum memberikan informasi yang dapat dipahami oleh seluruh anggota calon penerima bantuan. Bahkan ada terjadi kesalah pahaman pada salah seorang calon anggota yang mengira bantuan ini berupa pinjaman dari bank sehingga ia tidak berani bergabung dengan kelompok dan memilih untuk tidak aktif. Hasil wawancara dengan informan 9 (Murat) diperoleh informasi sebagai berikut :

“Tidak jelas. Saya kira menandatangani mengajukan pinjaman di Bank. Akhirnya dapat pinjaman uang 20 juta, dibelikan sapi. Saya tu takutnya begini pak, terus terang saja nanti yang kita hindari itu begini, sapinya tidak berkembang.”

Sosialisasi adalah sarana untuk menjelaskan maksud dan tujuan serta bagaimana pelaksanaan program di lapangan. Sosialisasi yang kurang baik akan mengakibatkan informasi yang seharusnya disampaikan kepada kelompok sasaran tidak dapat diterima dengan baik. Akibatnya walaupun pelaksanaan program telah dirumuskan secara rinci pada juknis namun di tingkat lapangan, terutama terhadap kelompok sasaran rincian pelaksanaan program menjadi tidak jelas. Grindle menyebutkan keadaan yang demikian akan menyebabkan keberhasilan kegiatan akan rendah.

Pada sisi lain, sosialisasi yang dilakukan secara baik oleh aktor-aktor yang berkepentingan akan melahirkan kesamaan pemahaman yang pada akhirnya melahirkan kesamaan komitmen. Namun dalam program ini sosialisasi tidak melibatkan instansi teknis terkait secara optimal. Akibatnya tidak terjalin koordinasi antar instansi dan *stakeholder* lainnya dan ini menyebabkan bimbingan dan pembinaan terhadap kelompok sasaran menjadi rendah. Jika berpeoman pada pendapat Grindle yang menyebutkan bahwa karakter lembaga dan penguasa menentukan tingkat keberhasilan implementasi suatu program, maka tentu saja keadaan tersebut di atas akan menghambat pelaksanaan program bantuan modal KUBE.

d. Bimbingan Teknis Pendamping Sosial

Bimbingan teknis pendamping sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan tentang Penanggulangan Kemiskinan.

- 2) Memberikan informasi teknis pemberian bantuan kepada Keluarga Binaan Sosial (KBS) melalui rekening KUBE (*Cash Transfer*).
- 3) Menyatukan persepsi tentang teknis pelaksanaan pendampingan.
- 4) Agar para pendamping KUBE dapat memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang telah ditetapkan dengan baik, tertib, dan maksimal.
- 5) Meningkatkan pengetahuan pendamping sosial tentang permasalahan, strategi, kebijakan, dan program pemberdayaan fakir miskin;
- 6) Meningkatkan keterampilan pendamping sosial dalam melakukan pendampingan sosial fakir miskin;
- 7) Meningkatkan komitmen dan kinerja pendamping sosial dalam melaksanakan fungsi dan tugas pendampingan sosial; dan
- 8) Mengembangkan sikap profesional sebagai seorang pendamping sosial.

Bimbingan teknis dilakukan secara serempak bagi seluruh kabupaten lokasi penerima bantuan peserta sebanyak 34 orang dengan perincian pembina/pendamping KUBE kabupaten 4 orang, pendamping kecamatan, 4 orang, dan pendamping desa, 26 orang. Hasil yang diharapkan dari bimbingan teknis ini adalah :

- 1) Terciptanya pemahaman Program Pemberdayaan Sosial dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Tahun 2012.
- 2) Terciptanya peningkatan pengetahuan, wawasan serta keterampilan para Pendamping Sosial Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kalimantan Tengah Tahun 2012.

Pada wawancara yang dilakukan, informan 1 menyebut bimbingan teknis kepada pendamping sosial ini dengan istilah sosialisasi. Dalam hal ini informan 1 menjelaskan :

“Untuk pendamping sosialisasinya ada, tersendiri. Pendamping ke provinsi, yaitu pendamping kabupaten, pendamping kecamatan, dan pendamping desa”.

Pendamping sosial adalah SDM yang turut menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui bantuan modal usaha KUBE. Bimbingan teknis yang diberikan kepada para pendamping sosial ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan wawasan, pemahaman dan komitmennya dalam rangka membantu kelompok sasaran menjalankan aktifitas kelompok dan usahanya. Grindle menyebutkan bahwa tersedianya sumber daya yang dibutuhkan (tenaga kerja, keahlian, dana dan sarana) akan memudahkan pelaksanaan implementasi kebijakan. Namun dalam hal ini keberadaan pendamping sosial belum memberikan kontribusi yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

e. Verifikasi KUBE Tahun 2012

1). Pendataan Anggota

Pada dasarnya Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sukamara telah menyiapkan data sejak jauh-jauh hari sebelum mendapat bantuan dari pusat. Bahkan 1 tahun sebelumnya data-data tersebut telah ada. Data ini berupa data penduduk miskin di Kabupaten Sukamara, baik yang berasal dari hasil pendataan sendiri maupun data yang disuport oleh Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi atau BPS Kabupaten Sukamara. Kemudian atas permintaan

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Sosnakertrans Kabupaten

Sukamara melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima bantuan. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan 1 diperoleh keterangan sebagai berikut :

“.....Bagaimana caranya agar kita mendapatkan ini, dengan data-data yang sudah kita siapkan. Data apapun yang diminta oleh Pemerintah, terutama Pemerintah propinsi, walaupun hanya dalam jangka waktu 3 atau 4 hari, kami sudah siap. Kami siap mengantar kesana (provinsi).....”

Masih menurut keterangan informan 1 dan informan 2, ketika sudah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan, biasanya pusat melalui provinsi juga mengirimkan data keluarga miskin. Karena data tersebut sudah cukup lama (bisa sampai 1 tahun) maka perlu diverifikasi kembali kebenarannya. Keluarga miskin calon penerima harus dipastikan masih memenuhi syarat untuk menerima bantuan. Informan 1 menjelaskan sebagai berikut :

“..... Jadi data itu kami ferivikasi lagi, istilahnya kami data ulang kepada masyarakat-masyarakat yang ada. Kadang-kadang kan data itu sudah tidak begitu valid. Kadang-kadang saat didata orangnya memang disitu, memang benar orangnya kurang mampu. Tetapi dalam kekurangan mereka itu sekarang sudah bangkit dan berhasil. Jadi didalam pendataan ulang atau ferivikasi orang tersebut tidak bisa diikuti sertakan lagi, terpaksa kami alihkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan.”

Crosscheck ulang terhadap data yang dikirimkan oleh provinsi juga untuk melihat apakah ada yang sudah meninggal dunia, atau apakah tingkat ekonomi keluarganya sudah baik (sudah kaya), sudah pindah dan lain sebagainya. Senada dengan pernyataan di atas, informan 2 menjelaskan sebagai berikut :

“.... Kadang mereka (maksudnya provinsi) sudah ada sebagian datanya, sedikit tapi tidak komplit. Kemudian kita disuruh cek ulang dengan verifikasi data untuk menentukan keakurasian data tersebut.”

Kegiatan verifikasi(*crosscheck*) data Fakir Miskin calon penerima bantuan KUBE tahun 2012 dari hasil pemetaan tahun 2011 dilampiri fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan Kartu Raskin/ Keterangan Miskin. Data yang sudah diperbaiki dikirim ke pusat melalui provinsi untuk ditetapkan sebagai Keluarga Binaan Sosial (KBS) sasaran.

Ketika melakukan pendataan, Dinas Sosnakertrans melibatkan seluruh pejabat dan staff di Bidang Sosial dan dibantu oleh aparat desa dan pendamping. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan 1 sebagai berikut :

"Ketika pendataan kami mengerahkan semua staf. 7 orang, termasuk saya. Yang membuat kewalahan saat pendataan, tapi untuk pengelolaan ke lapangan hanya 2 orang aja....."

Pernyataan ini diperkuat lagi oleh informan 2 yang menerangkan sebagai berikut :

"Kalo dari dinas ya kita sendiri yang turun, bersama staf-staf yang lain. Terus dibantu aparat-aparat desa setempat yang mendapatkan bantuan KUBE itu."

Namun kedua pernyataan ini agak berbeda dengan pengakuan semua pengurus/anggota KUBE yang berhasil peneliti wawancarai. Semua dari mereka mengakui bahwa yang melakukan pendataan adalah Loyola Hengky (Pendamping Desa) dengan cara langsung meminta foto copy KTP tanpa penjelasan yang memadai. Proses pendataan yang demikian berpotensi menimbulkan penyimpangan di lapangan, yaitu masuknya kepentingan orang-orang tertentu di desa yang berakibat pada tidak tepatnya sasaran. Sebagai contoh, dalam hal ini informan 9 (Murat) menyatakan :

..... Dulu memang Hengki menyampaikan. Ngah (Pak), angah mau ikut tidak. Kelompok sapi. Cuma bantuan ini ada 20 juta, di belikan sapi.... "

2). Kriteria Anggota KUBE

Sasaran program penanggulangan kemiskinan perdesaan adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan sangat miskin/fakir miskin, sesuai UU Nomor 13 Tahun 2011. Adapun kriteria penerima bantuan sesuai juknis kegiatan sebagai berikut :

- a) Kepala Keluarga (KK) pencari nafkah utama (laki-laki/perempuan) berusia 18 s/d. 55 tahun dan sudah pernah menikah.
- b) Penghasilan yang diperoleh tiap bulan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari (penghasilan rendah/ berada dibawah garis sangat miskin yang diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan berdasarkan standar BPS masing-masing kabupaten/kota lokasi bantuan).
- c) Ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial).
- d) Keterbatasan kepemilikan pakaian, hanya mampu memiliki 1 stel pakaian per orang per tahun.
- e) Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarganya yang sakit.
- f) Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.
- g) Tidak memiliki harta (asset) yang dapat dimanfaatkan hasilnya atau dijual untuk membiayai kebutuhan hidupnya.
- h) Bertempat tinggal tidak layak huni.
- i) Sulit memperoleh air bersih.

Pada kenyataannya, tidak semua anggota kelompok penerima bantuan KUBE memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan tersebut. Hampir semua keluarga miskin sasaran mempunyai rumah yang cukup bagus untuk dikatakan miskin. Tempat tinggal mereka cukup besar, bahkan banyak diantaranya yang menggunakan keramik (lihat gambar 5, 6, 7 8, 9, dan 10 pada lampiran). Di beberapa kelompok ada anggota yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria fakir/miskin yang ditentukan. Hal ini menunjukkan adanya suatu ketidaktepatan sasaran program sebagai akibat dari proses penentuan sasaran yang salah.

Jika ditinjau dari statusnya dalam keluarga, banyak diantara mereka yang bukan Kepala Keluarga. Berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan, terdapat 10 orang anggota kelompok berjenis kelamin perempuan. Satu orang diantaranya diketahui sebagai istri Kepala Desa, dan satu orang anak perempuan berusia 12 tahun. Data anggota kelompok berdasarkan jenis kelamin seperti pada tabel 4.11 berikut :

Tabel 4.11. Karakteristik Anggota KUBE Sasaran Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	NAMA KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA	JUMLAH ANGGOTA BERDASARKAN JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	MAJU BERSAMA 1	10 org	9	1
2	MAJU BERSAMA 2	10 org	10	0
3	MAJU BERSAMA 3	10 org	7	3
4	MAJU BERSAMA 4	10 org	10	0
5	MAJU BERSAMA 5	10 org	10	0
6	MAJU BERSAMA 6	10 org	9	1
7	MAJU BERSAMA 7	10 org	5	5
8	MAJU BERSAMA 8	10 org	10	0

Sumber : Wawancara dengan pengurus KUBE sasaran (data telah diolah)

Data dan informasi diatas diperkuat dengan pernyataan informan 9 sebagai berikut :

"Beti,.... anak yang baru 12 tahun itu..... Nuryamami itu istri pembakal (Kades)".

Demikian juga apabila ditinjau dari sisi penghasilan. Banyak diantara anggota KUBE yang bekerja kontrak pada Pemerintah Daerah dan karyawan perusahaan sawit yang penghasilan per bulannya sudah sesuai standart UMR daerah. Sebut saja misalnya Saiman (informan 4) yang bekerja sebagai satpam di salah satu dinas, Jaelani (informan 5) tenaga kontrak Dinas PU, Arbain dan Joko (informan 7) tenaga kontrak taman Dinas PU, dan Muhtar (informan 8) yang sudah memiliki sapi sepuluh ekor lebih.

Hal lain yang juga merupakan temuan menarik adalah adanya ketidakmerataan di dalam masyarakat penerima bantuan, di mana anggota masyarakat yang pada tahun sebelumnya pernah menerima bantuan pemerintah, pada tahun berikutnya menerima bantuan lagi, padahal ada anggota masyarakat lain yang lebih berhak menerima bantuan belum pernah sekalipun mendapatkan bantuan tersebut.

Terhadap sasaran yang tidak sesuai dengan kriteria keluarga miskin seperti standart BPS dan ketentuan juknis ini, informan 1 dan informan 2 memberikan alasan sebagai berikut :

a. Informan 1 :

"Kriteria kita memang ada, kriterianya berdasarkan data dari BPS. BPS kan punya standar minimum. Yang penghasilan dibawah sekian, saya lupa datanya."

b. Informan 2 :

“Memang ada perbedaannya di Jawa dengan disini. Kalau di Sukamara, kita melihat yang pertama itu dari tingkat pendapatan per bulan atau per hari. Jadi disitu standarnya kita melihat faktor kemiskinan itu.”

Dari pernyataan tersebut, informan 1 dan informan 2 ingin menjelaskan bahwa keluarga yang dipilih untuk menerima bantuan di Desa Natai Sedawak adalah keluarga yang paling miskin dibanding keluarga di lingkungan sekitarnya di desa sasaran. Namun berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, pernyataan tersebut terbantahkan. Sebab masih banyak keluarga miskin yang terlihat menempati rumah yang tidak layak huni dengan pekerjaan serabutan (belum menetap). Disamping itu jika pernyataan informan 1 dan informan 2 benar maka alangkah baiknya jika bantuan tersebut dialihkan ke desa lain yang penduduk miskinnya lebih banyak.

Di samping penentuan anggota kelompok yang beberapa di antaranya tidak tepat, salah satu permasalahan lainnya adalah kurangnya sosialisasi terkait program bantuan yang akan diterimakan. Banyak individu yang tergabung dalam kelompok hanya mendapat pemberitahuan sekedarnya saja mengenai apa perlunya mereka tergabung dalam kelompok, dan juga mengenai bantuan yang akan mereka terima. Bahkan ada beberapa anggota kelompok yang tidak mengetahui apa-apa kecuali bahwa nama mereka ada tergabung sebagai anggota kelompok. Yang juga cukup menarik, ada salah seorang anggota kelompok yang mengira bahwa modal yang didapat kelompok bukan dana bantuan dari pemerintah melalui program KUBE, tetapi pinjaman dari bank sebagai modal usaha kelompok. Atas persepsinya

yang salah ini anggota kelompok yang bersangkutan memilih tidak aktif karena takut tersangkut hutang pada bank.

Beberapa hal ini mengindikasikan bahwa proses awal sosialisasi dan pembentukan kelompok KUBE kurang berjalan dengan baik dan memerlukan banyak evaluasi sebagai bahan masukan untuk pembenahan pelaksanaan program di masa-masa mendatang.

3). Pembentukan KUBE

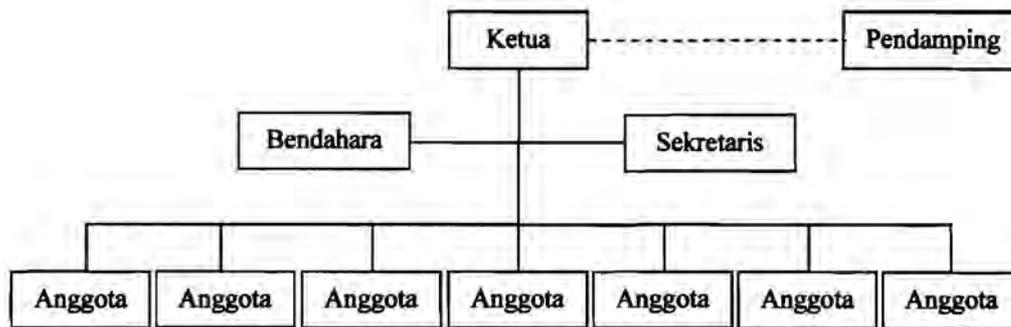
Didalam pelaksanaannya, program bantuan KUBE di Kecamatan Sukamara diawali dengan pembentukan kelompok-kelompok penerima bantuan KUBE oleh Pendamping Sosial, yaitu sebanyak 10 orang anggota untuk tiap kelompok. Pembentukan kelompok sasaran penerima bantuan KUBE berdasarkan data dari Pemerintah Pusat mengenai Rumah Tangga Miskin yang ada di daerah sasaran. Dari data yang diberikan oleh Pemerintah Pusat tersebut, Bagian Sosial Disnakertrans Kabupaten Sukamara dibantu Tim Koordinasi Penanganan Fakir Miskin melakukan pengecekan ulang dan mencocokkan data yang ada dengan kondisi riil di masyarakat untuk validasi data. Setelah itu baru dilakukan pembentukan kelompok sesuai dengan jatah program dari pemerintah.

Setelah pembentukan kelompok selesai, kelompok-kelompok tersebut didata untuk kemudian dikirimkan ke pusat sebagai data Kelompok Sasaran Calon Penerima Bantuan KUBE Tahun 2012.

Pembentukan KUBE sasaran didasarkan pada penilaian terhadap sejumlah indikator yang mencakup bidang kelembagaan, sosial dan ekonomi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a). Jumlah anggota KUBE 10 orang Kepala Keluarga.
- b). Mempunyai struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas, yaitu :
 - (1). Melaksanakan pertemuan minimal sebulan sekali.
 - (2). Topic pertemuan bersifat variatif sesuai dengan permasalahan yang dihadapi kelompok.
 - (3). Kehadiran anggota.
 - (4). Partisipasi anggota dalam memberikan masukan bagi pemecahan masalah atau kemajuan KUBE.
- c). Mempunyai administrasi kegiatan, seperti buku daftar anggota kelompok, buku tamu, buku kegiatan, buku kas/keuangan, buku inventaris, buku simpan pinjam dan lainnya.
- d). Jenis usaha satu macam.
- e). Memiliki Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS), besarnya disepakati oleh anggota.
- f). Kualitas dan kuantitas pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
- g). Optimalisasi/kreatifitas pendayagunaan potensi dan sumber-sumber ekonomi.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh di lapangan, semua kelompok terbentuk sudah memiliki kepengurusan, yaitu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Bagan Struktur kepengurusan KUBE di Desa Natai Sedawak digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.2. Struktur Organisasi KUBE Desa Natai Sedawak
Sumber : diolah Peneliti, 2013

Kepengurusan KUBE pada hakekatnya adalah upaya penumbuhan kesadaran keluarga miskin untuk dapat hidup dan berusaha bersama dalam kelompok. Oleh karenanya seharusnya KUBE dibentuk dari, oleh dan untuk anggota kelompok. Pengurus dipilih dari anggota kelompok yang mau dan mampu mendukung pengembangan KUBE, memiliki (potensi) kemampuan *leadership*, kesediaan untuk mengabdikan, mampu mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan kelompok, mempunyai keuletan, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup serta yang penting adalah merupakan hasil musyawarah seluruh anggotan.

Kriteri pembentukan kelompok dan kepengurusannya tidak dijumpai oleh peneliti pada wawancara terhadap pengurus atau anggota yang ditemui. Keseluruhan dari mereka mengakui bahwa kelompok sudah terbentuk begitu saja tanpa musyawarah terlebih dahulu. Akibatnya ada beberapa anggota yang tidak menyadari kalau dia sebenarnya juga ditunjuk sebagai pengurus KUBE. Bahkan yang lebih parah lagi ada anggota kelompok yang merasa sebagai anggota kelompok 2, padahal dia masuk dalam kelompok 3. Ini merupakan dampak lebih lanjut dari proses penunjukan keluarga miskin

calon sasaran yang tidak prosedural. Dalam hal ini informan 4 dengan nada heran menyatakan sebagai berikut :

“Dulu katanya wakil. Jadi, bendahara? Yang megang duit saya yo?”

Pembentukan dan pemilihan pengurus kelompok yang tanpa rapat juga diakui oleh informan 5 :

“Terus terang aja, memang kita tidak pernah rapat, tidak tahu. Tiba-tiba aja datang. Makanya di batin saya, kok saya tiba-tiba jadi bendahara. Saya ini kan lari sana lari sini, ke hutan (sibuk, jarang di tempat). Kok bisa? Bukan tidak mau. Tapi kan harusnya ditanya dulu, kamu mau enggak jadi bendaharanya? Harusnya cari orang yang netap, saya ini orang “liar” (tidak menetap di tempat).

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan 6 :

“Langsung ditunjuk begitu aja, aku ditunjuk bendaha. Anen Sekretaris.”

Sebagai organisasi, KUBE mesti mempunyai kegiatan administrasi yang berfungsi sebagai arsip dan kontrol internal. Pengurus KUBE perlu memiliki catatan atau administrasi yang baik, yang mengatur keanggotaan, organisasi, kegiatan, keuangan, pembukuan, laporan dan lain sebagainya. Seperti digariskan pada juknis, catatan dan administrasi KUBE meliputi buku daftar anggota kelompok, buku tamu, buku kegiatan, buku kas/keuangan, buku inventaris, buku simpan pinjam dan lainnya.

Kegiatan administrasi kelompok sama sekali tidak terlihat ada kelompok-kelompok yang yang peneliti kunjungi. Dalam wawancara mereka mengakui bahwa kelompok sama sekali tidak memiliki catatan-catatan yang menunjukkan kegiatan administrasi karena memang tidak diarahkan baik pada saat sosialisasi maupun ada saat pendampingan. Dalam pembuatan laporan misalnya, mereka merasa tidak perlu tahu karena semuanya sudah

ditangani oleh pendamping. Mengenai kegiatan administrasi kelompok ini informan 7 menyatakan :

“tidak, itukan sebenarnya masalah pembuatan laporan di Sedawak ini kan sebenarnya ada pendamping (Loyola Hengki), kalo mengajukan lagi kan harus beliau yang ngajukan.”

f. Proses Penentuan Jenis Usaha

Sesuai prosedur, penentuan jenis usaha yang akan dijalankan oleh kelompok KUBE seharusnya ditentukan oleh seluruh anggota KUBE berdasarkan musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan potensi, keinginan, dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggota, dengan dibimbing oleh Pendamping Desa. Dalam hal ini, pemerintah hanya memberikan batasan bidang-bidang usaha apa saja yang bisa dipilih dan dijalankan oleh kelompok usaha. Hal ini seperti ditegaskan oleh informan 1 selaku petugas dari dinas Sosnakertrans :

“Arahan dan bimbingan ya pastilah. Kami cuma sekedar mengarahkan, tapi keputusan adalah dipihak mereka. Kami tidak dapat memaksakan bahwa ini harus sapi, harus ternak, harus ini, harus ini, kami tidak bisa.”

Pada prakteknya, penentuan usaha KUBE di Natai Sedawak tidak melalui musyawarah anggota dan juga tidak melibatkan partisipasi warga kelompok. Dari beberapa anggota kelompok yang menjadi informan wawancara, mereka menyatakan bahwa penentuan bidang usaha yaitu beternak sapi adalah merupakan sesuatu yang sudah ditentukan secara sepihak, anggota kelompok tinggal menyetujuinya saja. Beberapa anggota kelompok ada yang merasa tidak cocok dengan usaha yang sudah dipilih/ditentukan. Kalau boleh memilih, mereka sebenarnya ingin menjalankan jenis usaha lain yang lebih sesuai dengan latar

belakang pengalaman mereka, seperti bidang perkebunan karet, ternak ayam potong atau bidang perikanan. Terhadap jenis usaha yang sudah ditetapkan, informan 3 menyatakan sebagai berikut :

"Nah... inilah namanya sosialisasi tu ndak jelas, sebenarnya kalo kemaren ada diberitau bahwa ada bantuan dari, umpamanya dari propinsi sekian. Nah kita bentuk kelompok ataupun mengajukan mau nanam apa, apa kelompok petani atau kelompok ikan atau kelompok apa ternak gitukan enak. Ini nggak, langsung sapi."

Penentuan jenis usaha kelompok jelas sekali tidak didasari atas potensi dan keahlian yang dimiliki anggota kelompok. Disini yang lebih terlihat adalah keinginan dan selera dari segelintir orang, termasuk pembimbing yang sangat besar peranannya. Data berikut menunjukkan potensi yang sebenarnya ditinjau dari latar belakang keahlian dan pekerjaan sehari-hari yang pernah atau sedang dijalani :

Tabel 4.12. Karakteristik Anggota KUBE Sasaran Berdasarkan Jenis Pekerjaan

NO.	NAMA KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA	JUMLAH ANGGOTA BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN					
			PETANI	PETERNAK	PEKEBUN	PEDAGANG	PNS/APARAT DESA	PROFESI LAINNYA
1	MAJU BERSAMA 1	10 org	4	3	2	0	0	1
2	MAJU BERSAMA 2	10 org	4	4	2	0	0	0
3	MAJU BERSAMA 3	10 org	4	0	3	2	0	1
4	MAJU BERSAMA 4	10 org	2	0	1	0	0	7
5	MAJU BERSAMA 5	10 org	4	1	0	0	0	5
6	MAJU BERSAMA 6	10 org	1	0	3	0	0	6
7	MAJU BERSAMA 7	10 org	4	0	0	0	1	5
8	MAJU BERSAMA 8	10 org	1	0	3	0	0	6
JUMLAH		80 org	24	8	14	2	1	31

Keterangan : PNS dimaksud baru diangkat setelah mendapat bantuan KUBE
Sumber : Wawancara dengan pengurus KUBE sasaran (data telah diolah)

Data di atas menunjukkan hanya terdapat 8 orang atau 10% dari seluruh jumlah anggota yang pekerjaan sehari-harinya memang peternak. Bahkan yang lebih parah lagi 5 kelompok dari 8 kelompok sasaran tidak memiliki anggota yang berprofesi sebagai peternak. Kebanyakan dari mereka adalah petani dan pekebun yaitu sebanyak 38 orang atau 47,5%. Sisanya sebagai pedagang sebanyak 2 orang (2,5%), PNS/aparat desa 1 orang (1,3%) dan profesi lainnya sebanyak 31 orang (38,8%).

Ketidacocokan jenis usaha dengan keahlian dan minat anggota ini mengakibatkan adanya benih-benih ketidakkompakan di dalam kelompok, dimana ketidakpuasan yang timbul di antara anggota kelompok akan mempengaruhi komitmennya untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Hal ini terbukti dari banyaknya anggota kelompok yang kemudian tidak aktif atau bahkan mengundurkan diri dari keanggotaan dan kegiatan kelompok yang berakibat pada hilangnya hak-hak mereka atas bantuan yang diterima secara kolektif. Dengan demikian, sasaran dan tujuan program KUBE ini tidak akan tercapai secara maksimal.

Teori Grindle menyebutkan bahwa kepentingan kelompok sasaran (*target group*) akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Program yang mendapat dukungan kelompok sasaran akan mudah diimplementasikan, sebaliknya jika ada pihak-pihak tertentu yang merasa kepentingannya tidak terwakili maka akan menyebabkan implementasi kebijakan menemui kendala. Dalam hal ini banyaknya anggota KUBE yang memilih mundur dari keanggotaan karena merasa kepentingannya tidak

terakomodir akan mengurangi tingkat keberhasilan program tersebut di lapangan.

g. Tahap Pencairan Dana

Tahap berikutnya adalah tahap pencairan dana, di mana dana dari pusat langsung dikirim ke rekening kelompok melalui Bank Rakyat Indonesia lokasi kegiatan. Kelompok mencairkan dana tersebut untuk digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah diusulkan didalam proposal. Dari sejumlah kelompok di Desa Natai Sedawak, penggunaan dana kelompok semuanya digunakan untuk usaha beternak sapi. Proses pembelanjaan langsung oleh kelompok yang bersangkutan. Hal ini diakui oleh seluruh anggota/pengurus KUBE yang diwawancara yang menyatakan bahwa pengurus kelompok mencari sendiri ternak sapi yang diinginkan. Informan 3 menerangkan sebagai berikut :

“Ketua dan anggota kerja sama membelinya. Kita kan dititipi uang lewat BRI, uangnya ada sekian, umpamanya ada 20 juta. Nah kita beli sapi.....”

h. Tindak Lanjut Pembinaan dan Evaluasi

Dalam rangka menjamin terlaksananya program bantuan dengan baik maka tindak lanjut kegiatan setelah proses pencairan dana dan menjalankan usaha adalah pendampingan dan pembinaan. Pembinaan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penumbuhan dan pengembangan KUBE, disamping meningkatkan motivasi dan kemampuan pelaksanaan dilapangan serta kapasitas manajemen pengelola KUBE. Tugas pendampingan dan pembinaan ini terletak di pundak pendamping desa, pendamping kecamatan, pendamping

kabupaten, dan juga instansi terkait, yaitu dinas-dinas teknis seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan Dinas Perindustrian. Kerja sama juga dijalin dengan PPL Kecamatan untuk keluhan-keluhan atau permasalahan-permasalahan yang bersifat teknis.

Dalam hal ini, Dinas Sosial selaku pelaksana program semestinya membentuk komitmen dengan semua dinas terkait untuk pembinaan kelompok KUBE ini. Namun pada kenyataannya komitmen ini tidak terbentuk dengan baik. Dinas Sosnakertrans selaku pelaksana program hanya mengundang dinas terkait pada acara pembukaan sosialisasi terhadap KUBE calon sasaran. Dinas teknis sama sekali tidak dilibatkan pada pemberian materi sebagai narasumber pada sosialisasi tersebut. Untuk selanjutnya peranan dinas teknis ini juga tidak kelihatan dalam menunjang tumbuh dan berkembangnya KUBE dan usahanya. Ketika peneliti bertanya apakah dinas terkait diundang dalam sosialisasi, informan 1 memberikan jawaban sebagai berikut :

“Iya. Dalam pembukaan, namun dalam sosialisasinya mereka sudah tidak mengikuti lagi.”

Sifat pembinaan adalah terutama berkaitan dengan kendala di lapangan yang bersifat teknis, seperti kemungkinan ternak sapi menderita sakit, yang mana dalam kasus ini kelompok akan diarahkan ke PPL yang bersangkutan untuk mengatasinya. Pembinaan yang bersifat penguatan sumber daya baik berupa pengetahuan atau keterampilan belum dilaksanakan. Padahal pembinaan yang demikian itu sangat diperlukan untuk menambah daya tahan dan mempertahankan kelangsungan hidup kelompok. Dalam hal ini, pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat personal terhadap masing-masing anggota kelompok masih sangat kurang.

Minimnya keterlibatan dinas teknis dalam pembinaan terhadap KUBE sasaran menyebabkan para anggota KUBE bingung harus bertanya kepada siapa ketika usaha yang mereka jalankan mengalami hambatan, misalnya ternak sapi mengalami sakit, pertumbuhannya lambat, atau kesulitan dalam mencari rumput sebagai makanan ternaknya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan informan 1 yang mengakui mengarahkan para anggota KUBE untuk menghubungi PPL jika menemui kesulitan. Dalam hal pembinaan, informan 3, informan 5, informan 6, dan informan 7 mengakui tidak pernah mendapat kunjungan dari Dinas Sosnakertrans maupun dinas teknis terkait. Informan 3 menyatakan sebagai berikut :

“Nggak. Nggak pernah. Sebenarnya kan ketua kelompok pendamping tu kan apa keluhan warga itu, sebenarnya mau didekati (ditanya/dikunjungi). Kan dia perantaranya kan. Namanya kita kurang pengetahuan, pembinaan itu tidak ada.”

Senada dengan pernyataan informan 3 tersebut, informan 6 menegaskan bahwa selain dinas, pendamping desa pun tidak pernah datang berkunjung melakukan pembinaan, pernyataan informan 6 sebagai berikut :

“Tapi, pelayanannya ini tidak maksimal, pemeriksaan-pemeriksaan sapi tidak ada, kalau kurang vitamin dll juga tidak diperhatikan. Jadi, susah, kami tidak mengerti.”

Informasi yang agak berbeda disampaikan oleh informan 7, yang menyatakan bahwa sebenarnya utusan dinas pernah melakukan kunjungan monitoring, namun tidak pernah bertemu dengan anggota kelompok. Dalam hal ini informan 7 menyatakan :

“Nah, ini masalahnya. Setiap beliau datang, kelompok kami tidak ada di tempat. Yang ada Cuma pendamping desa aja.”

Akibat dari kurangnya pendampingan dan pembinaan terhadap kelompok baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat personal tersebut, semangat masing-masing anggota kelompok menjadi surut, sehingga ada beberapa anggota yang kemudian tidak aktif, bahkan ada yang keluar dari keanggotaan kelompok. Untuk KUBE sasaran di Desa Natai Sedawak, data keaktifan anggota seperti tertera pada Tabel 4.13 berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.13. Data Kelompok dan Keaktifan Anggota KUBESasaran

NO	NAMA KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA AWAL	JUMLAH ANGGOTA YG AKTIF	JUMLAH ANGGOTA YG TIDAK AKTIF	ALASAN ANGGOTA YANG TIDAK AKTIF
1	MAJU BERSAMA 1	10 org	9org	1org	Tidak sanggup mencari umpan/rumput
2	MAJU BERSAMA 2	10 org	8org	2org	1. Perekrutan anggota asal-asalan. 2. Tidak mampu mencari rumput 3. Ada pekerjaan lain, tidak ada waktu 4. Tdk ada kecocokan antar anggota (dalam mengambil keputusan kelompok). Daripada bertengkar ybs memilih mundur
3	MAJU BERSAMA 3	10 org	6org	4org	1. Tidak sanggup 2. Tidak ada kecocokan
4	MAJU BERSAMA 4	10 org	5org	5org	1. Tidak ada kecocokan 2. Banyak perencanaan sementara dana tidak sesuai/dirasa tidak cukup (tidak ada kecocokan)
5	MAJU BERSAMA 5	10 org	6org	4org	1. Dalam mengambil keputusan, banyak perencanaan, dana tidak cukup 2. Tidak terbiasa mencari rumput 3. Pesimis
6	MAJU BERSAMA 6	10 org	3org	7org	Tidak ada kecocokan, tidak sanggup mencari rumput krn tidak terbiasa
7	MAJU BERSAMA 7	10 org	5org	5org	1. Tidak memahami program (salah tafsir, dikira pinjaman kredit berjangka dari bank) 2. Tidak pernah diberi tahu
8	MAJU BERSAMA 8	10 org	6org	4org	1. Sibuk, ada pekerjaan lain. 2. Tidak mampu mencari makannya, tidak cocok dengan keahlian/bidang pekerjaan 3. Tidak cocok dalam keputusan, ada pekerjaan lain (tenaga kontrak pertamanan pemda, kebun, dll)/tidak sanggup/tidak ada waktu mencari rumput

Sumber : Wawancara dengan pengurus KUBE sasaran (data telah diolah)

Dari tabel di atas diperoleh informasi bahwa tidak efektifnya kelompok dalam menjalankan kegiatan disebabkan karena :

1. Umumnya anggota kelompok direkrut asal-asalan tanpa diberitahukan lebih dulu maksud tujuannya (langsung diminta KTP).
2. Penunjukan pengurus tidak melalui mekanisme yang baik (misalnya melalui rapat atau pemilihan)
3. Tidak pernah terjadi rapat dalam kelompok, termasuk dalam menentukan jenis usaha
4. Banyak peserta yang kaget, tahu-tahu terdaftar sebagai anggota KUBE yang dirasa bidang usahanya tidak sesuai dengan minat dan keahlian mereka.

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan KUBE dan permasalahan yang merupakan hambatan serta upaya pemecahannya, sehingga upaya penumbuhan dan pengembangan KUBE berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan monitoring dan evaluasi beserta pelaporannya dilaksanakan melalui mekanisme secara berjenjang mulai dan tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi dan pusat dalam koordinasi Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) PROKESRA secara berjenjang.

Tidak adanya pembinaan yang memadai yang menopang berlangsungnya kegiatan organisasi baik dalam mengelola kelompok maupun dalam menjalankan usaha berdampak tidak baik terhadap jalannya usaha KUBE sasaran. Dalam wawancara ditemui fakta salah satu kelompok hanya membeli 3 ekor sapi dari 4 yang direncanakan. Bendahara kelompok mengaku tidak tahu-menahu akan hal ini. Setelah dikonsultasikan ke pembimbing desa,

rensponya tidak memadai. Secara keseluruhan terdapat 4 kelompok yang jumlah ternaknya justru berkurang dari semula. Penyebabnya adalah karena mati, baik karena memang sapi kurang layak saat dibeli maupun karena keterbatasan keterampilan kelompok dalam beternak. Lebih jelasnya data kemajan usaha KUBE disajikan pada tabel 4.14 berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.14. Data Kemajuan Usaha KUBE Sasaran

NO.	NAMA KELOMPOK	PERKEMBANGAN USAHA					FAKTOR PENYEBAB KEMUNDURAN
		JUMLAH TERNAK AWAL	JUMLAH TERNAK YG MATI	JUMLAH TERNAK YANG BERKEMBANG BAIK	JUMLAH TERNAK YG BARU DILAHIRKAN	JUMLAH TERNAK SAAT INI	
1	MAJU BERSAMA 1	4	1	3	0	3	Sakit/tidak ada pembinaan
2	MAJU BERSAMA 2	4	1	3	0	3	Sakit, sapi yang dibeli kecil, tidak ada pembinaan
3	MAJU BERSAMA 3	4	0	5	1	5	-
4	MAJU BERSAMA 4	3	1	2	0	2	Sakit, tidak ada pembinaan, ada penyelewengan dana awal
5	MAJU BERSAMA 5	4	0	5	1	5	-
6	MAJU BERSAMA 6	4	0	4	0	4	-
7	MAJU BERSAMA 7	4	0	5	1	5	-
8	MAJU BERSAMA 8	4	0	5	1	5	-

Sumber : Wawancara dengan pengurus KUBE sasaran (data telah diolah)

Sebagai data penunjang, berikut ini ditampilkan Tabel-Tabel karakteristik anggota KUBE sasaran di Natai Sedawak berdasarkan usian dan pendidikan.

Tabel 4.15. Karakteristik Anggota KUBESasaran Berdasarkan Usia

NO.	NAMA KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA	JUMLAH ANGGOTA BERDASARKAN KELOMPOK USIA (THN)			
			DIBAWAH 30	30-40	40-50	DIATAS 50
1	MAJU BERSAMA 1	10 org	0	8	2	0
2	MAJU BERSAMA 2	10 org	3	4	3	0
3	MAJU BERSAMA 3	10 org	2	6	2	0
4	MAJU BERSAMA 4	10 org	0	8	2	0
5	MAJU BERSAMA 5	10 org	7	0	3	0
6	MAJU BERSAMA 6	10 org	0	9	1	0
7	MAJU BERSAMA 7	10 org	0	8	2	0
8	MAJU BERSAMA 8	10 org	1	4	5	0

Sumber : Wawancara dengan pengurus KUBE sasaran (data telah diolah)

Tabel 4.16. Karakteristik Anggota KUBE Sasaran Berdasarkan Pendidikan

NO.	NAMA KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA	JUMLAH ANGGOTA BERDASARKAN PENDIDIKAN				
			TIDAK SEKOLAH/TDK TAMAT SD	TAMAT SD	TAMAT SLTP	TAMAT SLTA	TAMAT D3/S-1
1	MAJU BERSAMA 1	10 org	4	4	2	0	0
2	MAJU BERSAMA 2	10 org	10	0	0	0	0
3	MAJU BERSAMA 3	10 org	6	0	3	1	0
4	MAJU BERSAMA 4	10 org	4	6	0	0	0
5	MAJU BERSAMA 5	10 org	5	5	0	0	0
6	MAJU BERSAMA 6	10 org	0	8	1	1	0
7	MAJU BERSAMA 7	10 org	5	3	1	1	0
8	MAJU BERSAMA 8	10 org	0	9	1	0	0

Sumber : Wawancara dengan pengurus KUBE sasaran (data telah diolah)

i. Penyusunan Laporan Kegiatan

Laporan kegiatan yang telah di laksanakan adalah merupakan wujud pertanggung jawaban Dinas Sosial Provinsi dalam penggunaan dana dekonsentrasi. Atas dasar laporan tersebut Pemerintah Pusat akan mendapat bahan masukan dan mengevaluasi kegiatan di daerah, pertimbangan memberikan *fanismen* atau *reward* kepada daerah, serta sebagai bahan dasar dan informasi hasil pemberdayaan.

Laporan pelaksanaan kegiatan implementasi bantuan terhadap KUBE seyogyanya dibuat secara berjenjang, mulai dari KUBE sasaran, pendamping desa, pendamping kecamatan, hingga pendamping kabupaten yang di tujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten dengan tembusan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial. Selanjutnya laporan diteruskan ke Kementerian Sosial RI. Laporan disusun secara berkala mulai dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.

Walaupun Kepala Bidang Sosial Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sukamara menyatakan laporan kegiatan disampaikan secara lengkap dan lancar, namun kenyataannya seluruh KUBE sasaran yang ada di Desa Natai Sedawak tidak ada yang membuat laporan. Alasannya beragam, antara lain karena tidak pernah mendapat bimbingan, tidak pernah diminta, dan menganggap pembuatan laporan tersebut adalah tanggung jawab pendamping. Dalam hal ini informan 7 menyatakan :

“tidak, itukan sebenarnya masalah pembuatan laporan di Sedawak ini kan sebenarnya ada pendamping (Loyola Hengki), kalo mengajukan lagi kan harus beliau yang ngajukan.”

j. Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Pengembangan KUBE

Bimbingan teknis kewirausahaan diberikan kepada penerima bantuan dalam rangka untuk menambah wawasan, keterampilan dan meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Bimbingan teknis diberikan mulai dari bagaimana cara melakukan pembukuan pengelolaan keuangan, melakukan analisis terhadap usaha yang sedang dijalankan, sampai pada bagaimana memelihara ternak sapi yang baik agar dapat berkembang sebagaimana harapan. Secara spesifik bimbingan teknis kewirausahaan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Agar para KBS mengetahui tata cara berwirausaha dan mampu melaksanakan wirausaha yang baik dan benar.
- 2) Agar para KBS mempunyai kemampuan dan kemauan mengembangkan bantuan yang di terimanya.
- 3) Agar para KBS mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi KUBE yang baik dan benar.

Bimbingan teknis yang dilakukan dengan baik akan sangat membantu kelompok dalam memahami setiap usaha yang dilakukan. Kelompok dapat mengetahui sejak dini segala hambatan yang ada, dapat menangkap peluang, kelemahan dan kekuatan dalam berusaha.

Namun sayangnya sejauh ini bimbingan teknis itu tidak dilaksanakan terhadap KUBE sasaran. Hal ini diakui oleh informan 1 ketika peneliti bertanya apakah ada pelatihan bagi KUBE dalam menjalankan usaha. Demikian juga saat wawancara dengan anggota kelompok, semua informan mengamini bahwa tidak pernah dilakukan pelatihan dan bimbingan. Pernyataan informan 1 terkait masalah pelatihan sebagai berikut :

"Pelatihan untuk kelompok KUBE hanya dalam sosialisasi tu aja..... Kalau dari dinas kami memang untuk itu tidak ada. Kalau dari dinas lain saya tidak tahu."

Tidak adanya pelatihan dan bimbingan bagi kelompok dalam menjalankan usaha menyebabkan usaha kelompok berjalan apa adanya. Tidak ada inovasi dan kreatifitas lain yang menonjol untuk mempercepat jalannya usaha. Bahkan dari pengamatan peneliti, ternak sapi yang dimiliki kelompok dilepaskan secara liar di lahan padang rumput. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ternak tidak dapat dikontrol dengan baik dan tidak ada nilai tambah yang diperoleh.

2. Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Modal KUBE di Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara

Teori implementasi Merille S. Grindle menekankan pada 2 variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Variabel-variabel tersebut saling membatasi satu sama lain untuk menentukan berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan. Sebaik apapun isi kebijakan, keberhasilan implementasinya akan sangat bergantung sebaik apa dukungan lingkungan tempat kebijakan tersebut diimplemetasikan, begitu pula sebaliknya. Kedua variabel tersebut adalah **isi kebijakan (*content of policy*)** dan **konteks implemetasinya(*context of implementation*)**.

Dalam teori Grindle diuraikan bahwa proses implementasi kebijakan baru dapat dimulai jika tujuan dan sarannya telah disebutkan secara rinci. Kemudian program aksi kebijakan telah dirancang dengan baik dan didukung dengan alokasi dana yang cukup untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Menelaah implementasi kebijakan bantuan modal KUBE di atas, dari sudut pandang teori Grindle, sesungguhnya kebijakan tersebut telah dirancang secara baik.

Seperti tertera pada juknis kegiatan, tujuan dan sasaran kebijakan telah dirumuskan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

secara jelas. Program aksinyapun telah dirancang secara lengkap dengan menjelaskan masing-masing tujuan, sasaran, syarat sasaran dan pelaksanaannya secara tegas. Demikian juga terhadap dukungan dana, telah tegas menguraikan sumber pembiayaan, besaran dana, dan mekanisme pencairan. Dana operasional dalam kebijakan ini disebutkan didukung dari dana sharing kabupaten penerima bantuan.

Mesipun tujuan, sasaran, dan rencana aksi telah tersusun dengan baik, namun hasil penelitian di lapangan menunjukkan fakta bahwa implementasi kebijakan pemberian bantuan modal KUBE di Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara banyak mengalami hambatan. Faktor-Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut adalah :

a. Variabel isi kebijakan (*content of policy*)

1). Kepentingan kelompok sasaran

Kebijakan pemberian bantuan modal KUBE di Desa Natai Sedawak semula sangat didukung masyarakat keberadaannya. Bantuan modal ini dianggap sebagai peluang mereka untuk dapat menjalankan usaha yang diyakini dapat membantu tingkat perekonomian keluarga. Semua anggota yang direkrut ke dalam KUBE memberikan respon dan dukungan yang antusias, kecuali 1 orang bernama Pak Muhtar karena salah persepsi yang mengira bantuan merupakan pinjaman dari Bank. Walaupun proses pendataanya dinilai janggal, mereka tetap bersedia bergabung dengan cara memberikan foto copy KTP yang dimiliki. Namun dalam perjalanannya semakin dirasakan ketidakcocokan antar anggota kelompok.

Salah satu faktor yang kurang mengena dalam implementasi Program Bantuan KUBE di Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara ini adalah adanya ketidaksesuaian antara keinginan atau kecenderungan anggota KUBE dalam

bidang usaha yang ditentukan. Sebagian anggota KUBE ada yang kurang cocok dengan bidang usaha seperti yang sudah tertuang dalam proposal permohonan bantuan. Hal ini disebabkan karena keputusan usulan bidang usaha tersebut tidak melalui mekanisme yang seharusnya.

Sebagaimana diketahui, dari 8 kelompok KUBE di Desa Natai Sedawak, semuanya mengusulkan bidang usaha peternakan, yaitu ternak sapi sebagai pilihan usahanya. Dari total 80 orang anggota KUBE yang terbagi ke dalam 8 kelompok, sebanyak 24 orang (30%) berlatar belakang sebagai petani, 14 orang (17,5%) berlatar belakang sebagai pekebun, dan hanya 8 orang saja (10%) yang memiliki latar belakang sebagai peternak, sedangkan sisanya (42,5%) berprofesi lain seperti pedagang, PNS, honor kontrak petugas kebersihan pemda dan profesi lainnya. Bahkan data juga menunjukkan bahwa ada 5 kelompok yang sama sekali tidak memiliki anggota yang berprofesi sebagai peternak. Dengan latar belakang yang demikian itu, kesediaan kelompok untuk berusaha di bidang peternakan (sapi) merupakan sesuatu yang patut dipertanyakan.

Keputusan mengenai bidang usaha tersebut ternyata hanya ditentukan oleh segelintir orang saja (ada yang menyebutkan ditentukan oleh pendamping desa), dan tidak melibatkan permusyawaratan seluruh anggota. Hal ini menyebabkan adanya ganjalan dan ketidakcocokan yang pada akhirnya memicu beberapa anggota kelompok untuk tidak aktif dan bahkan ada yang keluar. Hal ini terlihat hampir merata di setiap kelompok, di mana dalam perjalanannya ada anggota yang tidak aktif dan bahkan ada yang mengundurkan diri sehingga jumlah anggota yang semula 10 orang setiap kelompok menjadi berkurang.

Bahkan ada satu kelompok yang keanggotaannya hanya tersisa sebanyak 3 orang saja.

Secara keseluruhan anggota yang merasa tidak cocok dan pesimis dengan usaha yang dijalankan sehingga akhirnya memilih mundur sebanyak 32 orang (40%) yang tersebar pada semua kelompok. Akibatnya tujuan untuk memberdayakan 80 KK keluarga miskin tidak akan tercapai. Di samping itu, tingkat kekompakan anggota kelompok yang masih bertahan pun relatif rendah. Hal ini diakui oleh beberapa orang anggota kelompok tersebut dengan melihat realitas rendahnya tingkat kehadiran dalam pertemuan kelompok, pemenuhan kewajiban mencari makan ternak, membayar iuran dan lain-lain.

2). Kedudukan pengambil keputusan

Jika ditinjau dari proses rekrutmen keluarga miskin calon penerima bantuan, keputusan akhir di tingkat kabupaten sebenarnya berada pada Dinas Sosnakertrans melalui Kepala Bidang Sosial dan kasinya. Instansi ini mempunyai kewenangan penuh untuk merekomendasikan nama-nama yang akan mendapat bantuan ke provinsi. Namun pada kenyataannya kewenangan ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam proses pendataan, dinas justru menyerahkan kewenangannya kepada pendamping desa. Hal ini diakui oleh seluruh anggota KUBE yang diwawancarai. Akibat penyerahan wewenang yang tanpa kontrol memadai ini menyebabkan faktor subyektif pendamping desa menjadi dominan, akibatnya adalah terjadinya salah sasaran dalam penentuan keluarga miskin. Beberapa indikasi yang membuktikan hal tersebut adalah tidak meratanya pemberian bantuan, termuatnya nama-nama yang tidak sesuai kriteria ke dalam

kelompok, dan lain-lain. Banyak keluarga miskin yang ditetapkan sebagai KBS tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Anggota KUBE yang diwawancarai menyebut mereka pilih kasih dan mengutamakan keluarga, akibatnya bantuan tidak merata.

Hal yang sama juga terjadi pada rekrutmen pendamping sosial. Pendamping sosial tidak direkrut melalui mekanisme yang memadai. Hal ini terjadi karena tim koordinasi (sebagai tim penilai) di tingkat provinsi hanya menerima begitu saja daftar usulan yang disampaikan oleh Dinsos kabupaten. Dari fenomena ini diketahui bahwa keputusan akhir dari penentuan pendamping sosial yang ditugaskan/dipercaya untuk mendampingi kelompok faktanya berada pada Dinsos kabupaten, bukan pada Dinsos provinsi. Akibatnya tidak didapatkan kualifikasi pendamping sebagaimana harapan. Ditambah lagi pendamping sosial tidak mendapatkan pembekalan yang memadai.

Pada sisi lain, kegiatan KUBE sebenarnya menekankan pada kebersamaan dari seluruh anggota kelompok, baik dalam tahap penyusunan rencana-rencana kegiatan, tahap pengambilan keputusan, maupun tahap pelaksanaan keputusan. Dengan kebersamaan tersebut diharapkan semua anggota kelompok menjadi subjek yang bertanggungjawab sepenuhnya atas tindakan-tindakan kelompok.

Pada kenyataannya, proses pengambilan keputusan di KUBE Nantai Sedawak belum mencerminkan prinsip kebersamaan. Di satu sisi, masih ada kecenderungan sikap pasif pada sebagian masyarakat miskin, apalagi yang taraf pendidikannya relatif rendah, sedang di sisi lain, fasilitator dan pendamping yang ada tidak berupaya untuk mendorong sikap aktif partisipatif dari kelompok

masyarakat ini. Dengan demikian, keputusan-keputusan kelompok cenderung terletak pada pihak-pihak tertentu dan segelintir orang saja, meskipun dimintakan kesepakatan seluruh anggota kelompok.

Dalam jangka pendek, hal ini memang menghindarkan terjadinya perselisihan dalam pembahasan yang panjang dan bertele-tele sehingga menghemat waktu dan tenaga, tetapi dalam jangka panjang akan memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan iklim kebersamaan kelompok.

Proses pengambilan keputusan penentuan calon KRS (kelompok sasaran), penetapan pendamping sosial dan penentuan jenis usaha kelompok yang tidak memenuhi standar mekanisme yang telah ditetapkan menyebabkan proses implementasi kegiatan tidak berjalan secara efektif. Akibatnya keputusan yang diambil tidak sesuai harapan karena sangat bergantung pada kepentingan pengambil keputusan dan situasi setempat. Hal ini sesuai dengan pendapat Grindle yang menyatakan bahwa semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan akan semakin sulit pula implementasinya.

3). Pelaksana kebijakan

Menurut pengamatan peneliti, implementasi kebijakan pemberian bantuan modal terhadap KUBE belum didukung oleh pelaksana yang profesional dan memiliki komitmen yang memadai. Asumsi ini tercermin ketika peneliti melakukan wawancara kepada informan 1. Sebagai Kepala Bidang Sosial, informan 1 belum cukup mengerti terhadap program yang sedang dijalankan. Informan 1 menganggap bahwa bantuan terhadap KUBE ini adalah sebagai pengganti program BLT pemerintah. Ketika ditanyakan apakah ada SOP dalam

pelaksanaan kegiatan, informan 1 justru bingung. Dalam wawancara yang dilakukan, informan 1 menyatakan sebagai berikut :

“Yaa... boleh dikatakan ini pengganti. Pengganti BLT. Cuma perbedaannya, BLT dilaksanakan oleh Pemerintah.... Nah kalau KUBE itu berbentuk kelompok usaha yang bersama yang melalui rekening kelompok masing-masing....”

Dalam rangka menunjang keberhasilan kelompok, informan 1 merasa tidak perlu untuk melakukan pembinaan dan pelatihan, melibatkan instansi lain dan badan usaha swasta, karena memang tidak ada dana dan petunjuk untuk itu. Padahal hal-hal yang demikian sangat mungkin untuk dilakukan oleh dinas dalam rangka menyelamatkan modal yang telah dikucurkan. Informan 1 menyatakan :

“Untuk sementara ini kita belum ada. Kami memang pernah saat sosialisasi kemarin di propinsi, mengusulkan kepada mereka yang punya usaha seperti lahan sawit dan sebagainya yang berada di daerah kita untuk bisa membantu usaha kita ini pada masyarakat, namun jawaban dari perusahaan belum ada petunjuk dan juknis dalam hal ini.”

Demikian juga dalam hal keterlibatan aparat desa setempat. Dinas sama sekali tidak melibatkan mereka. Padahal aparat desa lah lembaga resmi negara yang paling dekat dengan kelompok sasaran, sehingga mereka dapat memantau perkembangannya setiap saat. Dalam hal ini informan 1 menyatakan :

“Peran RT dan Lurah itu hanya dalam pendataan. Setelah itu tidak ada lagi keterlibatan mereka. Pendampingan tidak ada, pemantauan juga sudah ada dari pendamping desanya.”

Pendampingan dan pemantauan kelompok semestinya tidak boleh hanya mengadakan peran pendamping desa, apalagi jika tingkat pengetahuan dan komitmennya relatif rendah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan hampir semua informan dari kelompok yang menyatakan bahwa pendamping desa tidak pernah

datang berkunjung. Kalaupun ada, intensitasnya sangat rendah dan hanya dilakukan sekedarnya tanpa aktifitas yang memadai.

Agar dapat berjalan dengan baik, implementasi kebijakan harus didukung oleh personil yang profesional dan mempunyai komitmen terhadap kebijakan tersebut. Hal ini tidak terlihat pada implementasi kebijakan pemberian bantuan modal KUBE di Desa Natai Sedawak. Tidak ada inovasi yang dikembangkan, tidak ada pembinaan dan pelatihan yang memadai dari petugas menyebabkan permasalahan yang muncul tidak dapat diselesaikan secara baik. Akibatnya usaha kelompok berjalan apa adanya, tidak ada nilai tambah, fungsi-fungsi keorganisasian kelompok tidak berjalan.

Teori Grindle dalam implementasi kebijakan menyebutkan bahwa manakala pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, maka tingkat keberhasilannya akan tinggi. Oleh karena itu rendahnya kemampuan dan komitmen petugas dalam implementasi pemberian bantuan modal KUBE di Desa Natai Sedawak tentu saja hal ini menjadi faktor penghambat pelaksanaan program.

4). Sumber daya yang disediakan

Untuk menunjang keberhasilan suatu program, ketersediaan sumber daya memegang peranan yang teramat penting. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup yang ditunjang dengan keahlian yang memadai akan sangat membantu perkembangan kelompok dalam menjalankan usahanya.

Jika ditinjau dari sisi jumlah SDM, kegiatan penganggulan kemiskinan perdesaan melalui bantuan modal usaha KUBE di Desa Natai

Sedawak sudah cukup memadai. Terutama pada saat pendataan calon KBS, semua personil dikerahkan dan ditambah dengan pendamping desa untuk setiap desa sasaran. Namun dari sisi profesionalitas, masih perlu mendapat perhatian dikemudian hari.

Dari sisi dukungan dana modal usaha kelompok yang diberikan kepada KUBE sasaran sesungguhnya sudah cukup untuk memulai sebuah usaha. Dimana dana yang diberikan sebesar 20 juta per kelompok tentu sudah diperhitungkan dengan matang jenis usaha apa yang akan dijalankan. Hasil wawancara dengan para anggota KUBE, rata-rata mereka mengakui bahwa bantuan yang diberikan sudah cukup memadai untuk menjalankan usaha. Mereka memiliki komitmen keperluan lain yang berkaitan dengan operasional kelompok mereka tanggulangi dengan cara iuran kelompok, misalnya untuk transportasi pembelian bibit, pembuatan kandang, rapat dan lain-lain. Adanya kesepakatan iuran kelompok ini seperti dinyatakan oleh informan 3 :

“Ya cari rumput itu, bikin kandang. Beli seng, kan perlu biaya, itu iuran. Diluar yang 20 juta itu.”

Suatu program pemberdayaan sosial terhadap keluarga miskin hendaknya didukung dengan ketersediaan dana operasional yang memadai. Dengan dana operasional yang cukup memungkinkan petugas leluasa melakukan inovasi dalam pembinaan dan pelatihan terhadap kelompok sasaran. Namun dari sisi dukungan dana ini, tidak disiapkan dana mendukung pelaksanaan operasional di lapangan. Akibatnya implementator tidak dapat melaksanakan bimbingan dan pelatihan keterampilan bagi semua anggota dan pendamping karena alasan keterbatasan anggaran. Saat ini sosialisasi pun hanya terbatas pada ketua, sekretaris dan bendahara, tidak melibatkan semua anggota kelompok. Realitas ini

tentu saja menjadi penghambat dalam banyak hal pada implementasi kebijakan, sesuai dengan teori Grindle yang menyatakan bahwa tersedianya sumber daya yang dibutuhkan seperti tenaga kerja, keahlian, dana dan sarana akan mempermudah implementasi kebijakan.

b. Variabel Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)

1). Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Pada tingkatan Dinas Sosnakertans Kabupaten Sukamara, peneliti tidak melihat adanya *konflik of interest* pada personil yang terlibat. Semua dari mereka lakukan semata-mata untuk mensukseskan pelaksanaan program. Usulan calon KBS sasaran mereka sampaikan ada adanya. Tidak ada titipan atau campur tangan dalam hal ini. Ketika dalam wawancara peneliti menanyakan apakah dalam penentuan KBS sasaran mereka perlu konsultasi kepada atasan, informan 2 menyatakan sebagai berikut :

“Tidak. Kita ini sudah punya data masalah itu, jadi kalo ada kekurangan tinggal nyari kekurangan itu.”

Adanya faktor kepentingan justru terlihat pada aparat desa setempat. Karena adanya hubungan keluarga, kuat dugaan pendamping desa bekerja sama dengan aparat desa untuk mengakomodir kepentingan mereka. Hal ini terbukti dengan adanya pengakuan dari beberapa informan bahwa telah terjadi bantuan yang tidak merata dan berulang-ulang pada orang yang sama, adanya anak berusia 12 tahun yang masuk anggota, masuknya istri kades dalam daftar, dan banyaknya orang yang tidak memenuhi kriteri dalam kelompok.

Kepentingan para aparat desa dan sekelompok orang juga terlihat nyata pada saat penentuan jenis usaha yang akan dijalankan. Jenis usaha ditentukan sama, padahal potensi kelompok mereka berbeda satu sama lain. Hal ini lambat laun menimbulkan kekecewaan bagi sebagian anggota kelompok sehingga mereka memilih mundur dari keanggotaan.

Masuknya kepentingan aparat desa dan pendamping desa dalam proses pendataan menyebabkan keluarga miskin yang ditetapkan menjadi kurang tepat. Sehingga tujuan semula bantuan modal KUBE untuk memberdayakan keluarga miskin menjadi terganggu. Hal ini membuktikan pendapat Grindle bahwa kekuasaan dan kepentingan serta strategi aktor yang terlibat dapat membuat implementasi berjalan baik atau tidak.

2). Tingkat Kepatuhan dan Responsivitas Kelompok Sasaran

Dilihat dari sisi kepatuhan, tidak semua anggota mau menjalankan kewajiban dan kesepakatan kelompok. Mereka tidak tahu-menahu akan kewajiban membuat laporan, sehingga tidak ada satupun kelompok yang membuat laporan. Padahal laporan akan sangat bermanfaat untuk mengetahui tingkat perkembangan usaha dan aktifitas kelompok. Laporan juga diperlukan untuk keperluan evaluasi. Namun kewajiban membuat laporan tersebut tidak dijalankan, kebanyakan dari mereka bersikap pasif, hanya menunggu respon dari dinas dan pembimbing. Demikian juga komitmen untuk menjalankan kesepakatan kelompok, masih sangat rendah. Banyak diantara anggota kelompok yang tidak dapat menunaikan kewajiban iuran, tidak hadir ketika diundang rapat dan gotong royong, walaupun ada kesepakatan akan dikenakan denda.

Upaya kelompok untuk meningkatkan keterampilan juga tidak terlihat. Ketua kelompok atau anggota yang merasa memiliki pengetahuan lebih enggan untuk melakukan transfer ilmu dan pengetahuan. Akibat dari semua ini adalah, yang lebih menonjol aktifitas individu, bukan aktifitas kelompok seperti digariskan dalam juknis.

Hasil pengamatan di lapangan diperoleh fakta bahwa banyak anggota yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban walaupun telah disepakati dalam rapat. Di sisi lain banyak pula dijumpai anggota kelompok yang tidak pernah hadir ketika diundang rapat, bahkan sebanyak 40% anggota kelompok yang memilih mengundurkan diri. Padahal sesuai dengan teori Grindle bahwa kepatuhan kelompok sasaran sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu program. Respon kelompok sasaran yang rendah ini menjadi hambatan dalam perkembangan usaha dan aktifitas KUBE di Desa Natai Sedawak.

3. Faktor-Faktor yang Mendukung Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Modal KUBE di Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara

a. Variabel isi kebijakan (*content of policy*)

1). Tipe manfaat yang akan diterima

Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat terutama anggota KUBE adalah antara lain dapat meningkatkan kemampuan anggota dalam pemanfaatan peluang ekonomi melalui kegiatan ekonomis-produktif, meningkatkan taraf keberdayaan mereka sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab sosial.

Pada dasarnya, kegiatan-kegiatan KUBE memang dapat meningkatkan keterikatan sosial antar anggotanya melalui interaksi dan pertemuan-pertemuan meskipun tidak rutin. Beberapa permasalahan yang menghambat, yaitu ketidakaktifan sebagian warga/anggota kelompok, bimbingan dan pembinaan yang dirasa kurangnampaknya tidak mempengaruhi semangat anggota lain yang masih bertahan. Anggota kelompok yang masih aktif tetap melakukan perawatan terhadap ternak sapi yang dimiliki. Mereka tidak menghiraukan ketidakaktifan anggota yang lain karena mereka merasa yakin bahwa usaha mereka akan berhasil. Dengan suka rela mereka tetap mencari rumput untuk keperluan pakan ternak setiap hari. Mereka berfikiran positif bahwa teman lain yang tidak aktif kemungkinan karena mereka memiliki kesibukan lain. Beberapa kelompok yang sampai saat ini telah menunjukkan hasil adalah KUBE Maju Bersama 3, Maju Bersama 5, Maju Bersama 7, dan KUBE Maju Bersama 8. Padahal jumlah anggota yang aktif pada kelompok tersebut rata-rata hanya 6 orang dari semula 10 orang (Tabel 4.13 dan Tabel 4.14).

Dari fenomena tersebut terlihat bahwa semangat dan keyakinan kelompok sasaran akan keberhasilan usaha yang dilaksanakan dapat mengenyampingkan faktor penghambat lain dalam implementasi kebijakan ini. Memang sasaran program yang semula bertujuan meningkatkan penghasilan 80 KK anggota KUBE tidak dapat tercapai secara keseluruhan, namun bagi anggota yang tetap memilih aktif sebanyak 48 orang (60%) program tersebut masih diyakini akan ada manfaatnya.

2). Jangkauan perubahan yang diinginkan

Pelaksanaan KUBE dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat dengan kegiatan ekonomi-produktif mandiri anggota kelompok. Pilihan usaha beternak sapi tentu saja membawa konsekuensi keuntungan yang dirasakan adalah dalam jangka panjang. Bagi anggota yang memiliki sumber pendapatan cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari, keuntungan yang baru bisa dirasakan dalam jangka panjang itu tidak begitu menjadi persoalan. Namun bagi anggota kelompok yang tidak memiliki sumber penghasilan lain yang cukup, kebutuhan mereka akan keuntungan jangka pendek lebih besar. Keuntungan yang baru bisa dirasakan setelah jangka waktu tertentu akan menjadi keberatan mereka.

Dalam hal ini, anggota-anggota yang terus aktif dan bertahan masih memiliki keyakinan akan keuntungan yang akan mereka rasakan di masa depan, seiring dengan pertambahan jumlah ternak yang mereka pelihara. Bantuan modal KUBE yang diberikan diyakini oleh sebagian besar KBS sasaran akan memberikan perubahan kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu mereka tetap memilih untuk meneruskan usaha peternakan sapi mereka walaupun dengan keterampilan seadanya. Hal ini sejalan dengan pendapat Grindle yang menyatakan bahwa semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan, maka implementasi kebijakan biasanya akan semakin sulit dilaksanakan, demikian sebaliknya

b. Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)

1). Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Program pemberdayaan seperti pemberian bantuan modal usaha KUBE sangat dinantikan oleh masyarakat miskin. Oleh karena itu maka pemberian bantuan modal usaha KUBE mendapat respon yang baik dari masyarakat sekitar, aparat desa, maupun kelompok sasaran. Sehingga semua tahapan dapat dilakukan dengan baik tanpa hambatan yang berarti. Secara administrasi, semua tahapan kegiatan, mulai dari tahap pendataan calon KBS, pembentukan kelompok, sosialisasi, penentuan jenis usaha, dan pencairan dana bantuan dapat berjalan dengan dukungan penuh dari masyarakat. Walaupun dari sisi kualitas pelaksanaannya masih perlu dievaluasi agar dapat diperbaiki dikemudian hari.

Karena mendapat dukungan penuh dari seluruh warga dan pemerintahan desa maka dari sisi implementasi program pemberian bantuan modal usaha KUBE di Desa Natai Sedawak tidak menimbulkan konflik kepentingan, oleh karenanya pelaksanaan kegiatan di lapangan secara teknis tidak banyak menemui hambatan. Hal ini sejalan dengan teori Grindle yang mengisyaratkan bahwa semakin kecil konflik kepentingan maka akan membuat implementasi kebijakan semakin mudah dilaksanakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Program bantuan modal KUBE di Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu dimulai dari tahap Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Fakir Miskin, Pembentukan Kelompok, Proses Sosialisasi, Penentuan Jenis Usaha, Tahap Pencairan Dana, dan Tindak lanjut Pembinaan dan Evaluasi.
2. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa hanya ada tiga tahapan yang sudah dilakukan dengan baik sesuai SOP/juknis yang ada, yaitu tahap Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Fakir Miskin, tahap perkerutan pendamping sosial dan Tahap Pencairan Dana. Sedangkan yang masih belum sesuai dengan ketentuan adalah tahap pembentukan kelompok, terutama pada tahap penentuan anggota kelompok sasaran penerima bantuan KUBE, sehingga ada anggota masyarakat yang tergabung dalam kelompok padahal seharusnya tidak termasuk dalam kriteria penerima bantuan. Pada tahap penentuan jenis usaha, mekanisme penentuannya tidak dilaksanakan berdasarkan potensi dan aspirasi serta kesepakatan seluruh anggota kelompok. Penentuan jenis usaha cenderung lebih merupakan kehendak satu pihak yang harus diterima dan disepakati oleh anggota kelompok. Tahap sosialisasi tidak menyentuh langsung sampai ke anggota kelompok, sehingga banyak anggota kelompok yang tidak tahu secara jelas program KUBE yang melibatkan mereka. Tahap pembinaan dan evaluasi juga belum dilaksanakan dengan baik. Setelah proses pencairan dan

- pemantauan penggunaan dana dilaksanakan, tidak ada lagi tindak lanjut dari pelaksana program yang bersifat pembinaan terhadap kelompok KUBE. Tindaklanjut yang ada sebatas pada monitoring kegiatan KUBE yang dilakukan oleh pendamping sekedarnya. Mekanisme evaluasi juga masih belum jelas pelaksanaannya. Dinas Sosnakertrans selaku pelaksana program dan dinas terkait juga tidak melakukan pelatihan dan bimbingan yang dapat menunjang kinerja kelompok dalam menjalankan usaha. Beberapa tahapan program yang dilaksanakan tidak sesuai ketentuan ini menimbulkan masalah yang menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan di lapangan.
3. Sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut Grindle, dari sisi **variabel isi kebijakan (*content of policy*)**, faktor-faktor yang menghambat pada implemetasi kebijakan pemberian bantuan modal KUBE di Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara adalah : 1). Kepentingan kelompok sasaran, 2). Kedudukan pengambil keputusan, 3). Pelaksana kebijakan, dan 4). Sumber daya yang disediakan. Sedangkan dari sisi Variabel **Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)**, faktor-faktor yang mengahambat adalah : 1). kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, dan 2). tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
 4. Faktor-faktor yang mendukung pada implemetasi kebijakan pemberian bantuan modal KUBE di Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara dari sisi **Variabel isi kebijakan (*content of policy*)** menurut Grindle adalah : 1). Tipe manfaat yang akan diterima, dan 2). jangkauan perubahan yang diinginkan. Sedangkan dari sisi variabel **Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)**, faktor yang mendukung adalah: 1). Karakteristik Lembaga dan Penguasa

B. SARAN-SARAN

1. Agar program pemberian bantuan modal KUBA tepat sasaran maka sebaiknya proses rekrutmen dan penentuan KBS penerima bantuan dilakukan secara ketat, transparan dan dievaluasi secara cermat.
2. Sesuai dengan mekanisme dan dinamika yang harus ditumbuh-kembangkan di dalam kelompok, penentuan jenis usaha kelompok harus didasarkan pada musyawarah seluruh anggota dengan mempertimbangkan potensi kelompok. Dalam hal ini petugas dan pendamping sosial hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator.
3. Pemerintah Daerah hendaknya mengalokasikan anggaran (*sharing*) untuk operasional di lapangan yang sifatnya dapat meningkatkan kemampuan, kerja sama, dan keahlian kelompok sasaran dan implementator. Misalnya pelaksanaan bimbingan pelatihan, monitoring, dan evaluasi.
4. Perlunya dilakukan peningkatan profesionalisme petugas (implementator) dan pendamping melalui pelatihan dan pendidikan dengan materi pengetahuan tentang penanganan keluarga miskin, pengetahuan manajemen usaha, pengembangan jaringan kerja dalam pemasaran hasil usaha.
5. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dengan intensif agar tiap kendala yang dihadapi dapat diantisipasi sedini mungkin.
6. Memperjelas koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait.
7. Perlu ditubuhkan kesadaran dan keterlibatan dunia usaha dan lembaga keuangan lokal dalam mendukung perkembangan usaha kelompok sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ahmad. 2009. Lembaga Keuangan Mikro dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 3, Tahun 2. Halaman 1-15.
- Ali, H. Faried, Andi Syamsu Alam, Sastro M. Wantu. 2012. *Studi Analisa Kebijakan. Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*. Bandung : Refika Aditama.
- Barlinti, Yeni Salma. 2007. Kebijakan-Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Lex Jurnalica*. Vol 4, No. 3. Halaman 158-167.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Sukamara. 2009. *Data Penduduk Miskin di Kabupaten Sukamara tahun 2009*.
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Sukamara. 2011. *Sukamara dalam Angka*.
- Biro Pusat Statistik. 2012. *Berita Resmi Statistik*. No. 06/01, Th. XV.
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Sukamara. 2013. *Sukamara dalam angka tahun 2013*.
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Sukamara. 2013. *Potensi Desa Kabupaten Sukamara tahun 2013*.
- Cahyaningtyas, Niken Wahyu. 2008. Pengaruh Pemberian Pinjaman Modal Kerja Bergulir Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Terhadap Pengembangan Usaha Masyarakat. *Sosekhum*. Vol 4, No. 5. Halaman 52-58.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- _____, 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: ElexMedia Komputindo
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press.

- Hikmat, Harry & Tumpal Saragih. 2005. *Panduan Umum Program Pemberdayaan Fakir Miskin*. Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Hidayat, L. Misbah. 2007. *Reformasi Administrasi, Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*. Jakarta: Gramedia
- Inu K. Syafiie, dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Islamy, M. Irfan, 1997, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Bumi Aksara.
- Miles and Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Ui Press. Jakarta.
- Makinuddin & Sasongko, Tri H. 2006. *Analisis Sosial: Bersaksi dalam Advokasi Irigasi*. Bandung: Yayasan Akatiga
- Masduki. 2007. *Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal*. Yogyakarta: LkiS
- Mustopadidjaja, AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LkiS.
- Ruhadi & Adrian. 2008. Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Serambi*. Vol. 5, No. 2. Halaman 80-85.
- Subarsono, AG., 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Fajar.
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Cetakan kelima. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika.

Suparjan, dan Suyatno. 2003. Pengembangan masyarakat: dari pembangunan sampai pemberdayaan. Aditya Media.

Tangkilisan, Hersel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Jakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

Umar, Husein. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta: Gramedia

Wahab, Abdullah, 2004, *Analisis Kebijakan dari Formula Keimplementasian Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.

Wahab, Solichin. A., 2012. *Analisis Kebijakan. Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.

Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta, PT. Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar 1945.

UU Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.

Keputusan Presiden RI Nomor 124 tahun 2001 dan Nomor 8 tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan.

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 84 Tahun 1997

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/PENGHUK/2002 tentang penanggulangan kemiskinan.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kalimantan Tengah Tahun 2012,

Situs Internet:

id.wikipedia.org/wiki/Administrasi_publik

tnp2k.go.id/?q=strategi_percepatan_penanggulangan_kemiskinan

(<http://appifrend.wordpress.com/2011/12/25/makalah-masalah-kemiskinan-dan-penanggulangannya>)

file:///G:/download/ implementasi-kebijakan-george-edward.htm) :

file:///G:/download/url-1.htm)

Karya Ilmiah :

Puji Meilita Sugiana, 2012. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan. Jakarta. Universitas Indonesia

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA IMPLEMENTATOR

1. Latar belakang kebijakan program Kelompok Usaha Bersama di Sukamara ini apa? Apakah ada faktor lain selain kemiskinan?
2. Terus tujuan, dan manfaatnya apa?
3. Sasaran Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama apa?
4. Bagaimana tahapan atau proses awal yang dilakukan sebelum Kelompok Usaha Bersama dibentuk?
 - Apakah ada pendataan?
 - Siapa yang melakukan?
5. Dalam pelaksanaan apakah ada *Standard Operating System* (SOP) yang dibuat untuk pelaksanaan program ini?
6. Apa saja kegiatan pengelolaan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama yang disediakan oleh dinsos? Apa saja jenis-jenis usahanya?
7. Berapa besar dana KUBE yg diberikan kepada anggota bu?
8. Bagaimana perkembangan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama di Sukamara?
9. Siapa saja yang terkait dalam pelaksanaan KUBE ini, selain dinas sosial dan pendamping?
10. Kalau pendamping, apa saja kegiatannya selama KUBE menjalankan usahanya?
 - Berapa lama pendampingan itu dilaksanakan?
 - Dari mana dinas dapat mengetahui keaktifan pendamping dalam menjalankan tugasnya
11. Selama ini, anggota KUBE dapat Pelatihan serta pendampingan seperti apa untuk usaha mereka?
12. Desa mana yang dipandang oleh dinas sosial yang perkembangannya cukup baik?
13. Bagaimana kekuatan (*strength*) dari program Kelompok Usaha Bersama di Sukamara bu?
14. Apakah ada kegiatan sosialisasi untuk program Kelompok Usaha Bersama ini?
 - Apa saja yang disampaikan dalam sosialisasi?
 - Siapa saja yang diundang?
 - Apakah peserta yang hadir dapat menangkap materi yang disampaikan?
15. Bagaimana dengan mekanisme pelaporan kegiatan Kelompok Usaha Bersama?
 - Apakah mereka wajib membuat laporan? Berapa kali?
 - Bagaimana keaktifan KUBE menyampaikan laporannya?
16. Hambatan dari pelaksanaan kebijakan program Kelompok usaha bersama yang lain ada gak?
17. Harapan kedepannya untuk Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama di Sukamara apa?

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA PESERTA KUBE

1. Sejak kapan bergabung dalam kelompok?
2. Bagaimana awal mula KUBE terbentuk?
3. Latar belakang ikut dalam kegiatan usaha bersama ini apa?
 - Diajak/didata
 - Melalui pengumuman
 - Mendaftar
4. Waktu pertama kali gabung di KUBE, apakah ada biaya yang harus dikeluarkan gak?
5. Kelompok menjalankan usaha apa? Usaha itu atas kesepakatan bersama atau bagaimana?
 - Pendapatannya gimana dari hasil usaha ini?
6. Anggota kelompok berapa orang? Apakah aktif semua?
 - Apakah ada sosialisasi?
 - Bagaimana menyusun laporan?
 - Yang gak aktif itu biasanya kenapa?
7. Apa pekerjaan anggota sebelum bergabung dalam KUBE?
 - Berapa penghasilan selama bekerja?
 - Apakah setelah ada KUBE penghasilan meningkat?
8. Setelah sekian lama berjalan, apa manfaat yang dirasakan dari kegiatan ini?
9. Apakah anggota kelompok pernah mengadakan pertemuan? kapan?
10. Fungsi dan keaktifan pendamping?
 - Apakah pendamping pernah turun?
11. Selama ada disini, pelatihan apa saja yang didapatkan anggota?
12. Tentang keterampilan bagaimana?
13. Apakah kegiatan sudah membantu perekonomian selama ini?
14. Apakah dalam kelompok diatur hak dan kewajibannya?
15. Selama bergabung di KUBE, hambatan apa saja yang dirasakan?
16. Apa harapan untuk usaha di Kelompok Usaha yang diikuti?

**KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) PENUMBUHAN
KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERDESAAN
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2012**

KUBE MAJU BERSAMA I (Desa Natal Sedawak Kecamatan Sukamara)

	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	TASRIPIN	Ketua	Desa Natal Sedawak
2	TAJUDIN	Sekretaris	Desa Natal Sedawak
3	SAJMAN	Bendahara	Desa Natal Sedawak
4	DOYOK	Anggota	Desa Natal Sedawak
5	TRESNO	Anggota	Desa Natal Sedawak
6	SUWARNI	Anggota	Desa Natal Sedawak
7	HADI SETIAWAN	Anggota	Desa Natal Sedawak
8	SUNARSIH	Anggota	Desa Natal Sedawak
9	SILIP	Anggota	Desa Natal Sedawak
10	MUHAMAD FAUZAN	Anggota	Desa Natal Sedawak

KUBE MAJU BERSAMA 2 (Desa Natal Sedawak Kecamatan Sukamara)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	UMPI	Ketua	Desa Natal Sedawak
2	ANIN	Sekretaris	Desa Natal Sedawak
3	JAINURI	Bendahara	Desa Natal Sedawak
4	EMPOY	Anggota	Desa Natal Sedawak
5	MARDI NAWIS	Anggota	Desa Natal Sedawak
6	TAWANG	Anggota	Desa Natal Sedawak
7	JAINI	Anggota	Desa Natal Sedawak
8	WAGINO	Anggota	Desa Natal Sedawak
9	SUKARMA	Anggota	Desa Natal Sedawak
10	MISDI SAAL	Anggota	Desa Natal Sedawak

KUBE MAJU BERSAMA 3 (Desa Natal Sedawak Kecamatan Sukamara)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	SURYADI	Ketua	Desa Natal Sedawak
2	SUNAR	Sekretaris	Desa Natal Sedawak
3	RUDI HARTONO	Bendahara	Desa Natal Sedawak
4	CHAN TO NYAN	Anggota	Desa Natal Sedawak
5	A'U	Anggota	Desa Natal Sedawak
6	ANDI	Anggota	Desa Natal Sedawak
7	INDRAWENI	Anggota	Desa Natal Sedawak
8	MIRA MAYA	Anggota	Desa Natal Sedawak
9	DIKI	Anggota	Desa Natal Sedawak
10	SULASTRI	Anggota	Desa Natal Sedawak

KUBE MAJU BERSAMA 4 (Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	ALI WARDANA	Ketua	Desa Natai Sedawak
2	SUHADI	Sekretaris	Desa Natai Sedawak
3	JAELANI	Bendahara	Desa Natai Sedawak
4	IPIN	Anggota	Desa Natai Sedawak
5	IRI	Anggota	Desa Natai Sedawak
6	SUJANA	Anggota	Desa Natai Sedawak
7	NANANG	Anggota	Desa Natai Sedawak
8	ASNAWI	Anggota	Desa Natai Sedawak
9	EGNALIUS YADI DT	Anggota	Desa Natai Sedawak
10	SURIYADI	Anggota	Desa Natai Sedawak

KUBE MAJU BERSAMA 5 (Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	MUHTAR	Ketua	Desa Natai Sedawak
2	ALI	Sekretaris	Desa Natai Sedawak
3	SINURDIN	Bendahara	Desa Natai Sedawak
4	TONO	Anggota	Desa Natai Sedawak
5	ASRUDI	Anggota	Desa Natai Sedawak
6	SIMAR	Anggota	Desa Natai Sedawak
7	LAKSANA PARDI	Anggota	Desa Natai Sedawak
8	HAMRANI WIDODO	Anggota	Desa Natai Sedawak
9	SURA	Anggota	Desa Natai Sedawak
10	SAHRIN	Anggota	Desa Natai Sedawak

KUBE MAJU BERSAMA 6 (Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	HENGKI SUPRAPTO	Ketua	Desa Natai Sedawak
2	NASIP	Sekretaris	Desa Natai Sedawak
3	ELAN	Bendahara	Desa Natai Sedawak
4	SUNARDI	Anggota	Desa Natai Sedawak
5	NASRUDIN	Anggota	Desa Natai Sedawak
6	SYUKRAN	Anggota	Desa Natai Sedawak
7	DIDIK SANTOSO	Anggota	Desa Natai Sedawak
8	DARMAWATI	Anggota	Desa Natai Sedawak
9	HENDRI SUSILO	Anggota	Desa Natai Sedawak
10	AHMAD SODIQ	Anggota	Desa Natai Sedawak

KUBE MAJU BERSAMA 7 (Desa Natal Sedawak Kecamatan Sukamara)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	YANTO S.	Ketua	Desa Natal Sedawak
2	SYAHWAN	Sekretaris	Desa Natal Sedawak
3	SUDARSONO	Bendahara	Desa Natal Sedawak
4	MUHAMMAD HASHFI	Anggota	Desa Natal Sedawak
5	WATI	Anggota	Desa Natal Sedawak
6	BETI	Anggota	Desa Natal Sedawak
7	GUNI	Anggota	Desa Natal Sedawak
8	KONOK	Anggota	Desa Natal Sedawak
9	MURAT	Anggota	Desa Natal Sedawak
10	NURYAMAMI	Anggota	Desa Natal Sedawak

KUBE MAJU BERSAMA 8 (Desa Natal Sedawak Kecamatan Sukamara)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	PONIDI	Ketua	Desa Natal Sedawak
2	YUNUS	Sekretaris	Desa Natal Sedawak
3	JOKO SANTOSO	Bendahara	Desa Natal Sedawak
4	DIDI HARDIANTO	Anggota	Desa Natal Sedawak
5	EFENDI SIREGAR	Anggota	Desa Natal Sedawak
6	ARBANI	Anggota	Desa Natal Sedawak
7	SURATMIN	Anggota	Desa Natal Sedawak
8	PARYONO	Anggota	Desa Natal Sedawak
9	SUBANDI	Anggota	Desa Natal Sedawak
10	LIPUNG	Anggota	Desa Natal Sedawak

KUBE KARTAMULIA JAYA 1 (Desa Kartamulia Kecamatan Sukamara)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	PARYONO	Ketua	Desa Kartamulia
2	SAIFUL	Sekretaris	Desa Kartamulia
3	YUDIANTO	Bendahara	Desa Kartamulia
4	DESER	Anggota	Desa Kartamulia
5	SUDARWATI	Anggota	Desa Kartamulia
6	ERTTI	Anggota	Desa Kartamulia
7	DESA	Anggota	Desa Kartamulia
8	SUKA	Anggota	Desa Kartamulia
9	CARA (D)	Anggota	Desa Kartamulia
10	HARIYADI SUWARTONO	Anggota	Desa Kartamulia

KUBE KARTAMULIA JAYA 2 (Desa Kartamulia Kecamatan Sukamara)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	USAI	Ketua	Desa Kartamulia
2	LUNAS	Sekretaris	Desa Kartamulia
3	MARDI	Bendahara	Desa Kartamulia
4	JURUS	Anggota	Desa Kartamulia
5	IRWAN	Anggota	Desa Kartamulia
6	AJAN	Anggota	Desa Kartamulia
7	ADIYA	Anggota	Desa Kartamulia
8	EMBOI	Anggota	Desa Kartamulia
9	AJIN	Anggota	Desa Kartamulia
10	KIMAN	Anggota	Desa Kartamulia

KUBE KARTAMULIA JAYA 3 (Desa Kartamulia Kecamatan Sukamara)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	NASIP	Ketua	Desa Kartamulia
2	KABAR	Sekretaris	Desa Kartamulia
3	PRIMA	Bendahara	Desa Kartamulia
4	RIPA	Anggota	Desa Kartamulia
5	RINYAP	Anggota	Desa Kartamulia
6	WARTO	Anggota	Desa Kartamulia
7	MARTIK	Anggota	Desa Kartamulia
8	MUNDUR	Anggota	Desa Kartamulia
9	SITA	Anggota	Desa Kartamulia
10	PAYA	Anggota	Desa Kartamulia

KUBE KARTAMULIA JAYA 4 (Desa Kartamulia Kecamatan Sukamara)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	AJIS	Ketua	Desa Kartamulia
2	ASEK	Sekretaris	Desa Kartamulia
3	JEPY	Bendahara	Desa Kartamulia
4	RUDA SETIAWAN	Anggota	Desa Kartamulia
5	DAYIM	Anggota	Desa Kartamulia
6	ELEN	Anggota	Desa Kartamulia
7	NILA	Anggota	Desa Kartamulia
8	AKENG	Anggota	Desa Kartamulia
9	NIAP	Anggota	Desa Kartamulia
10	JAMI	Anggota	Desa Kartamulia

KUBE KARTAMULIA JAYA 5 (Desa Kartamulia Kecamatan Sukamara)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	ISUR	Ketua	Desa Kartamulia
2	HIMBUR	Sekretaris	Desa Kartamulia
3	IRA	Bendahara	Desa Kartamulia
4	AHAD	Anggota	Desa Kartamulia
5	DIPUN	Anggota	Desa Kartamulia
6	ALI	Anggota	Desa Kartamulia
7	YULIA	Anggota	Desa Kartamulia
8	ELE	Anggota	Desa Kartamulia
9	PETRUS YANTO	Anggota	Desa Kartamulia
10	SITI AISYAH	Anggota	Desa Kartamulia

KUBE KARTAMULIA JAYA 6 (Desa Kartamulia Kecamatan Sukamara)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	SURI	Ketua	Desa Kartamulia
2	ABDUL AZIS	Sekretaris	Desa Kartamulia
3	UYAM	Bendahara	Desa Kartamulia
4	AMAD	Anggota	Desa Kartamulia
5	SUNARTI	Anggota	Desa Kartamulia
6	SALIM	Anggota	Desa Kartamulia
7	MUHTIB	Anggota	Desa Kartamulia
8	ANIAH	Anggota	Desa Kartamulia
9	MUHAMMAD RUDI	Anggota	Desa Kartamulia
10	MUNTAMI	Anggota	Desa Kartamulia

KUBE KARTAMULIA JAYA 7 (Desa Kartamulia Kecamatan Sukamara)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	ABON	Ketua	Desa Kartamulia
2	ADI	Sekretaris	Desa Kartamulia
3	SARMILA	Bendahara	Desa Kartamulia
4	MURA	Anggota	Desa Kartamulia
5	ANTRI	Anggota	Desa Kartamulia
6	ONOI	Anggota	Desa Kartamulia
7	NUNA	Anggota	Desa Kartamulia
8	RITA HARTATI	Anggota	Desa Kartamulia
9	OGEN	Anggota	Desa Kartamulia
10	MARDIANTO	Anggota	Desa Kartamulia

KUBE KARTAMULIA JAYA 8 (Desa Kartamulia Kecamatan Sukamara)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	SIYARDI	Ketua	Desa Kartamulia
2	IWAN CAHYADI	Sekretaris	Desa Kartamulia
3	TINEM	Bendahara	Desa Kartamulia
4	SUYANTO	Anggota	Desa Kartamulia
5	SAHUDI	Anggota	Desa Kartamulia
6	SURATI	Anggota	Desa Kartamulia
7	KISRO	Anggota	Desa Kartamulia
8	SURATMAN	Anggota	Desa Kartamulia
9	RATNO	Anggota	Desa Kartamulia
10	NIJAN	Anggota	Desa Kartamulia

KUBE SUKA JAYA 1 (Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	SUPARDI	Ketua	Desa Sukaraja
2	RUSMAYADI	Sekretaris	Desa Sukaraja
3	RAHMAN WAHID	Bendahara	Desa Sukaraja
4	SATU	Anggota	Desa Sukaraja
5	MUHAMMAD REDA	Anggota	Desa Sukaraja
6	NURDIN	Anggota	Desa Sukaraja
7	DIDI	Anggota	Desa Sukaraja
8	SUDIR	Anggota	Desa Sukaraja
9	ENJO HARTONO	Anggota	Desa Sukaraja
10	NOBON	Anggota	Desa Sukaraja

KUBE SUKA JAYA 2 (Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	EKO JOKO PURWANTORO	Ketua	Desa Sukaraja
2	RUDI HARTONO	Sekretaris	Desa Sukaraja
3	SIMON	Bendahara	Desa Sukaraja
4	ESON	Anggota	Desa Sukaraja
5	ROBINSON MAUKALING	Anggota	Desa Sukaraja
6	CINGKUN	Anggota	Desa Sukaraja
7	IKUS	Anggota	Desa Sukaraja
8	M. SUBUR	Anggota	Desa Sukaraja
9	SAPARUDIN	Anggota	Desa Sukaraja
10	UDIN HUSNI	Anggota	Desa Sukaraja

KUBE SUKA JAYA 3 (Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	BUDI	Ketua	Desa Sukaraja
2	RUDI SUHADA MUSTAPA	Sekretaris	Desa Sukaraja
3	LALI	Bendahara	Desa Sukaraja
4	NANANG JUHAIDIR	Anggota	Desa Sukaraja
5	PRABONO	Anggota	Desa Sukaraja
6	ALI	Anggota	Desa Sukaraja
7	IPUN	Anggota	Desa Sukaraja
8	DESMAN	Anggota	Desa Sukaraja
9	GADANG	Anggota	Desa Sukaraja
10	ADRIANUS AMAT	Anggota	Desa Sukaraja

KUBE MUNTAI MANDIRI 1 (Desa Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	SYAHRIL	Ketua	Desa Pangkalan Muntai
2	SURYA	Sekretaris	Desa Pangkalan Muntai
3	SUMIYATI	Bendahara	Desa Pangkalan Muntai
4	JANI M	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
5	SAMSIAR	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
6	SUGIAN	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
7	GUSTI TARLI	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
8	SUKIRMAN	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
9	MIS'AN	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
10	BAWEL	Anggota	Desa Pangkalan Muntai

KUBE MUNTAI MANDIRI 2 (Desa Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	RUSMAN	Ketua	Desa Pangkalan Muntai
2	JANI	Sekretaris	Desa Pangkalan Muntai
3	RUSLAN	Bendahara	Desa Pangkalan Muntai
4	SAMSURI	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
5	SUKRI	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
6	UJANG	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
7	SAMPURNA	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
8	IPI	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
9	RANDAMNIAH	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
10	SITI MUWARNI	Anggota	Desa Pangkalan Muntai

KUBE MUNTAI MANDIRI 3 (Desa Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	MASRUN	Ketua	Desa Pangkalan Muntai
2	TARKAN ISKANDI	Sekretaris	Desa Pangkalan Muntai
3	AHMAD KURNIAWI	Bendahara	Desa Pangkalan Muntai
4	HAWA LINAFSIYAH	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
5	HAPSAH	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
6	RUSLI	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
7	MASKUR	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
8	PEKO	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
9	HERMAN	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
10	RIYAH	Anggota	Desa Pangkalan Muntai

KUBE MUNTAI MANDIRI 4 (Desa Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	MAJERAN	Ketua	Desa Pangkalan Muntai
2	TASRIPIN	Sekretaris	Desa Pangkalan Muntai
3	AHMAD SAINI	Bendahara	Desa Pangkalan Muntai
4	ARNIAH	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
5	JARNI	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
6	RUSMILI	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
7	NURIYAH	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
8	YUSRAN	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
9	SELAN	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
10	BURHANSYAH	Anggota	Desa Pangkalan Muntai

KUBE MUNTAI MANDIRI 5 (Desa Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	GUSTI MAJEKUR	Ketua	Desa Pangkalan Muntai
2	KARNADI	Sekretaris	Desa Pangkalan Muntai
3	HERWAN	Bendahara	Desa Pangkalan Muntai
4	ANUAR	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
5	ASPARI	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
6	MUSTOFA	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
7	DAYAN	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
8	SARWANI	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
9	WILIJAH HARTONO	Anggota	Desa Pangkalan Muntai
10	MURJANI	Anggota	Desa Pangkalan Muntai

KUBE TUNAS NIBUNG 1 (Desa Pulau Nibung Kecamatan Jelai)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	JALI RAHMAN	Ketua	Desa Pulau Nibung
2	SUTOMO	Sekretaris	Desa Pulau Nibung
3	SYAHROL. M	Bendahara	Desa Pulau Nibung
4	FAHROJI	Anggota	Desa Pulau Nibung
5	DIDI AHMADI	Anggota	Desa Pulau Nibung
6	JURAINI	Anggota	Desa Pulau Nibung
7	HENDRA SURIANSYAH	Anggota	Desa Pulau Nibung
8	HABIBI	Anggota	Desa Pulau Nibung
9	KAMAROLLUDIN	Anggota	Desa Pulau Nibung
10	ROZI	Anggota	Desa Pulau Nibung

KUBE TUNAS NIBUNG 2 (Desa Pulau Nibung Kecamatan Jelai)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	HARKANI	Ketua	Desa Pulau Nibung
2	BUSTANIL ARIFIN	Sekretaris	Desa Pulau Nibung
3	SYAHWANI	Bendahara	Desa Pulau Nibung
4	IKSAN	Anggota	Desa Pulau Nibung
5	NOREL ANWAR	Anggota	Desa Pulau Nibung
6	HAMDANI	Anggota	Desa Pulau Nibung
7	MISRAN	Anggota	Desa Pulau Nibung
8	ADIARSA	Anggota	Desa Pulau Nibung
9	MUHAMMAD HAMDANI	Anggota	Desa Pulau Nibung
10	DARMANSYAH	Anggota	Desa Pulau Nibung

KUBE TUNAS NIBUNG 3 (Desa Pulau Nibung Kecamatan Jelai)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	ADANG	Ketua	Desa Pulau Nibung
2	PIAT SURIATNA	Sekretaris	Desa Pulau Nibung
3	ACEP HIDAYAT	Bendahara	Desa Pulau Nibung
4	WAWAN RIDWAN	Anggota	Desa Pulau Nibung
5	LIJANG ODRI	Anggota	Desa Pulau Nibung
6	LIJANG WITARSA	Anggota	Desa Pulau Nibung
7	KADI	Anggota	Desa Pulau Nibung
8	ASEP SOPIAN	Anggota	Desa Pulau Nibung
9	ADE SUPRIATNA	Anggota	Desa Pulau Nibung
10	WAGIMAN	Anggota	Desa Pulau Nibung

KUBE TUNAS NIBUNG 4 (Desa Pulau Nibung Kecamatan Jelai)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	KAMARUDIN	Ketua	Desa Pulau Nibung
2	MUHAMMAD AMIR	Sekretaris	Desa Pulau Nibung
3	SUKIRNO	Bendahara	Desa Pulau Nibung
4	AKHMAD MUJARI	Anggota	Desa Pulau Nibung
5	AHMAD	Anggota	Desa Pulau Nibung
6	ASNAWI	Anggota	Desa Pulau Nibung
7	AHMAD PEDRO	Anggota	Desa Pulau Nibung
8	SUDIRMAN	Anggota	Desa Pulau Nibung
9	SARDI	Anggota	Desa Pulau Nibung
10	MUKHLIS	Anggota	Desa Pulau Nibung

KUBE TUNAS NIBUNG 5 (Desa Pulau Nibung Kecamatan Jelai)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	MASHUR	Ketua	Desa Pulau Nibung
2	AHMAD MUBAROQ	Sekretaris	Desa Pulau Nibung
3	ASNAH	Bendahara	Desa Pulau Nibung
4	AJI MAULANI	Anggota	Desa Pulau Nibung
5	SUPARDI	Anggota	Desa Pulau Nibung
6	AHMAD EFFENDI	Anggota	Desa Pulau Nibung
7	NURAINI	Anggota	Desa Pulau Nibung
8	MUHAMMAD YUSUF	Anggota	Desa Pulau Nibung
9	BASTANI	Anggota	Desa Pulau Nibung
10	BERHASAN	Anggota	Desa Pulau Nibung

KUBE TUNAS NIBUNG 6 (Desa Pulau Nibung Kecamatan Jelai)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	EDI SUTIKNO	Ketua	Desa Pulau Nibung
2	AGUNG PRAYOGO	Sekretaris	Desa Pulau Nibung
3	KAMALUDIN	Bendahara	Desa Pulau Nibung
4	HUSNI	Anggota	Desa Pulau Nibung
5	EFENDI	Anggota	Desa Pulau Nibung
6	RUDI HARTONO	Anggota	Desa Pulau Nibung
7	USMAN DALEK	Anggota	Desa Pulau Nibung
8	TAJUDIN NOOR	Anggota	Desa Pulau Nibung
9	MARIAN	Anggota	Desa Pulau Nibung
10	KOMIDIT	Anggota	Desa Pulau Nibung

KUBE PANTAI BARU 1 (Desa Sungai Baru Kecamatan Jelai)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	AHMADI	Ketua	Desa Sungai Baru
2	MUHAMMAD JUNAIDI	Sekretaris	Desa Sungai Baru
3	RUSMIATI	Bendahara	Desa Sungai Baru
4	M. EFENDI	Anggota	Desa Sungai Baru
5	MUHAMMAD HATTA	Anggota	Desa Sungai Baru
6	HAMDI	Anggota	Desa Sungai Baru
7	AHMIDI	Anggota	Desa Sungai Baru
8	SAULI	Anggota	Desa Sungai Baru
9	MATDRIANI	Anggota	Desa Sungai Baru
10	RIDUANSYAH	Anggota	Desa Sungai Baru

KUBE PANTAI BARU 2 (Desa Sungai Baru Kecamatan Jelai)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	AHMAD SAYUDI	Ketua	Desa Sungai Baru
2	RASYATI	Sekretaris	Desa Sungai Baru
3	HALIPUL	Bendahara	Desa Sungai Baru
4	MULIYONO	Anggota	Desa Sungai Baru
5	ALI MULHAKIM	Anggota	Desa Sungai Baru
6	MAHDALENA	Anggota	Desa Sungai Baru
7	NUR HAYATI	Anggota	Desa Sungai Baru
8	MUHAMAD DANI	Anggota	Desa Sungai Baru
9	ASMIATI	Anggota	Desa Sungai Baru
10	YORDANIAH	Anggota	Desa Sungai Baru

KUBE PANTAI BARU 3 (Desa Sungai Baru Kecamatan Jelai)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	BUDI HARTOYO	Ketua	Desa Sungai Baru
2	SUNARDI	Sekretaris	Desa Sungai Baru
3	ANANG DARSOL	Bendahara	Desa Sungai Baru
4	MUHAMMAD SUHAIMI	Anggota	Desa Sungai Baru
5	HAMSAH	Anggota	Desa Sungai Baru
6	ASNATI	Anggota	Desa Sungai Baru
7	MUHAMMAD EFENDI	Anggota	Desa Sungai Baru
8	ARSAN	Anggota	Desa Sungai Baru
9	SINI WATI	Anggota	Desa Sungai Baru
10	HADIAH	Anggota	Desa Sungai Baru

KUBE SAHATI BERSAMA (Desa Sungai Bundung Kecamatan Jelai)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	MUHAMMAD SAINI	Ketua	Desa Sungai Bundung
2	SAIFUL BAHRI	Sekretaris	Desa Sungai Bundung
3	AHMAD DARMANI	Bendahara	Desa Sungai Bundung
4	AMAT	Anggota	Desa Sungai Bundung
5	NORHAYATI	Anggota	Desa Sungai Bundung
6	SUPIANTO	Anggota	Desa Sungai Bundung
7	ABDUL HAK	Anggota	Desa Sungai Bundung
8	ABDUL MUHIS	Anggota	Desa Sungai Bundung
9	SUMARNO	Anggota	Desa Sungai Bundung
10	HAMDAN	Anggota	Desa Sungai Bundung

KUBE BINA USAHA (Desa Sungai Bundung Kecamatan Jelai)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	FATHUR RAHMAN	Ketua	Desa Sungai Bundung
2	ABDUL HAKAM	Sekretaris	Desa Sungai Bundung
3	SYAIFUDIN	Bendahara	Desa Sungai Bundung
4	M. SADRIDIN AINI	Anggota	Desa Sungai Bundung
5	ALIBUN	Anggota	Desa Sungai Bundung
6	NUR HAYATI	Anggota	Desa Sungai Bundung
7	TONO PURWANTO	Anggota	Desa Sungai Bundung
8	HADRIANSYAH	Anggota	Desa Sungai Bundung
9	HANAPI	Anggota	Desa Sungai Bundung
10	ANANG TARMIDI	Anggota	Desa Sungai Bundung

KUBE KARYA BERSAMA (Desa Sungai Bundung Kecamatan Jelai)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	SUGIANTO	Ketua	Desa Sungai Bundung
2	RUDI HARJO	Sekretaris	Desa Sungai Bundung
3	RODIEF DAFI	Bendahara	Desa Sungai Bundung
4	SUGIARTO	Anggota	Desa Sungai Bundung
5	SUTRISNO	Anggota	Desa Sungai Bundung
6	TARYONO	Anggota	Desa Sungai Bundung
7	NANANG HAMIDIN	Anggota	Desa Sungai Bundung
8	NURJANAH	Anggota	Desa Sungai Bundung
9	ABDUL BASIR	Anggota	Desa Sungai Bundung
10	MUHAMMAD SORA	Anggota	Desa Sungai Bundung

KUBE HARAPAN BERSAMA (Desa Sungai Raja Kecamatan Jelai)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	ABDUL WAHAB	Ketua	Desa Sungai Raja
2	AHMAD MULIYADI MUHLAN	Sekretaris	Desa Sungai Raja
3	USMANTORO	Bendahara	Desa Sungai Raja
4	MUHAMMAD HATTA	Anggota	Desa Sungai Raja
5	SUPRIYONO	Anggota	Desa Sungai Raja
6	RUSLAN EFFENDI	Anggota	Desa Sungai Raja
7	ABDUL BASIT	Anggota	Desa Sungai Raja
8	HALIDAH	Anggota	Desa Sungai Raja
9	BAHRANI	Anggota	Desa Sungai Raja
10	SUHIRMANSYAH	Anggota	Desa Sungai Raja

KUBE MAJU BERSAMA (Desa Sungai Raja Kecamatan Jelai)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	M. JAILANI	Ketua	Desa Sungai Raja
2	ABDUL SAMAD	Sekretaris	Desa Sungai Raja
3	SYAHRUNI	Bendahara	Desa Sungai Raja
4	ALMAH	Anggota	Desa Sungai Raja
5	FIRMANSYAH	Anggota	Desa Sungai Raja
6	ISMANTO	Anggota	Desa Sungai Raja
7	RUJAINI	Anggota	Desa Sungai Raja
8	ARIANSYAH	Anggota	Desa Sungai Raja
9	ABDUL AMIN	Anggota	Desa Sungai Raja
10	SUDERMAN	Anggota	Desa Sungai Raja

KUBE CEMARA INDAH (Desa Sungai Raja Kecamatan Jelai)

No	Nama	Jabatan dalam kepengurusan	ALAMAT
1	MUKHLASIN	Ketua	Desa Sungai Raja
2	SULHANUDDIN	Sekretaris	Desa Sungai Raja
3	YANTO	Bendahara	Desa Sungai Raja
4	ABDUL GANI	Anggota	Desa Sungai Raja
5	DARMANI SAMAN	Anggota	Desa Sungai Raja
6	ASMAWI	Anggota	Desa Sungai Raja
7	MAS MURAH	Anggota	Desa Sungai Raja
8	MATNUH	Anggota	Desa Sungai Raja
9	AHMAD KOMARUDIN	Anggota	Desa Sungai Raja
10	BAMBANG HARTONO	Anggota	Desa Sungai Raja

HASIL WAWANCARA DENGAN DINAS SOSIAL

Nama : HUSNI THAMRIN(INFORMAN 1)
 Jabatan : Kepala Bidang Sosial Disnakertrans Kab. Sukamara
 Waktu : Jumat, 24 Mei 2013

- P : Apakah tahun 2012 kita mendapat bantuan KUBE pak?
 I : Tahun 2012 kita mendapatkan (bantuan) Pedesaan di Kabupaten Sukamara.
 P : Berapa kelompok pak?
 I : Kalau nggak salah itu 15 kelompok, kalau nggak salah.
 P : Desa Natai Sedawak 7 kelompok?
 I : Iya, Desa Kartamulia 8 kelompok.
 P : Dalam data, Desa Kartamulia 7 kelompok.
 I : Ooo... 7 juga.
 P : Sukaraja ?
 I : Sukaraja iya. Sukaraja 3 kelompok.
 P : Dasar Hukum pelaksanaan program ini apa pak?
 I : Dasar Hukum pelaksanaan program sama aja, seperti biasa Dasar Hukumnya kita menggunakan Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
 P : Kalau Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 masih dipakai pak?
 I : Yang 2009 iya, masih dipakai itu. Sebenarnya banyak Undang – undang nya : 2003, 2004, 2009, 2011 dan ini yang terakhir 2012.
 P : Iya, nanti saya pinjam untuk di fotocopy ya pak. Kalau PP nya ada nggak, pak ?
 I : PP tentang Peraturan. PP... Peraturan Pemerintah Daerah maksudnya, ya ?
 P : Yang saya maksud Peraturan Pemerintah. Atau apa peraturan yang paling rendah yang menjadi dasar pelaksanaan bantuan KUBE ini?
 I : Peraturan yang paling rendah disini, Pemerintah.
 P : Peraturan Menteri Sosialnya, ada pak ?
 I : Ini ada. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 79 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Masyarakat Miskin.
 P : Dinas Sosnakertrans Sukamara sudah berapa tahun pak menyalurkan ?
 I : Kita anggap 3 tahun ini lah. Tahun 2011, 2012, dan 2013.
 P : Sebelumnya (sebelum tahun 2011), dinas apa yang menanganinya ?
 I : Kalau dulu, sebelumnya kalau nggak salah kan BLT.
 P : Jadi ini pengganti BLT, pak ?
 I : Yaa... boleh dikatakan ini pengganti. Pengganti BLT. Cuma perbedaannya, BLT dilaksanakan oleh Pemerintah. Kalau nggak salah Pemerintah menyalurkannya pada masyarakat. Nah kalau KUBE itu berbentuk kelompok usahayang bersama yang melalui rekeningkelompok masing-masing. Jadi tanpa melauai Dinas gitu, dari pusat langsung kepada kelompok masing-masing.
 P : Jadi dananya dari pusat langsung ke kelompok?
 I : Iya, dari pusat langsung ke kelompok. Jadi yang pembelanjaan, maupun lain sebagainya itu dari kelompok semua. Dari Dinas hanya membantu untuk

- memfasilitasi permasalahan seperti pembuatan proposal terus pertanggung jawaban keuangan.
- P : Jadi dinas memfasilitasi dan membantu?
- I : Iya. Namun yang mencarikannya itu semua dari masyarakat, nah itu bedanya dari BLT kemarin.
- P : Menurut literatur yang kami baca, itukan Kegiatan Bantuan Sosial Ekonomi Produktif. Yang dikembangkan itu dapat berupa bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perdagangan dan Industri Rumah Tangga dan lain-lain. Kalau untuk KUBE di Sukamara pak, diarahkan kemana ?
- I : Ada Pertanian, Peternakan, Industri Rumah Tangga seperti membuat kerupuk amplang, Pembuatan Kecubung, dan lain sebagainya.
- P : Industri Kreatif?
- I : Ya, industri kreatif juga ada. Juga ada sembako, terus Keramba ikan. kami ituhanya menyalurkan kepada masyarakat, dan memberikan sosialisasi pada masyarakat itu, bahwa bantuan ini bukan dari Pemerintah Daerah untuk mengarahkannya, namun apa yang kemauan dari masyarakat itu sendiri.
- P : Jadi, Kelompok KUBE itu yang menentukan maunya sendiri?
- I : Dari dana yang 20 juta itu, maunya apa. Usaha apa gitu.
- P : Satu KUBE 20 juta ?
- I : Iya. Satu Kelompok.
- P : Apa boleh satu kelompok dua kegiatan? Misalnya, peternakan dengan sembako umpamanya?
- I : Tidak bisa. Harus satu. Satu jenis dulu, nanti kalau satu jenis itu sudah berkembang, seandainya ternak sapi, dia sudah punya sampai 10 ekor mereka mau menjual, mau merubah usaha kepada usaha yang lain, silahkan.
- P : Jadi sifatnya boleh nambah bidang lain.
- I : Nambah bidang lain, usaha pokoknya, yang lainnya adalah cabang.
- P : Lalu dalam menemukan jenis usaha yang dikembangkan itu, apakah Dinas memberikan arahan, bimbingan atau bagaimana?
- I : Arahan dan bimbingan ya pastilah. Kami cuma sekedar mengarahkan, tapi keputusan adalah dipihak mereka. Kami tidak dapat memaksakan bahwa ini harus sapi, harus ternak, harus ini, harus ini, kami tidak bisa.
- P : Lalu latar belakangnya, kenapa sukamara bisa dapat bantuan, kan ini program pusat? Latar belakangnya bagaimana?
- I : Latar belakangnya, ya kegesitan kita lah. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan ini, dengan data-data yang sudah kita siapkan. Data apapun yang diminta oleh Pemerintah, terutama Pemerintah propinsi, walaupun hanya dalam jangkawaktu 3 atau 4 hari, kami siap. Dengan data itu, Kami siap mengantar kesana (provinsi). Nah itu latar belakangnya.
- P : Kalau Tujuannya program ini pak?
- I : Tujuannya adalah untuk merubah daripada nasib mereka yang boleh dikatakan kita di dalam data masyarakat miskin. Kami tidak hanya berdasarkan dari data kami sendiri, namun juga berdasarkan dari statistik dan data lain dari pusat, yang sudah valid.

- P : Data apaitu?
- I : Tentang data fakir miskin. Jadi data itu kami ferivikasi lagi, istilahnya kami data ulang lagi kepada masrayakat-masyarakat yang ada. Kadang-kadang kan data itu sudah tidak begitu valid. Kadang-kadang saat didata orangnya memang disitu, memang benar orangnyakurang mampu. Tetapi dalam kekurangan mereka itu sekarang sudah bangkit dan berhasil. Jadi di dalam pendataan ulang atau ferivikasi orang tersebut tidak bisa diikutsertakan lagi, terpaksa kami alihkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan.
- P : Jadi yang mendapat ini adalah orang yang kurang mampu, sehingga mereka yang mendapat bantuan ini untuk meningkatkan apa pak?
- I : Meningkatkan usaha dan kreatifitas mereka, biar mereka itu bisa setara denganyanglainnya.
- P : Kalau manfaatnya kelihatan belum, pak ?
- I : Sebagian memang kita lihat sampai saat sekarang ini manfaatnya sebagian sudah ada kelihatan, tapi sebagian juga memang adayang gagal.
- P : Kalau manfaatnya itu dari segi apa pak ? Apakah segipeningkatan pendapatan atau apa?
- I : Terutama meningkatnya pendapatan mereka, bagi mereka yang dulunya belum begitu ada usahayang sebenar – benarnya, mereka sekarang sudah punya usaha. Walaupun usahanya itu cuma mengelola sapi, tapi kan kelihatannya sudah ada berkembang gitu. Yang kelihatan sudah berkembang di sini usaha dipeternakan.
- P : Apakah bisa diceritakan alur peluncuran bantuan modal KUBE ini? Mulai dari pusat, pusat mengalokasikan propinsi, propinsi ke kabupaten?
- I : Sebenarnya begini, dana itu melalui pusat ke kita.
- P : Tidak melewati propinsi, pak ?
- I : Propinsi melalui data daripada kita, mereka mengusulkan data itu kepada pusat, pusat menerbitkan, mengeluarkan dana langsung.
- P : Maksud saya proses pengusulannya. Berarti dari kita usulannya ke propinsi?
- I : Dari kita ke propinsi, propinsi ke pusat, pusat lalu menetapkan dan mengeluarkan uangnya langsung dari pusat.
- P : Apakah Gubernur membuat aturan pak ?
- I : Kalau aturan yang berupa darisana nggak ada.
- P : Jadi Langsung pakai petunjuk dari Mensos?
- I : Langsung pakai petunjuk Mensos. Mereka menyalurkan ke kita. Seperti begini, Dinsos propinsi terus larinya kesini.
- P : Ada berapa personil di dinas ini yang menangani program KUBE bapak?
- I : Ketika pendataan kami mengerahkan, semua staf. 7 orang, termasuk saya. Yang membuat kewalahan saat pendataan, tapi untuk pengelolaan kelapangan hanya 2 orang aja. Kasinya dengan Kabidnya. Yang bertanggung jawab penuh disitu, kalau yang lainnya kan tetap dibantu staf. Staf dibantu oleh pendamping kecamatan. Pendamping kecamatan dan pendamping desa. Begitulah keadaannya.
- P : Pada saat melakukan pendataan kepada keluarga fakir miskin dan tidak mampu. Kriteria apa yang digunakan?

- I : Kriteria kita memang ada, kriterianya berdasarkan data dari BPS. BPS kan punya standar minimum. Yang penghasilan dibawah sekian, saya lupa datanya.
- P : Apakah data ini di cek ke lapangan pak ?
- I : Dari awalkami mendapatkan data dari BPS, BPS propinsi kalau ndak salah. Data apa itu, namanya lupa saya itu. Jadi seandainya kecamatan Sukamara akan mendapat bantuan, dari mereka sudah keluar. Data Sukamara itu.
- P : Sudah ada namanya ?
- I : Namanya sudah ada dikirim mereka, rekap nama-nama orangnya.
- P : Kalau kita kroscek umpamanya ternyata data ini kurang tepat?
- I : Dikroscek kembali, kroscek ulang. Takutnya ada yang sudah meninggal dunia, ataupun orang ini dulunya miskin sekarang sudah kaya. Kalau seandainya keluarga ini sudah meninggal dunia kemungkinan kita lihat dari keturunannya. Kita lihat keluarganya, rumahnya dimana, keadaannya bagaimana, pendapatannya sehari-hari berapa.
- P : Kalau data yang dari pusat itu tidak sesuai dengan dilapangan, boleh tidak kabupaten mengusulkan ?
- I : Seperti saya katakan tadi, bahwa data itu belum tentu valid dari mereka, jadi yang validnya nanti data itu kami kirim lagi yang dari kami. Kami lampirkan data dari mereka, dengan alasan keterangan orang ini meninggal, sudah kaya, sudah mampugitu lah. Kami ganti dengan orang yang ini, dsb. Namun berdasarkan data ini, propinsi juga melihat kesini apakah benar data yang dari kami.
- P : Pusat memperbaiki?
- I : Ya. Berdasarkan data itu tadi, data yang valid. Data itu sudah dikirim ke Propinsi, propinsi mengirimkan ke pusat.
- P : Lalu, dalam mereka menjalankan bidang usaha mestinya kan ada bimbingan, bimbingan administrasi, bimbingan manajemen dan seterusnya. Apakah ada bimbingan semacam itu pak?
- I : Bimbingan administrasi, maupun manajemen dan lain sebagainya itu melalui pendamping. Pendamping desa dan pendamping kecamatan. Pendamping desa dan kecamatan membuat semacam laporan triwulan maupun per bulan untuk keadaan kegiatan tersebut. Bagaimana mereka melaksanakan di lapangan.
- P : Kalau pendamping kecamatan seperti apa, pak ?
- I : Untuk sukamara untuk tahun 2012 saya lupa namanya, kebanyakan.
- P : Kalau pembina kabupaten siapa, pak ?
- I : Pembina kabupaten untuk tahun 2012 itu mas Chandra.
- P : Pendampingan itu berapa lama di laksanakan?
- I : Sebenarnya pendampingan itu selamanya. Insentif pendamping ditanggung selama satu tahun. Terus ditambah dengan dana sharing dari dinas sosial kabupaten selama 1 tahun. Jadi berjumlah 2 tahun yang ditanggung. Tapi pendampingan itu tetap seterusnya.
- P : Jadi dana sharing dari kabupaten tu hanya untuk dana pendampingan?
- I : Insentif pendampingan dengan dana sosialisasi. Sharingnya dari kabupaten cuma itu aja. Untuk sosialisasi itu maksudnya untuk mengadakan pendataan yang pertama, yang kedua peninjauan ke lapangan, yang ketiganya melaksanakan

sosialisasi kepada KUBE bersangkutan, memberikan pemahaman, pengarahan dan sebagainya, kami ambil narasumbernya dari propinsi dan didampingi oleh kami sendiri dari Dinas Sosial.

- P : Kalau SOPnya ada nggak pak ?
- I : Standarisasi pelaksanaan kegiatan, maksudnya ?
- P : Apakah provinsi atau pusat membuat SOP?
- I : Maksudnya standarisasi pembelanjaan?
- P : Bukan. Pelaksanaan kegiatannya, kan ada petunjuknya, misalnya sosialisasi sekian kali, evaluasi sekian kali. Apa lengkap disini aja (juknis)?
- I : Disini hanya ada untuk pembinaan dan itu memang tidak ada standarnya. Rasanya itu tidak ada. Tapi disini ada melaksanakan pertemuan minimal sebulan sekali.
- P : Mungkin itu SOPnya pak?
- I : Itu maksudnya kepada KUBE yang bersangkutan, bukan kami.
- P : Ooo... jadi KUBEnya melakukan pertemuan.
- I : Ya. Pertemuan antar mereka itu minimal 1 bulan sekali. Jadi mereka bisa membuat laporan dan sebagainya, keadaan ternak mereka.
- P : Lapornya lancar pak?
- I : Ya. Alhamdulillah, kalau seandainya memang diminta propinsi dalam satu tahun itu lancar dari KUBE – KUBEnya.
- P : Saya baca dari literatur ini. Apakah Pemda melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pembinaan KUBE?
- I : Tidak ada.
- P : Jadi murni dari pemerintah saja. Lalu laporan. Berarti laporannya itu kan dari Bupati pak ya, atas nama Bupati kepada Gubernur dan Kemensos, itu berapa kali pak dalam setahun ?
- I : Laporan 4 kali dalam setahun, per triwulan.
- P : Apakah ada rekanan atau pengusaha yang dijadikan partner ?
- I : Untuk sementara ini kita belum ada. Kami memang pernah saat sosialisasi kemarin di propinsi, mengusulkan kepada mereka yang punya usaha seperti lahan sawit dan sebagainya yang berada di daerah kita untuk bisa membantu usaha kita ini pada masyarakat, namun jawaban dari perusahaan belum ada petunjuk dan juknis dalam hal ini.
- P : Lalu LKM (lembaga keuangan mikro) yang dilibatkan ada?
- I : Tidak ada. Kalau Perbankan, BRI yang dilibatkan dalam setiap pelatihan.
- P : Lalu kalau kelembagaan lokal, peran RT, RW, Lurah itu bagaimana pak ?
- I : Peran RT dan Lurah itu hanya dalam pendataan. Setelah itu tidak ada lagi keterlibatan mereka. Pendampingan tidak ada, pemantauan juga sudah ada dari pendamping desanya.
- P : Kalau LKM tadi pak, dia tidak terlibat karna memang tidak ada LKMnya atau mereka memang tidak mau terlibat?
- I : Mikro, maksudnya ?
- P : seperti jenis-jenis kelompok pengelola keuangan, misalnya koperasi?
- I : Nggak ada. Memang nggak ada, karna inikan memang istilahnya bantuan langsung kepada masyarakat. Jadikan ndak ada melibatkan yang lain.

- P : Apakah di propinsi pernah diadakan sosialisasi?
- I : Kalau untuk di propinsi ada, itu melalui dana propinsi, dana sharing mereka.
- P : Berapa kali, pak ?
- I : Kalau sosialisasi di propinsi satu kali. Satu kali untuk pembina.
- P : Jadi pendamping-pendamping dibawa kesana ?
- I : Pendamping kecamatan, pendamping kabupaten langsung ke propinsi. Kalau pembina itu atas nama kepala dinas. Kalau pembina, ada kegiatan sendiri.
- P : Pembina sosialisasi sendiri ?
- I : Pembina dia terdiri atas kepala dinas sosial, (sosnakertrans) kab terus ditambah dengan BRI, terus BAPPEDA, dan ditambah dengan kepala desa.
- P : Itu masuk dalam kategori pembina. Lalu kalau untuk pendamping ada lagi sosialisasinya ?
- I : Untuk pendamping sosialisasinya ada, tersendiri. Pendamping ke propinsi, pendamping kabupaten, pendamping kecamatan dan pendamping desa.
- P : Setiap kelompok ada pendampingnya pak?
- I : nggak ada. Setiap kelompok nggak ada pendamping, Cuma desa aja.
- P : Berarti satu pendamping itu bisa menangani 5 sampai 6 kelompok.
- I : Iya. 5 sampai 6 kelompok.
- P : Untuk tingkat kabupaten, apakah ada lagi sosialisasinya?
- I : Tingkat kabupaten ada. Kalau tingkat kabupaten itu langsung kepada KUBEnya. Ketua, bendahara, sekretaris. 3 orang itu yang kami panggil untuk sosialisasi.
- P : Kecamatan?
- I : Kecamatan tidak ada sosialisasi. Kecamatan masuknya di pendamping yang pertama tadi. Kecamatan masuknya di pendamping desa. Pendamping kabupaten, pendamping kecamatan, pendamping desa disitu termasuk sosialisasinya jadi 2 kali dalam 1 tahun penerimaan.
- P : Oke. Narasumbernya dari ?
- I : Narasumbernya dari propinsi. Ditambah dari dinas (kabupaten).
- P : Metode Sosialisasinya?
- I : Metodenya tentang pelaksanaan KUBE.
- P : Ada diskusi pada saat sosialisasi ?
- I : Ada diskusi didalamnya.
- P : Materi apa saja yang disampaikan ?
- I : Materinya mengenai verifikasi KUBE tahun 2012, bimbingan teknis sosial, operasional pendampingan sosial, hanya menjelaskan bagaimana caranya untuk pengelolaan keuangan tersebut dan pertanggung jawabannya, disitulah yang disosialisasikan.
- P : Oke. Kan harus ada komitmen/dukungan dari semua SKPD terutama yang terkait. Misalnya kalau peternakan berarti Dinas Pertanian dan peternakan, kalau perikanan dengan Dinas Perikanan, kalau industri-industri tadi dengan Dinas Perindustrian. Apakah ada komitmen dari SKPD-SKPD itu, pak ?

- I : Memang kami pembinaannya sewaktu ada keluhan-keluhan dari masyarakat itu, sepertinya seandainya ternaknya ada mengalami sakit, mereka kita arahkan untuk menghubungi PPL yang ada disana.
- P : Dinas-dinas tadi pernah diundang dalam sosialisasi ?
- I : Waktu pembukaan semua dinas kita undang.
- P : Pembukaan saja?
- I : Iya. Dalam pembukaan, namun dalam sosialisasinya mereka sudah tidak mengikuti lagi.
- P : Apakah KUBE-KUBE itu menandatangani kontrak, pak ?
- I : Tidak. Mereka mempunyai proposal, seperti gini bentuknya. Ini dasar pengajuan miskin, maksud dan tujuannya, terus disini programnya KUBE tadi terus ditambah dengan nama-nama anggotanya. Terus disini mereka menandatangani surat pernyataan.
- P : Iya. Yang isinya ?
- I : Yang isinya seluruh anggota KUBE siap menerima bantuan KUBE fakir miskin tahun (misalnya) 2012 dari Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Tengah. Yang kedua seluruh anggota KUBE berjanji akan memanfaatkan dana bantuan yang diterima untuk dibelanjakan sesuai usulan yang tertuang dalam proposal. mereka kan mengusulkan, merencanakan apa yang direncanakan dari awal tadi, 10 orang sudah rapat menentukan bidang usaha mereka. Terus yang ketiga apabila kami membelanjakan barang-barang tidak sesuai dengan usulan yang tertuang dalam proposal kami akan siap mengembalikan, mengganti dan mempertanggung jawabkan serta menyetor ke kas negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- P : Apakah ada pelatihan bagi mereka ?
- I : Pelatihan untuk kelompok KUBE hanya dalam sosialisasi tu aja.
- P : Jadi belum pernah dan tidak ada pelatihan pak?
- I : Kalau dari dinas kami memang untuk itu tidak ada. Kalau dari dinas lain saya tidak tahu.
- P : Bagaimana dengan laporan kelompok, wajib ya pak? Dan bagaimana selama ini, lancar pak?
- I : Lancar.
- P : Menurut bapak apa kendala dari pelaksanaan KUBE ?
- I : Kendalanya memang banyak, terutama untuk bersatu, itulah yang susah. Dalam kelompok, dalam kebersamaan pengelolaan/merawat ternak. Itu kendala yang terutama. Yang kedua, kendalanya, keahlian mereka dalam berternak, misalnya cara pengobatan sapi, mereka tidak memahami bagaimana caranya beternak, ataupun bagaimana mengelola keramba ikan, keahlian mereka masih terbatas.
- P : Apakah tidak ada pelatihan dari dinas terkait pak?
- I : Dari dinas terkait tidak ada pelatihan menunjang kegiatan tersebut karena memang tidak ada juknisnya, tidak ada petunjuk dari sana bahwa sasaran program ini harus dilatih dulu.
- P : Dari sekian kelompok, 35 kelompok tadi pak? Apakah sudah ada yang berhasil menurut sepengetahuan dinas?

- I : Untuk tahun 2012 kita anggap kalau mereka yang ternak sapi boleh dikatakan sudah berhasil. Mereka yang dulunya 4 ekor sekarang sudah ada 5 sampai 6 ekor.
- P : Kelompok mana yang paling baik ?
- I : Memang untuk daerah sukamara, menurut hasil pantauan, kita lihat yang baik sedawak (Desa Natai Sedawak).
- P : Desa Kartamulia belum ya?
- I : Kartamulia belum, kita memantaunya sampai itu aja. Kalau di daerah Sukaraja juga belum, daerah anu juga belum.
- P : Faktor apa yang sangat membantu dalam pelaksanaan KUBE.
- I : Faktor yang membantu didalam pelaksanaan dinas ya terutama pendamping
- P : Apakah pendamping aktif semua pak?
- I : Pendampingnya aktif. Dari pendamping desa, kecamatan, pendamping kabupaten. Pendamping kabupaten terus ditambah pendamping kecamatan dan desa. Itulah yang membantu untuk pembinaan ini.
- P : Harapan dinas untuk KUBE ini kedepan?
- I : Harapan dinas memang tidak terlalu muluk-muluk ya. Harapan Dinas itu, mengharapkan kepada masyarakat yang sudah diberikan bantuan itu supaya dapat mengelola dari dana yang memang sudah sebenarnya minim sama sekali 20 juta untuk 10 orang, bisa memanfaatkan maksimal mungkin dengan proposal yang ada, yang telah diajukan pada kami. Harapan kami, dari proposal yang ada dia bisa membelanjakan walaupun dana itu tadi sangat minim sekali. Harapannya supaya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
- P : Oke Terimakasih.

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 5

HASIL WAWANCARA ANGGOTA KUBE

Nama : CHANDRA SUSILO,S.Sos(INFORMAN 2)
 Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial & Penanggulangan Kemiskinan
 Waktu : Jumat, 24 Mei 2013

- P : Kalau boleh tau, pak Chandra di Dinas Sosial menjabat sebagai apa ?
 I : Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
 P : Baik, pak. Kalau saya tidak salah ingat tadi, setelah saya mewawancarai Kabid Sosial, katanya bapak juga sebagai petugas pendamping tingkat kabupaten untuk KUBE tahun 2012.
 I : Iya.
 P : Latar belakang kebijakan program KUBE di sukamara ini. Apakah ada faktor lain selain dari faktor kemiskinan, pak ?
 I : Kalau latar belakang, memang pada dasarnya kita mengambil dari data kemiskinan yang sudah ada dari BPS, yang kedua kita lihat dari faktor tingkat kesibukan dan pekerjaan. Itu yang melatar belakanginya.
 P : Terus kalau tujuannya dari kegiatan KUBE ini apa pak?
 I : Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan baik dari anggota KUBE maupun pribadi yang lebih utama adalah untuk membantu perekonomian keluarga, untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.
 P : Kalau manfaatnya, pak ?
 I : Manfaatnya KUBE ini agar kelompok-kelompok yang mendapatkan bantuan ini bisa mengembangkan dan memanfaatkan bantuan yang didapat sesuai dengan proposal yang diajukan untuk menjalankan KUBE sesuai dengan keinginan yang telah ditetapkan bersama.
 P : Lalu mengenai sasaran pak, untuk tahun 2012 itu desa mana yang mendapat bantuan KUBE?
 I : Di kecamatan Permata Kecubung, yaitu Desa Ajang, Desa Laman Baru , Desa Semantun, Desa Nibung Terjun, dan Desa Natai Kondang.
 P : Kalau di Natai Sedawak itu pak, tahun berapa?
 I : Itu di Natai Sedawak tahun 2012. Tahun kemaren.
 P : Saya ingin tau tahapan pak, mengenai proses awal yang dilakukan sebelum kelompok usaha bersama ini dibentuk ?
 I : Itu biasanya kita diberi tahu oleh pihak propinsi untuk melakukan pemetaan, mencari warga masyarakat yang kurang mampu untuk dibentuk kelompok-kelompok sesuai dengan jumlah yang diminta dari propinsi.
 P : Pemetaan yang bapak maksud itu, kegiatan mendata itu ya pak?
 I : Ya. Itu pemetaannya.
 P : Berarti dari propinsi atau dari pusat itu belum ada data sebelumnya?

- I : Kadang mereka sudah ada sebagian datanya, sedikit tapi tidak komplit. Kemudian kita disuruh cek ulang dengan verifikasi data untuk menentukan keakurasian data tersebut.
- P : Yang melakukan pendataan siapa ? Dari dinas, atau dinas menugaskan orang lain atau bagaimana?
- I : Kalo dari dinas ya kita sendiri yang turun, bersama staf-staf yang lain. Terus dibantu aparat-aparat desa setempat yang mendapatkan bantuan KUBE itu.
- P : Oke, dalam pelaksanaan implementasi bantuan KUBE ini pak, apakah ada SOP atau standar operasi system yang dibuat dalam pelaksanaan program ini ?
- I : Ada dari pusat langsung, dari propinsi ada buku juknis pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan perdesaan Kalimantan Tengah tahun 2012 ini, jadi kita mengacu dari petunjuk yang sudah ada.
- P : Apa saja kegiatan pengelolaan dan pengembangan kelompok usaha bersama yang disediakan oleh dinas ? Maksud saya jenis-jenis usahanya pak, bisa untuk apa saja bantuan itu ?
- I : Kalo jenis usaha, bisa dari sektor pertanian, perikanan atau perkebunan, terus peternakan. Itu bisa dikembangkan.
- P : Siapa yang menentukan jenis usaha yang akan dikembangkan. Kelompok sendiri, atau dari dinas, atau darimana pak ?
- I : Biasanya kita beri kesempatan mereka ini, rapat intern kelompok KUBE, jadi mereka menentukan sendiri jenis usahanya, maunya apa gitu.
- P : Dengan memberikan bantuan kepada KUBE itu, perubahan apa yang diinginkan dari program ini. Terhadap kelompok penerima bantuan?
- I : Agar setiap kelompok ataupun orang per orang yang ada didalam situ bisameningkatkan ke taraf hidup yang lebih baik.
- P : Berapa besar bantuannya?
- I : Kalo tahun kemarin itu 20 juta, kemungkinan tahun ini kalau nggak salah ya sama 20 juta per kelompok.
- P : Kalau perkembangannya pak ? Menurut pandangan dinas sosial, selaku pelaksana dari kebijakan ini, bagaimana perkembangannya di tahun 2012?
- I : Kalau untuk perkembangan kayanya masih belum begitu kelihatan. Soalnya masih dalam tahap pengelolaan dan pengembangan, jadi kalo untuk yang kemajuan yang lebih banyak gitu kayanya belum. Karena kalo untuk ternak itukan perlu waktu yang cukup lama untuk mengembangkan sampai dia melahirkan dan besar gitu.
- P : Kalau di tahun 2012, bulan berapa diluncurkan ?
- I : Kalau tidak salah bulan Mei, sekitar Mei, Juni, Juli itu.
- P : Anggap saja dari juli. Apakah sampai sekarang belum kelihatan perkembangannya? Misalnya kalau dia ternak, bertambah besar, kelompoknya berjalan baik atau bagaimana, itu belum kelihatan, ya?
- I : Kalau untuk ternak, sudah ada yang melahirkan, ada yang 2, adayang 1. Kemungkinan bisa ada yang lebih.
- P : Dari sekian desa yang mendapat bantuan KUBE, desa mana yang cukup baik perkembangannya, yang bisa dilihat ?

- I : Kalau untuk ternak yang tahun 2012 itu, Mungkin desa natai sedawak atau kartamulia.
- P : Dalam hal pelaksanaan, apakah Dinas Sosial menggandeng pihak lain dalam pelaksanaan pemanfaatan bantuan KUBE ini?
- I : Untuk tehnisnya, dari awal biasanya seperti BAPPEDA itu pernah dilibatkan juga, BRI, camatnya, kepala desa dan aparat-aparat yang lain.
- P : Kalau pendamping pak, apa saja kegiatannya selama dia menjalankan tugas pendampingan?
- I : Pendamping itu tugasnya membantu apabila kelompok mengalami kesulitan baik dari pengelolaan, verifikasi dan pembuatan laporan, masalah komunikasi dengan dinas terkait. Jadi tugas pendamping ini membantu kelompok itu untuk melaksanakan tugas-tugas yang memungkinkan kelompok ini melaksanakan tugas.
- P : Berapa lama masa tugas pendamping?
- I : Biasanya kalo dari propinsi itu sekitar 6 bulan.
- P : Kalau kemaren bulan Juli, artinya saat ini sudah habis masa tugas pendamping?
- I : Iya.
- P : Berarti KUBE 2012 tidak ada pendamping lagi?
- I : Bukan begitu, yang saya maksud dari segi honorariumnya. Kalo tugas-tugasnya apabila masih diperlukan, diminta laporan, mereka tetap mengerjakan.
- P : Bagaimana keaktifan Pendamping tingkat desa saat ini?
- I : Sebenarnya mereka sering komunikasi dengan kita. Terkadang jika ada permasalahan mereka minta petunjuk dengan kita. Kadang menyampaikan perkembangan terhadap KUBE-KUBE tersebut.
- P : Apakah selama anggota KUBE mendapat pelatihan menjalankan usahanya?
- I : Kalo untuk menjalankan usaha, kayanya belum ya. Yang ada itu cuma sosialisasi pemanfaatan bantuan aja.
- P : Oke. Kalau gitu kita bicara sosialisasi sekarang. Sosialisasi di tingkat mana saja dilaksanakan?
- I : Pertama di Palangkaraya, di propinsi.
- P : Pesertanya, pak?
- I : Pesertanya dari Dinas Sosial, Bank BRI, Camat, Kepala desa yang bersangkutan.
- P : Kalo pendamping? Ikut ya?
- I : Ooo... itu belum. Itu tahap ke-2.
- P : Kalau di tingkat Kabupaten, sosialisasinya?
- I : Itu biasanya dilaksanakan di kecamatan yang mendapatkan bantuan. Itu khusus untuk para anggota KUBE
- P : Pada saat sosialisasi di tingkat propinsi, apa saja yang disampaikan?
- I : Biasanya juknis, mereka menjelaskan petunjuk teknis bagi pendamping.
- P : Kalau di tingkat kabupaten, materi sosialisasinya?
- I : Hampir sama dengan ini, cuman itu lebih ke pengelolaan.
- P : Kalau di tingkat kabupaten dan kecamatan, siapa pesertanya?
- I : Kalau ndak salah dari 10 orang itu 3 yang diundang, Ketua, sekretaris, Bendahara.
- P : Pematernya dari mana?
- I : Narasumbernya dari palangkaraya, dari Propinsi.

- P : Kira-kira peserta mengerti isi materi yang disampaikan itu ?
- I : Kalo mengerti kayanya mengerti. Karna yang saya lihat waktu itu sosialisasi itu sudah cukup jelas dan terarah yang disampaikan, tergantung penangkapan peserta saja.
- P : Apakah untuk pendamping kabupaten, kecamatan, dan desa ada pelatihan untuk mereka?
- I : Ada. Itu sebenarnya panggilan tahap ke-2 nya, di propinsi. Jadi untuk pembina, pendamping kabupaten, pendamping kecamatan dan pendamping desa.
- P : Hal-hal apa saja pak yang disampaikan ?
- I : Itu tentang pelaksanaan petunjuk teknis dilapangan bagi pendamping.
- P : Kira-kira faktor apa yang menjadi kekuatan atau pendukung bagi berhasilnya pelaksanaan KUBE di sukamara.
- I : Yang pertama itu adanya kepedulian atau perhatian dari instansi terkait, yang ada hubungannya dengan bantuan itu. Yang kedua faktor keinginan para anggota KUBE untuk memajukan dan memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya, saya kira itu yang lebih penting.
- P : Bagaimana di dalam perjalanannya, apakah ada anggota KUBE yang mengundurkan diri ? dari kelompok?
- I : Itu biasanya dari kelompok itu membuat surat pernyataan mengundurkan diri, kemudian itu boleh digantikan dengan orang yang terdekat disitu. Boleh keluarganya, tapi khusus yang tidak mampu. Keluarga tidak mampu atau keluarga terdekat atau yang jauh atau orang lain boleh menggantikannya.
- P : Yang mundur berarti hak – hak nya hilang ya pak?
- I : Iya, itu pasti, kita pastikan hak-haknya hilang, dia tidak dapat apa-apa.
- P : Sekarang tentang keluarga miskin. Standar jawa dengan standar kita di kalimantan kan beda. Tentu Dinas Sosial Sukamara punya standar sendiri untuk menentukan. Gambaran umumnya pak bagaimana standar keluarga miskin itu, yang dipakai oleh Dinas Sosial Sukamara?
- I : Memang ada perbedaannya di jawa dengan disini. Kalau di Sukamara, kita melihat yang pertama itu dari tingkat pendapatan per bulan atau per hari. Jadi disitu standarnya kita melihat faktor kemiskinan itu.
- P : Mereka kan wajib membuat laporan Bagaimana mekanisme pembuatan sampai kepada penyampaian laporan yang dilakukan oleh KUBE, pak ?
- I : Yang pertama, biasanya ada surat dari propinsi. Mereka meminta agar penyaluran bantuan itu dilaporkan. Dimulai dari kelompok, pendamping kecamatan, dan kabupaten. Jadi dari kita memerintahkan ke kelompok KUBE untuk membuat laporan. Kemudian dari kelompok KUBE itu diserahkan ke pendamping desa. Kemudian pendamping desa membuat lagi laporan dan disampaikan ke kita. Kita merekap semuanya, kita bikin laporan kemudian kita sampaikan ke propinsi.
- P : Berapa kali dalam setahun yang wajib membuat laporan?
- I : Minimal 2 kali.
- P : Selama ini bagaimana keaktifan mereka membuat laporan?
- I : Untuk yang 2011 laporannya sudah selesai.
- P : Yang 2012 ?

- I : Iya. 2 kali.
- P : Personil di dinas yang khusus menangani KUBE ini, berapa orang pak?
- I : Jumlah nya 7 orang, dibantu oleh seksi-seksi yang lain. Kita berkerja sama disitu.
- P : Apakah dalam menentukan target atau kelompok yang akan menerima bantuan ada campur tangan dari atas, dari pimpinan umpamanya atau dari yang lebih atas lagi.
- I : Biasanya kita langsung terjun ke lapangan. Kerja sama dengan aparat desa. Jadi kita minta bantu, kan mereka lebih tahu.
- P : Apakah sebelum menetapkan itu dinas sosial koordinasi dulu ke atas, ke Sekda umpamanya atau Bupati gitu?
- I : Tidak. Kita ini sudah punya data masalah itu, jadi kalo ada kekurangan tinggal nyari kekurangan itu.
- P : Selama pelaksanaan kegiatan, dari 2011, 2012 sampai sekarang ini, hambatan yang dirasakan itu apa?
- I : Hambatan yang dirasakan itu dari segi pengelolaan. Pengelolaan jenis usahanya, karena para anggota KUBE ini, mereka banyak bekerja hari-harian. Jadi pengelolaan usaha agak kurang. Kurang kerjasamanya dalam pengelolaan.
- P : Tidak fokus gitu, ya ?
- I : Tidak fokus untuk mengelola itu, jadi kita kesulitan disitu. Untuk pengawasan masalah itu.
- P : Terakhir, pak. Harapan bapak kedepan untuk kebijakan program bantuan KUBE ini, khusus di sukamara bagaimana?
- I : Harapannya kita dari dinas sosial itu, saya rasa sama lah dengan harapan dinas sosial yang lainnya. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian, baik dari kelompok maupun orang per orang di dalam kelompok itu. Paling tidak dia meningkatkan kehidupan ekonomi keluarganya sendiri. Saya kira itu.
- P : Oke, pak. Terima kasih atas waktunya, saya kira itu saja yang saya tanyakan.

Lampiran 6

HASIL WAWANCARA ANGGOTA KUBE

NAMA KUBE : MAJU BERSAMA 3 (DESA NATAI SEDAWAK)
 (INFORMAN 3)
 JENIS USAHA : TERNAK SAPI
 TGL WAWANCARA : 24 Mei 2013 (pukul 15.30 WIB)
 NAMA ANGGOTA : SURYADI

- P : Bapak kelompok berapa?
 I : Kelompok 2.
 P : Kelompok 2, bapak ketuanya? Bapak Umpi ya?
 I : Bukan. Saya Suryadi.
 P : Disini bapak tertulis kelompok 3. Oke, Bapak tahunya ada bantuan untuk KUBE ini darimana? Informasi dari mana?
 I : Pertama kali informasi dari pak Hengki.
 P : Pak Hengki tu...?
 I : Pak Hengki ini kalau tidak salah Ketua Pendamping.
 P : Ooo.... Pendamping desa. Loyola Hengki itu ya?
 I : Ya.
 P : KUBE ini kan menambah waktu, merepotkan. Kenapa bapak bisa mau ikut juga ?
 I : Karna kan kita, kalau kita sekarang ada kegiatan sore-sore baiknya kita meluangkan waktu untuk apa, bepelihara, beternak.
 P : O gitu, sebelum jadi anggota KUBE, bapak kerja apa ? Dulunya.
 I : Dulu saya RT.
 P : Ooo... RT. Kalo sehari-harinya pak, kerjanya ?
 I : Saya Tani. Tani di belakang rumah mah. Tanam sayur apa.
 P : Kalo, mohon maaf kalo penghasilan ? Sebelum masuk KUBE, bapak. Itu taninya tani apa pak ?
 I : Tanam sayur mah, banyak. Kacang panjang.
 P : Hasilnya dijual ke pasar ?
 I : Jual ke orang yang, apa, penampung-penampung.
 P : Berapa tahun pak, sudah ?
 I : Kalau yang ibaratnya betanam itu, aku baru setahun lebih ja, baru.
 P : Sebelum itu ?
 I : Sebelum itu kan aku masih kerja kayu. Ikut nyensor.
 P : Ooo... kerja kayu gitu. Ya oke, sekarang kan dilarang kan ya, makanya jadi Tani. Selama setahun pak, pengalaman setahun jadi Tani, rata-rata bapak penghasilan berapa, pak ?
 I : Sebulan ? Ndak nentu, kadang-kadang ada 750, ada sampai 900, itu ndak tentu.
 P : KUBE ni kan usahanya sapi pak ya, berarti belum ada hasil pak, ya ?
 I : Belum.

- P : Tapi perkembangannya gimana?
- I : Lumayan lah. Itu kan disini kan kalau dilihat kemaren kami kawinkan. Karna kan 3 tu kan kalau jadi melahirkan yang 3. Yang namanya kelompok ne 10, orangnya 10, sapi kan hanya dapat 4, maksudnya tu giliran.
- P : Sapi itu bapak beli sendiri, atau dari bantuan itu sudah berupa sapi ?
- I : Bantuan, beli sendiri. Hanya bantuannya kan hanya uang.
- P : Bantuan uang.
- I : Uang kan lewat BRI
- P : Terus bapak beli sendiri sapinya ?
- I : Beli sendiri.
- P : Cari sendiri ya, pak. Sekarang sudah kawin, sudah bunting?
- I : Amun aku kemaren sama si Nani, bilangnyanya dah kawin kalo, sudah itu katanya, karna dia itu masalah sapi sudah pandai, dah ada pengalaman, katanya sudah kawin. 1 bulan kemaren dikawinkan, sapi yang laki-lakinya minjam sama Nani tu.
- P : Berarti sapi kelompok bapak betina semua, 4 ekor?
- I : Ada 1 laki-laki. Tapi belum pandai kawin.
- P : Kesulitan ndak pak, pelihara sapi itu ?
- I : Kendalanya ini aja, sekarang kan parit tu sudah pada bersih. Dulu kan enak cari makannya, kalo sudah bersih tu susah.
- P : Jadi kendalanya cari makannya. Tapi kalau masalah cara pelihara sapi sudah tau ?
- I : Tau. Ya kasih minum itu kan. Hanya, hanya beratnya 1 tidak ada pemeriksaan entah sapi ini sehat atau tidaknya.
- P : Dinas ndak pernah meriksa ?
- I : Iya. Kok dari dulu tu kok kenapa kaya gini. Hanya diberi bibit tapi ndak ada itunya. Nggak ada misalnya diperiksa...
- P : Nggak dibina.
- I : Ndak diapakan misalnya sapinya.
- P : Orang dinas pernah kesini ?
- I : Ndak pernah
- P : Selama berapa bulan ini ? Sudah berapa bulan bapak dapat bantuan ini ? Ada setahun ?
- I : Belum. Belum setahun
- P : Belum setahun ya. Kan 2012 pak ya, bulan berapa pak itu ?
- I : Bulan delapan. Apa bulan berapa itu...
- P : Bulan delapan, berarti baru hampir 9 atau 10 bulan pak ya. Berarti umur sapi di bapak tu sudah kurang lebih segitu ?
- I : Ya.
- P : Kalau pendamping pernah datang ?
- I : Nggak juga.
- P : Nggak pernah datang ?
- I : Nggak pernah. Sebenarnya kan ketua kelompok pendamping tu kan apa keluhan warga itu, harusnya didekati. Kan dia perantaranya kan.
- P : Jadi selama ini bapak, kelompok bapak ada keluhan apa tidak ?

- I : Ya... keluhannya itu aja, sapi ini cari rumputnya agak susah, tidak seperti dulu. Cari rumputnya.
- P : Waktu itukan bapak kan diminta membentuk kelompok. Kenapa langsung pilih usaha sapi?
- I : Nah... inilah namanya sosialisasi tidak jelas, sebenarnya kalo kemaren diberitau bahwa ada bantuan dari, umpamanya dari propinsi sekian. Nah kita bentuk kelompok ataupun mengajukan mau nanam apa, apa kelompok petani atau kelompok ikan atau kelompok apa ternak gitu kan enak. Ini nggak, langsung sapi.
- P : O jadi pada saat sosialisasi, langsung disebut sapi.
- I : Dari ketua pendampingnya ini ndak ada disebutkan ini dapat untuk apa, betanam, atau untuk kelompok pelihara ikan.
- P : Jadi langsung diarahkan ?
- I : Atau perkebunan kan seperti itu kan, entah sawit entah apakah karet.
- P : Bapak kan pernah bertani ya? Sebelum petani kerja kayu. Berarti, keahlian bapak bukan di peternakan?
- I : Namanya kita kurang pengetahuan, pembinaan itu tidak ada. Langsung aja kita ambil sapi.
- P : Tapi sekarang berjalan
- I : Berjalan
- P : Apakah bapak yakin sapi itu akan berhasil?
- I : Ya. Moga-moga berhasil. Yang namanya belajar, sampai teman-teman banyak yang mengundurkan diri.
- P : Anggota bapak? Berapa orang yang mundur?
- I : Yang mundur sudah 4 orang.
- P : Kan mereka dapat bantuan 1 orang 2 juta? Kalau mundur itu gimana?
- I : Begini. Dalam kelompok sudan ada pertemuan. Kita itu kan kerja gotong royong, berkelompok. Sepakat bergiliran, 1 hari siapa, 1 hari siapa. Nah, dibuat janji begini, bila kita berhenti di tengah jalan, kita tidak bisa tarik duitnya. Karena kita sudah beli barang (sapi). Duitnya sudah tidak ada, apa yang mau digantikan. Tergantung kita aja, yang mau berhenti itu, tinggal pengertian kita aja, seperti apa jika ada orang yang bebannya agak terberat ya kita kasih saja. Waktu itu ada juga yang keluar, dikasih, tapi tidak sepenuhnya. Sekedar meringankan beban dia saja, saat dia bekerja beberapa bulan. Kalau kita cukupi sampai 2 juta, tekor kita.
- P : Kenapa dia berhenti pak?
- I : Kendalanya, mencari rumput, makanan itu. Mereka tidak sanggup.
- P : Tapi kan kalau mundur, rugi dia. Duitnya hilang.
- I : Makanya sebelum mereka mundur itu, kita katakan, rugi endak? Karena kita tidak mengganti se full-fullnya, tapi hanya sekedar itu saja, meringankan beban dia saja.
- P : Apakah bimbingan tidak pernah ada?
- I : Iya, tidak pernah. Di Sedawak sana yang mundur sampai 5 orang. Ada yang 7 orang, kelompoknya hanya tinggal 3 orang. Kelompok Pak Kades tinggal 3 orang saja.
- P : Kelompok siapa itu?
- I : Kelompok pak kades.

- P : Pak Kades masuk kelompok juga?
- I : Ya, waktu itu kan dia mencalon. Sapi itu datangnya pas waktu pencalonan. Sebelum Pak Kades dilantik sapi sudah datang.
- P : Siapa yang membeli sapi?
- I : Ketua dan anggota kerja sama membelinya. Kita kan dititipi uang lewat BRI, uangnya ada 20 juta. Nah kita beli sapi. Transportnya berapa, kita hitung, ongkos orang mencari, berapa biayanya, kita kasih uang rokok, jadi dihitung semua.
- P : Lalu, mengenai laporan. Kan kelompok wajib membuat laporan? Bapak bisa membuat laporannya? Atau tidak pernah bikin?
- I : Tidak pernah bikin.
- P : Pada saat sosialisasi apakah disampaikan kewajiban membuat laporan?
- I : Kan begini, kalau tidak salah dengar, dalam setahun entah berapa kali pemeriksaan, dicek, umpamanya apakah sapi kurus, apakah cacingan, mungkin dari dinas-dinas memberi tahu, mereka yang tau bagaimana caranya. Ini tidak ada (tidak pernah diperiksa).
- P : Siapa yang memberi pengarahan saat sosialisasi? Dari mana?
- I : Utusan dari Palangka (Provinsi), itu aja.
- P : Tapi belum mengerti?
- I : Belum mengerti. Yang disampaikan oleh beliau cuma begini, uang ini tunai, tidak boleh dipotong atau dikurangi oleh siapapun, satu ribu pun. Kalau sampai ada pemotongan, laporkan.
- P : Apakah saat masuk kelompok ada uang pendaftaran?
- I : Ga ada.
- P : Pernah diadakan pelatihan? Dinas datang memberi pelatihan cara beternak sapi yang baik?
- I : Ga pernah?
- P : Kewajiban anggota kelompok apa pak?
- I : Ya cari rumput itu, bikin kandang. Beli seng, kan perlu biaya, itu iuran. Diluar yang 20 juta itu.
- P : Jadi kalau ada keperluan lain, anggota iuran pak ya?
- I : Iya. Iuran.
- P : Cara cari umrahnya bagaimana?
- I : Bergantian, besok ada 2 orang, besoknya lagi 2 orang.
- P : Apa harapan bapak dengan pengalaman ini. Tidak ada bimbingan, tidak ada kunjungan dinas. Harapan bapak apa?
- I : Saya harap agar dinas jangan tahu beres aja, tolong lah terjun ke lapangan, dilihat ini. Nanti kalau bantuan ini habis percuma, sakit, tidak berhasil, kan kasihan bantuan itu cuma-cuma. Jadi sia-sia. Tolong dilihat apa kekurangannya, apakah sakit sapi ini. Contohnya kan yang lain-lain banyak yang agak kurus.
- P : Punya bapak?
- I : Lumayan lah, yang namanya kita itu memperhatikan makanannya, minumannya.
- P : Itu aja pak yang ingin saya tanyakan, terima kasih waktu yang diberikan. Kita foto-foto dulu sebentar.

HASIL WAWANCARA ANGGOTA KUBE

NAMA KUBE : MAJU BERSAMA I (DESA NATAI SEDAWAK)
 (INFORMAN 4)
 JENIS USAHA : TERNAK SAPI
 TGL WAWANCARA : 24 Mei 2013 (pukul 17.00 WIB)
 NAMA ANGGOTA : SAIMAN

- P : Kelompok berapa sampean, pak ?
 I : KUBE 1 kalau nggak salah.
 P : Bapak siapa namanya ?
 I : Saiman.
 P : Berarti bapak bendahara?
 I : Bendahara?
 P : Lupa dengan jabatan bapak ini.
 I : Dulu katanya wakil. Jadi, bendahara? Yang megang duit saya yo?
 P : Dulu bapak taunya ada bantuan KUBE itu darimana, pak ?
 I : Itu dari pemerintah.
 P : Diajak apa tau sendiri?
 I : Ya itu dulukan ada pendataan kelompok.
 P : Yang mendata siapa?
 I : Yang mendata si Loyola Hengki.
 P : Loyola Hengki itu sebagai apa?
 I : Pendamping.
 P : Sebelum di KUBE ini bapak kerjanya apa?
 I : Saya? Ya tani.
 P : Tani apa pak ?
 I : Ya tani. Sawit baru-baru ini aja.
 P : Berapatahun bapak jadi tani?
 I : Saya dulu kerja kayu juga. Selepas jadi kabupaten, saya tani.
 P : Berarti berapa itu, sekitar 11 tahun.
 I : Iya.
 P : Berhasil pak?
 I : Yang nyata buat makan ya,,,
 P : Cukup?
 I : Ya, kurangnya nggak begitu lah, kalau cukup sih belum.
 P : Pada saat bapak jadi tani, mohon maaf pak, penghasilan bapak kira-kira per bulan? 1 juta, 1,5 juta, 2 juta ? Rata-rata...
 I : Nggak nentu ya. Per bulan kalau dipukul rata 2 juta nggak mungkin dapat.
 P : Tapi pernah dapat 2 juta?
 I : Kadang-kadang ya lebih, kadang-kadang yakurang.... Namanya orang tani tu pasang surutnya kan nggak nentu.
 P : Berarti rata-rata 2 juta ya?
 I : Ya, sambil kerja-kerja apa dah pokoknya. Namanya nggak mutlak kesitu. Tapi yang diutamakan ya itu.
 P : Lalu setelah menjadi anggota KUBE, tetap jadi tani?
 I : Saya? Ya tetap tani.

- P : Tadikan dapat bantuan KUBE. Satu kelompok dapat berapa pak?
- I : Duit itu 20 juta.
- P : Lalu dibelikan sapi?
- I : Dibelikan sapidapatnya 4.
- P : Darimana ceritanya kok langsung diputuskan beli sapi gitu?
- I : Nah... itu dulukan gini, ngajukan dari sini kan udah bentuk kelompok ya. Itukan terusan ngajukan permintaan sapi. Katanya ada yang buat ikan, ada lain-lain. Lah sini terus mengajukan, kelompok sini 1, 2 sampai 8 kalau nggak salah itu sapi semua.
- P : Menentukan sapi itu gimana ceritanya? Kesepakatan atau diarahkan dari....
- I : Kesepakatan, itu kelompok.
- P : Pernah dikunjungi, oleh dinas?
- I : Kalo dinas setahu saya sih belum.
- P : Pendamping pernah datang?
- I : Yah.... sering dia datang itu. Sering lihat-lihat. Nanya-nanya sama ketuanya mungkin. Saya tidak tahu.
- P : Terus kalau sosialisasi pernah pak, ya?
- I : Pernah
- P : Yang disampaikan apa aja, pak?
- I : Yaa.. Masalah kelompok bersama itulah.
- P : Terus, apakah ada biaya yang dikeluarkan selama di kelompok itu ?
- I : Maksudnya dari....
- P : Kelompok. Anggota kelompok.
- I : Anggota kelompok, kayanya belum ada.
- P : Kan beli sapi, membuat kandang. Nah... dana kandangnya itu darimana?
- I : Dana kandangnya itu gotong royong. Rumahnya itu kan sudah ada, terus gotong royong membuat pagar. Ya kalau membelinya itu, yang ngeluarkan biaya cuma beli garam, buat minum.
- P : Hambatannya apa pak, dalam berkelompok ini ? Yang dirasa menghambat.
- I : Hanya ya... waktu-waktu sekarang itu ndak ada.
- P : Kalo dulu ?
- I : Kalo dulu kan, yang lain sudah dapat sapi, kenapa kok saya belum. Padahal sudah ngajukan berapa kali, nggak pernah dapat. Saya terusan pernah, terus mas nani pernah, terus ujang tiga kali kalo nggak salah. Waktu bantuan-bantuan itu.
- P : Harapan bapak? Dengan adanya bantuan KUBE ini ?
- I : Ya... mudah-mudahan ini sukses. Syukur-syukur diperhatikan, ditambahi lagi ya.
- P : Beli sapinya sudah berapa bulan?
- I : Ada 7 bulan, 8 bulan lebih.
- P : Yang sudah dewasa apa anaknya yang dibeli.
- I : Yang dewasa ya nggak dapat lah.
- P : Tapi sudah bisa kawin ?
- I : Ada yang sudah kawin, kan yang laki-laki itu saya milih yang besar. Harganya aja hampir 6 jutaan. Kalo yang udah kawin itu, 2 kalo nggak salah.
- P : Sudah bunting?
- I : Sudah. Tapi berapa bulannya itu yang kurang tau, namanya sapi dilepaskan. Kayanya sudah hamil yang 2 itu.
- P : Kalo bimbingan dari dinas tidak ada pak, ya?
- I : Bimbingan untuk ?
- P : Cara pelihara sapi yang baik itu begini, supaya cepat bunting, cepat gemuk, gitu...

- I : Itu kayanya belum ada. Nggak ada. Tapi ya sedikit-sedikit kan saya dulu pernah ngangon sapi. Nggak sepenuhnya.
- P : Itu aja pak, yang saya tanyakan pak. Terima kasih atas informasinya.

Lampiran 8

HASIL WAWANCARA DENGAN ANGGOTA KUBE

NAMA KUBE : MAJU BERSAMA 4 (DESA NATAI SEDAWAK)
(INFORMAN 5)

JENIS USAHA : TERNAK SAPI

TGL WAWANCARA : 25 MEI 2013 (pukul 07.00 WIB)

NAMA ANGGOTA : JAELANI

- P : Bapak kelompok berapa?
- I : 4
- P : Siapa namanya pak?
- I : Jaelani
- P : Bapak masih ingat kapan bergabung ke dalam kelompok KUBE?
- I : Wah, tidak ingat, sudah lupa.
- P : Sudah ada berapa bulan kira-kira?
- I : 8 bulan, tahun 2012 pak
- P : Cerita awalnya seperti apa?
- I : Nah, saya tidak tahu ceritanya. Tiba-tiba kawan datang memberi tahu, Ini ada bantuan sapi katanya.
- P : Bapak kan punya pekerjaan lain. Kalau dikasih bantuan sapi, itukan menambah waktu. Kenapa ceritanya kok mau, kok tertarik?
- I : Ya, semua kawan kan sama-sama ada pekerjaan, sama-sama diluapkan lah pekerjaannya. Kan kita tidak sendiri aja, tapi berkelompok.
- P : Satu kelompok berapa orang pak?
- I : Dulu berapa orang ya?..... Kalau tidak salah 10.
- P : Bapak di sini sebagai bendahara ya?
- I : Ya
- P : Waktu itu Bapak didata? Ada yang mendata ke rumah-rumah atau bagaimana?
- I : Tidak ada
- P : Jadi langsung ditunjuk. Kelompok sudah ada, begitu ya?
- I : Ya
- P : Kalau pemilihan ketua kelompok, bagaimana? Apakah ada rapat, pemilihan, atau langsung.....
- I : Itu sudah langsung jadi.
- P : Pernah ada pertemuan dalam kelompok?
- I : Ada, dalam satu kelompok kita rapat.
- P : Bapak diundang waktu sosialisasi di Gawi Barinjam?
- I : Aku tidak ikut, ketua nya aja.
- P : Lalu, pada saat masuk, diminta uang pendaftaran enggak?
- I : Tidak ada
- P : Bapak kerja sehari-harinya apa?
- I : Itu, mengangkat sampah, tenaga kontrak di Dinas PU.
- P : Sudah berapa tahun pak?
- I : Baru tiga bulan
- P : Sebelumnya apa kerjanya?
- I : Nyinso (kerja kayu/sekarang sudah masuk illegal logging)

- P : Pak, inikan 10 orang? Semuanya aktif ya? Ada yang keluar enggak?
- I : Anggota ada yang tidak aktif, tapi tidak keluar.
- P : Ada berapa pak, yang tidak aktif?
- I : orang 5
- P : Jadi, hanya 5 orang aja yang ngurus sapi ini?
- I : Ya, 5 orang. Kami membikin kandang gotong royong
- P : Terus, yang tidak aktif itu, bagaimana? Sapi ini kan milik bersama?
- I : Biar pun dia tidak aktif, barang itu milik bersama. Harus dibagikan nanti.
- P : Sesuai jerih payahnya?
- I : Iya. Walaupun ketua memutuskan untuk tidak memberi mereka (yang tidak aktif) bagian, tetap tidak bisa, mereka harus tetap dapat bagian). Walaupun tidak aktif.
- P : Kenapa mereka tidak aktif pak?
- I : Yah, maklum lah pak. Kadang-kadang orang itukan pemikirannya tidak sama. Tapi maklumi aja kan begitu.
- P : Ada kerepotan lain, atau karena tidak yakin dengan keberhasilan?
- I : Kemungkinan begitu.
- P : Jadi, pesimis ya?
- I : Kemungkinan begitu.
- P : Bapak kan bendahara ya? Diajarin enggak pak cara membuat laporan?
- I : Tidak. Karena sebagai bendahara, kita ditunjuk, kita tahu. Tidak dirapatkan.
- P : Waktu mengambil duit ke bang, siapa?
- I : Berdua, ketuanya dengan saya.
- P : Bantuan KUBE ini kan bisa untuk macam-macam, bisa untuk dagang sembako, peternakan, perikanan, perkebunan. Lalu kelompok bapak memilih beternak sapi, kenapa?
- I : Terus terang aja, memang kita tidak pernah rapat, tidak tahu. Tiba-tiba aja datang. Makanya di batin saya, kok saya tiba-tiba jadi bendahara. Saya ini kan lari sana lari sini, ke hutan (sibuk, jarang di tempat). Kok bisa? Bukan tidak mau. Tapi kan harusnya ditanya dulu, kamu mau enggak jadi bendaharanya? Harusnya cari orang yang netap, saya ini orang "liar".
- P : Tapi sapinya ada? Berapa ekor pak?
- I : Ada, tinggal 2, hahaha..... Mati 1.
- P : Semula berapa?
- I : 4, mati 1.
- P : Berarti tinggal 3?
- I : Tinggal 2
- P : Mati lagi?
- I : Hehehe,.... matinya kenapa? Dimana matinya? Mungkin masuk di saku, (istilah yang digunakan untuk mengatakan 1 ekor sapi tidak diketahui rimbanya)?
- P : Kan 4 ekor? Mati 1, harusnya tinggal 3? Sekarang.....?
- I : 1 nya dimana? Makanya jangan kambing hitamkan saya bendahara. Waktu itu kutanya si Hengki (pendamping desa),.... katanya tidak masalah. Biar diserahkan ke ketuanya saja, dia yang tanggung jawab, bendahara tidak perlu tanggung jawab.
- P : Jadi kelompok tidak pernah membuat pertemuan?
- I : Kemaren udah, yang dipanggil itu 5 tidak datang. Cuma 5 yang datang.
- P : Bicara apa saja dalam pertemuan itu?
- I : Membicarakan sapi itu,....
- P : Kapan rapatnya?
- I : Waktu sapi belum datang rapat. Waktu sudah datang juga, bikin kandang. Cari makan sapinya.

- P : Kalau anggota yang aktif, kewajibannya apa?
- I : Cari rumput, memeliharanya, membakar-bakar sampah. Kalau sudah malam.
- P : Bapak yakin usaha ini ada manfaatnya?
- I : Memang yakin sih.
- P : Sapinya sudah beranak pak, atau belum?
- I : Sudah beranak 1
- P : Ada pendampingan pak? Pendamping desa pernah datang?
- I : Pernah.
- P : Apa yang dilakukannya pak?
- I : Ditanya juga,..... ada enggak katanya ke sana-ke sana (maksudnya ke kandang)
- P : Kalau dari dinas?
- I : Dari dinas tidak pernah.
- P : Berarti dinas tidak pernah memberikan pelatihan? Umpamanya, bagaimana merawat sapi, mengobati sapi kalau sakit. Tidak ada?
- I : Tidak ada.
- P : Kalau sapi yang tidak diketahui tadi, sudah dikasih tahu pendamping apa belum?
- I : Ya sudah.
- P : Apa kata pendamping?
- I : Ya gitu-gitu aja.
- P : Bapak kan tidak ahli di sapi ya?
- I : Ya
- P : Gimana pak melihara sapi itu?
- I : Ah,.... lumayan lah kalo melihara sapinya. Susah-susah gampang.
- P : Bagaimana perkembangan sapinya?
- I : Ya bagus..... belum 1 tahun lebih sudah beranak. Yang 1 nya hamil?
- P : Kalau berkelompok ini kan pasti ada hambatannya. Dari segi apa pak hambatannya?
- I : sering adu mulut... tentang cari umpan, hehehe..... berdebat.
- P : Tidak berbagi jadwal pak? Misalnya hari ini si A, hari ini si B, begitu?
- I : Tidak mau, orangnya keras.
- P : Siapa yang sadar merawat, gitu aja? Daripada bertengkar?
- I : Ya, daripada sapinya mati kelaparan. Kan rugi, sapi sudah di depan mata.
- P : Kalau dari sisi administrasi, hambatannya? Misalnya harus bikin laporan. Kan dinas biasanya minta itu?
- I : Tidak jadi hambatan.
- P : Bisa aja membikin pak ya? Yang penting ada contoh?
- I : Ya.
- P : Terakhir pak, apa harapan bapak dengan adanya bantuan KUBE, saling tidak kompak dalam kelompok, kemudian ada yang tidak aktif, kemudian tidak aktifnya dinas membina, harapan bapak apa?
- I : Harapan saya, dinasnya supaya turun, kontrol. Tanyakan barang yang ini 1 itu.
- P : Untuk anggota yang tidak aktif, apakah ketua tidak pernah ada upaya untuk pendekatan?
- I : Tidak ada pendekatan. Kadang-kadang untuk gotong royong saja, tidak ada pemberitahuan.
- P : Jadi, yang tidak aktif, dibiarkan?
- I : Iya.
- P : Terima kasih pak.

HASIL WAWANCARA DENGAN ANGGOTA KUBE

NAMA KUBE : MAJU BERSAMA 2 (DESA NATAI SEDAWAK)
 (INFORMAN 6)
 JENIS USAHA : TERNAK SAPI
 TGL WAWANCARA : 25 MEI 2013 (pukul 09.00 WIB)
 NAMA ANGGOTA : JAINURI

- P : Nama Lengkap ?
 I : Jainuri
 P : Kapan Pian (Anda) mulai Bergabung dalam KUBE?
 I : Bulan puasa yang dulu,..... Wah lupa. Bulan berapa itu?
 P : Pas bulan puasa ya?
 I : Ya (Akhir Bulan Juli 2012)
 P : Bagaimana cerita awalnya?
 I : Wah, untuk cerita awalnya tidak tahu pak, langsung diambil KTP oleh Ketuanya.
 P : Ketuanya Siapa?
 I : Umpi
 P : langsung diminta KTP?
 I : Ya, kami berikan KTP, rupanya untuk bantuan sapi Tau-tau dapat bantuan sapi.
 P : Sewaktu diajak gabung, langsung tertarik masuk (kelompok), kenapa?
 I : Namanya dibantu pemerintah, tidak diambil kan sayang. Jadi dicoba dulu, terserah bagaimana kelanjutannya.....
 P : Ketika diajak bergabung pertama kali, apakah diminta uang pendaftaran?
 I : Tidak ada
 P : Anda di kelompok sebagai apa ?
 I : Bendahara.
 P : Penunjukan itu melalui rapat ya?
 I : Tidak
 P : Tidak rapat. Jadi langsung ditunjuk begitu aja?
 I : Langsung ditunjuk begitu aja, aku ditunjuk bendaha. Anen Sekretaris.
 P : Lalu, ide berusaha ternak sapi itu dari mana? Melalui rapat?
 I : Memang sudah begitudari awalnya, tidak ada rapat. Langsung membuat peternakan sapi. Sebenarnya, kalau kita ditanya sejak awal, kita tidak mampu untuk beternak sapi ini.
 P : Mampunya apa?
 I : Yah, seperti kebun, itukan nyaman ngurusnya.
 P : Waktu itu kan dibantu Rp. 20.000.000,- satu kelompok, untuk 10 orang, tidak ada rapat, tau-tau beternak sapi begitu aja ya?
 I : Iya, Sapi.
 P : Seandainya boleh memilih, akan memilih apa?

- I : Memang tidak boleh dipilih itu (sudah ditentukan sejak awal)
- P : Seandainya boleh memilih ?
- I : Seandainya boleh memilih, maunya berusaha kebun karet. Kan sesuai dengan dananya. Bisa beli tanah.
- P : Kalau sapi, belum pernah pelihara sebelumnya?
- I : Belum pak
- P : Lalu, apakah ada sosialisasi waktu itu?
- I : ada, kalau berhasil itu kan,... umpama tahap pertama ini dapat 20 juta kalau berhasil dengan 20 juta ini, bisa dapat (bantuan) 60 juta. Kalau berhasil lagi, bisa dapat 100 juta (.... kalau tidak salah begitu).
- P : Padahal, kalau ada janji-janji begitu, seharusnya termotifasi ya?
- I : Tapi, pelayanannya ini tidak maksimal,... pemeriksaan-pemeriksaan sapi tidak ada, kalau kurang vitamin dll juga tidak diperhatikan. Jadi, susah, kami tidak mengerti.
- P : Dalam sosialisasi kemaren apa aja yang dijelaskan?
- I : ya, begitu-begitu aja.
- P : Tentang pembuatan laporan, misalnya, apakah diajarkan?
- I : Enggak ada
- P : Tentang bagaimana mengelola dana yang baik, itu juga tidak diajarkan?
- I : Tidak ada. Pokoknya dana itu tidak bisa dikurangi. Kandang pun dibuat sendiri, dana dari iuran peserta.
- P : Sebagai bendahara, apakah anda dikasih tahu cara menyusunnya?
- I : Enggak
- P : Sudah pernah diminta dinas (untuk membuat) laporannya?
- I : Belum pernah.
- P : Eee....., dari 10 orang anggota, apakah semuanya aktif?
- I : Kami hanya 8 orang (yang aktif). Soalnya sudah mengundurkan diri 2 orang sejak awal.
- P : Tidak sanggup?
- I : Ya. kami sudah coba cari lagi penggantinya. Banyak yang tidak mau, katanya tidak sanggup karena sibuk.
- P : Bagaimana membagi kerjanya?
- I : Dulu itu, dibuat jadual bergantian. 2 orang tiap hari.
- P : Cari umpan (rumput makanan ternak)?
- I : Semula begitu, karena tidak mampu untuk cari makan ternaknya, akhirnya dirundingkan, dan diputuskan ternaknya dilepaskan, daripada sapinya kurus
- P : Jadi tidak perlu cari umpan lagi nih?
- I : Sudah tidak lagi. Sudah sekitar 2 minggu ini.
- P : Berapa ekor sapinya?
- I : 4 ekor
- P : Sampai sekarang masih 4 ekor ?
- I : Ya, 4 ekor. Cuma ada yang sakit satu, yang paling kecil.
- P : Apakah sudah ada yang beranak?
- I : Mungkin baru bunting 1 ekor. Yang besar.
- P : Sehari-harinya kerja apa? Selain mengurus sapi?

- I : Tidak menentu. Apa aja dikerjakan, yang penting cocok. Sekarang ini lagi nebas (membersihkan lahan).
- P : Sebelumnya kerja kayu ya? Nebang pohon (sekarang termasuk illegal logging)
- I : Dulu,
- P : Dengan adanya bantuan KUBE ini, apakah bapak merasakan ada manfaatnya?
- I : Sekarang sih belum.
- P : Tapi kedepan, apakah yakin ada manfaatnya?
- I : Kalau sapinya tidak mati, yakin. Sapi kan bisa beranak.
- P : Apakah ketua kelompok pernah mengajak pertemuan?
- I : Pernah. Misalnya kita perlu dana, kami rapat.
- P : Mengenai kewajiban anggota, bagaimana mengaturnya?
- I : Dulu pernah dibuat perjanjian, misalnya, kalau tidak mencari makan ternak sehari dikenakan denda uang Rp. 30.000,-.
- P : Apakah denda itu berjalan efektif?
- I : Pernah jalan. Tapi banyak yang membangkang (hahaha)....
- P : Padahal itu hasil rapat ya?
- I : Iya, sudah sepakat. Misalnya Kaya uang bulanan, dulu kami sepakat uang bulanan Rp. 20.000,-/bulan. Hanya 2 bulan yang jalan, karena tidak jalan, jadi dibatalkan.
- P : Pendamping pernah ke sini?
- I : Tidak pernah
- P : Menjenguk-jenguk pun tidak pernah?
- I : Dulu orang dinas pernah datang 1 kali,.... saya lupa namanya....
- P : Dari provinsi?
- I : Orang Sukamara, Pak Tamrin, pernah 1 kali ke sini, pemeriksaan.
- P : Apa katanya?
- I : Katanya, nanti ada peninjauan pak lagi, dari pusat. Tapi sudah berapa bulan ini tidak ada.
- P : Trus, dari dinas, pernah mengadakan pelatihan enggak, untuk kelompok ini?
- I : Enggak pernah.
- P : Membimbing bagaimana mengelola uang. Dilatih?
- I : Enggak pernah
- P : Bagaimana merawat sapi yang baik, dilatih?
- I : Enggak pernah, pokoknya pertemuan hanya pernah 1 kali, di Gawi Barinjam itu (saat sosialisasi)
- P : Kalau mengenai keterampilan, apakah dari 8 orang yang aktif itu, memang ada yang biasa mengurus sapi?
- I : Heem,... buta semua, terus terang aja, buta semua (tidak tahu sama sekali). Dari nol
- P : Tidak pernah dikasih obat?
- I : Tidak pernah. Soalnya tidak pernah dikasih arahan, obat sapi yang bisa bikin gemuk apa? Tidak tahu.
- P : Selama berkelompok di KUBE, kemudian melakukan usaha ternak sapi, hambatannya apa?
- I :
- P : Kalo kelompok, kompak enggak, yang 8 orang itu?

- I : Enggak kompak, susah.
- P : Ketua enggak pernah ngasih arahan?
- I : Walaupun dikasih arahan, tetap aja,... istilah karyawannya itu pembangkang.
- P : Mungkin karena mereka merasa bukan bidangnya untuk merawat sapi. Jadi itu hambatannya?
- I : Ya
- P : Terakhir, Dari cerita kita semua tadi, harapannya ke depan apa?
- I : Harapan ke depan semoga berhasil dengan baik?
- P : Dengan Dinas apa harapannya?
- I : Kalau berhasil itu kan dinas pernah janji, umpama keluar lagi (bantuan), bisa nambah-nambah modal. Tapi kelihatannya lambat, soalnya sapi itu membeli dari yang kecil. Anak (salah membeli dulu..... teman di sebelahnya menyela)
- P : Empat-empatnya kecil?
- I : Yang 1 nya besar. Itu yang sudah hamil
- P : Yang 3 belum ya? Yang 1 malah sakit ya?
- I : Ya, kalo yang 2 itu besar.
- P : Ya,..... begitu aja. Terima kasih atas informasinya.

UNIVERSITAS TERBUKA

HASIL WAWANCARA DENGAN ANGGOTA KUBE

NAMA KUBE : MAJU BERSAMA 8 (DESA NATAI SEDAWAK)
 (INFORMAN 7)
 JENIS USAHA : TERNAK SAPI
 TGL WAWANCARA : 25 MEI 2013 (pukul 07.45 WIB)
 NAMA ANGGOTA : ARBANI dan JOKO

- P : Mas Joko dan Mas Arbani, sejak kapan bergabung di KUBE ini?
 I : Kalau sampai hari raya haji ini, satu tahun
 P : Bagaimana awal ceritanya, bisa membentuk KUBE ini?
 I : Awal ceritanya, di RT Natai Sedawak ini memang ga ada cerita. Alih-alih ada datang dari Dinas Sosial (kalo tidak salah). Pendampingnya, Loyola Hengki. Beliau mengajukan usulan sapi untuk kelompok, tidak untuk pribadi. Nah, setelah itu meluncur lah dana (bantuan) sebesar 20 jt per kelompok.
 P : Yang mendata itu siapa?
 I : Pendamping (Loyola Hengki)
 P : Mas Joko kan kerja di kontrak Dinas PU ya. Pembersihan selokan. Kalau Mas Arbain kerja apa?
 I : Sama ama aja
 P : Kalau diberi bantuan begini kan menambah waktu (kerja)? Tidak apa-apa ya? Sanggup?
 I : Sanggup. Kerja di Dinas PU masuk Jam 12. Jam 5 (sore) pulang.
 P : Jadi, mengurus sapinya jam berapa?
 I : Pakai jadual. Cara kerja mencari rumputnya.
 P : Setahu saya bantuan KUBE itu bisa untuk usaha bidang apa saja. Misalnya untuk sembako, untuk perikanan, peternakan, perkebunan. Bagaimana cerita awalnya, kok langsung milih usaha ternak sapi?
 I : Awalnya saya tidak tahu akan mendapat bantuan KUBE, beternak sapi ini. Maksud saya itu kalau dapat di rolingkan/diganti ke usaha lain, rencananya saya ingin beternak ayam. Tapi saat kami rapat di gedung Gawi Barinjam, sama Pak Tamrin dan narasumber dari Palangka Raya, usaha ini tidak dapat dirubah lagi. Soalnya proposal sudah masuk ke atas. Sebabnya sejak awal KUBE itu mengajukan sapi semua.
 P : Kemaren ikut sosialisasi dimana?
 I : Di Gedung Gawi Barinjam
 P : Pembicaraanya dari.....?
 I : Dari Provinsi, Pak Karno.
 P : Apa saja yang disampaikan saat sosialisasi itu?
 I : Masalah pengembangan sapi itu aja. Kalau masalah lain-lainnya tidak ada
 P : Cara membuat laporan tidak dikasih tau?

- I : tidak, itukan sebenarnya masalah pembuatan laporan di Sedawak ini kan sebenarnya ada pendamping (Loyola Hengki), kalo mengajukan lagi kan harus beliau yang ngajukan.
- P : Apakah dinas mewajibkan kelompok membuat laporan. Sudah pernah membuat laporan atau belum?
- I : Belum pernah membuat laporan.
- P : Belum pernah diminta laporannya?
- I : Belum. Pernah 2 kali kontrol dari Pak Karno dengan rombongan. Cuma mengontrol-ngontrol gitu aja. Kelompok KUBE 8 punya kami itu diacungi jempol oleh beliau itu.
- P : Kenapa?
- I : Awal-awalnya sapi itu kecil, perkembangannya berhasil, sudah beranak satu. Malah ini sudah bunting yang tiga itu. Makanya saya mengajukan ke Kades, kalo bisa tolonglah buatkan proposal. Kami ingin mengajukan tossa, supaya mengangkut rumput enak kelanjutannya.
- P : Nah, dari 10 orang anggota kelompok, aktif semua ya?
- I : Awal mulanya, perjanjiannya harus aktif rutin mengaret (cari makan ternak). Setelah pertengahan perjalanan, beliau tidak mampu. Akhirnya mengundurkan diri.
- P : Berapa orang yang mengundurkan diri?
- I : Yang mengundurkan diri 4 orang.
- P : Kalau yang mundur itu bagaimana? Berarti dia tidak dapat bagian?
- I : Tidak dapat. Pesan dari dinas, tidak boleh mengeluarkan anggota, kecuali mengundurkan diri. Bagi yang mundur, haknya hilang. Dulu kami membuat perjanjian dalam rapat, kalau seandainya (anggota) tidak dapat ngarit (cari umpan), terkena potongan 20 ribu, untuk ongkos minyak dengan rokok aja sebenarnya. Nah, kalau dihitung-hitung kan dalam 1 tahun sudah lebih daripada modal yang 2 juta. Beliau yang mengundurkan diri, bukan kami yang mengeluarkan. Daripada membuat beban teman.
- P : Kenapa katanya, kok mundur?
- I : Tidak mampu, tidak mampu mencari rumputnya.
- P : Berarti tidak sesuai dengan bidang minatnya ya?
- I : Iya.
- P : Mas Joko dan Arbani, dengan adanya KUBE ini, apakah ada manfaatnya?
- I : KUBE ini memang sungguh bermanfaat.
- P : Apakah selama berkelompok, ketua pernah mengajak mengadakan pertemuan?
- I : Ada
- P : Berapa kali?
- I : Dalam satu kelompok ini, kami masih ikatan satu keluarga aja. Jadi kalau ada persoalan, mudah saja mencari solusinya. Misalnya kalau kita sepakat iuran, cukup kumpulkan uangnya ke bendahara. Entah untuk beli tali, beli garam, dll.
- P : Apa kewajiban anggota menurut ketua itu ?
- I : Fokusnya kalau untuk sapi, terutama itu makan aja. Jangan sampai terlambat.
- P : Apakah pendamping pernah datang?
- I : Pernah, kontrol.
- P : Apa saja yang disampaikan?

- I : Nah, kalau beliau itu, tidak ada yang disampaikannya, Cuma berpesan agar sapi itu jangan sampai diperjual belikan. Itu aja.
- P : Kalau dari Dinas Sosial kita, pernah turun?
- I : Kalau dari dinas sosial tidak pernah turun. Tapi kalau yang dari provinsi ada. Baru-baru ini malah pernah turun, Pak Karno dengan rombongan.
- P : Apa yang disampaikan?
- I : Nah, ini masalahnya. Setiap beliau datang, kelompok kami tidak ada di tempat. Yang ada Cuma pendamping desa aja.
- P : Apakah dinas memberikan pelatihan? Misalnya pelatihan cara memelihara sapi yang baik, kotorannya bisa dikelola menjadi pupuk?
- I : Tidak pernah
- P : Jadi tidak ada nilai tambah selain dari harga sapi?
- I : Terkecuali pribadi kelompok kami aja yang mengelola untuk pupuk itu.
- P : Pendamping tidak pernah ngajarin membikin laporan?
- I : Tidak pernah.
- P : Kalau dari 6 orang, siapa yang paling paham masalah merawat sapi?
- I : Bagi kami, untuk merawat sapi, sebetulnya kami serahkan ke 1 orang, pak le saya untuk merawat, memasukkan, memberi makan. Tugas kami cuma cari rumput. Wajib lah kami membantu, karena sapi kami kan.
- P : Trus, selama dalam kelompok, hambatan-hambatannya apa aja yang menjadi Kendala?
- I : Kalau dalam kelompok itu, terus terang aja tidak ada kendala. Yang menjadi kendala kami 1 aja. Kalau sapi birahi, kami kewalahan mencari sapi jantannya. Itu aja kendala kami.
- P : Kalau dalam hal kekompakan kelompok? Ada kendala enggak?
- I : Enggak ada.
- P : Artinya yang 6 itu kompak ya?
- I : Ya
- P : Kalau dalam membuat laporan, ada kendala enggak?
- I : Ada kendala. Kami percayakan saja ke pendamping untuk membuat laporan. Kan beliau sudah pernah ditatar kemana-mana, beliau lebih paham daripada kami.
- P : Terakhir, apa harapannya kepada dinas yang tidak turun memberikan pelatihan, tidak adanya sapi jantan, kemudian melihat perkembangan selama ini. Apa harapannya?
- I : Kalau harapan kami, walaupun orang dinas tidak turun, seperti kata Pak Karno sosialisasi di Gedung Gawi Barinjam, masalah dana setiap tahun itu tetap ada luncuran. Semoga pendamping dapat mengajukan lagi usulan bantuan biar cepat keluar lagi. Katanya kan kalau berkembang, yang awal mulanya 20 juta, tahun ini keluarnya bisa 30 juta.
- P : Oke, itu aja yang mau ditanyakan, terima kasih atas waktunya.

Lampiran 11

HASIL WAWANCARA ANGGOTA KUBE

NAMA KUBE : MAJU BERSAMA 5 (DESA NATAI SEDAWAK)
(INFORMAN 8)
JENIS USAHA : TERNAK SAPI
TGL WAWANCARA : 28 MEI 2013 (pukul 08.00 WIB)
NAMA ANGGOTA : MUHTAR

P : Bapak namanya siapa, pak ?
I : Pak Muhtar
P : Kelompok 4 pak, ya?
I : 5
P : Awal muladibentuknya, didata atau bapak membentuk kelompok sendiri? Atau bagaimana?
I : Didata
P : Oleh siapa, pak?
I : Oleh Pendamping.
P : Dari Dinas nggak ada, mendata itu?
I : Nggak ada.
P : Dari pendamping aja?
I : Iya.
P : Bapak ketua kelompok ya, pak ?
I : Iya. Saya ketuanya.
P : Dilokasi ini saya lihat ada beberapa kandang nih? Ada berapa kelompok di sini?
I : 3 Kelompok.
P : Kelompok siapa saja, pak?
I : Kelompok ya, Sudar.
P : Sudar. Sudar itu siapa? Sudar yang tadi itu pak, ya?
I : Itu pak Kades.
P : Pak Kades itu?
I : Pak Kades kan bukan ketua.
P : Sebagai apa pak Kades disini?
I : Pak Kades, bukan, istrinya aja yang disitu.
P : Ooo.... Nama istrinya, di kelompok 3 ini pak, ya ? Siapa namanya, pak ?
I : Kelompok 3, bu Mami.
P : Jadi ada 3 kelompok. Berarti kalo ngumpul sapinya, banyak pak, ya ?
I : Jumlah sapinya disini ada 50 an dengan anaknya.
P : Berarti ada sapi luar yang gabung disini ?
I : Sapi dulu itu sapi jatah. Dari Dinas Peternakan.
P : Bapak sebelum di KUBE ini kerjaan sehari-harinya apa, pak ?
I : Tani aja.
P : Tani sayur ?
I : Sayur-sayur.
P : Sebelum bantuan datang, apakah ada sosialisasi dari Dinas ?

- I : Tidak ada.
- P : Pertemuan di Gawi Barinjam, bapak ikut ?
- I : Saya ikut.
- P : Apa saja yang disampaikan?
- I : Tentang pemeliharaan, supaya bisa berhasil begini.
- P : Mengenai bantuan tidak dijelaskan?
- I : Mengenai bantuan tidak ada.
- P : Tidak dikasih tau disitu?
- I : Tidak. Cuma dikasih tau 20 juta dalam 1 kelompok, 10 kelompok.
- P : Mengenai cara laporan dikasih tau?
- I : Mengenai cara laporan itu belum ada. Memang ada ditanya, minimal katanya sekali setahun. Kalo bisa katanya 2 kali setahun, pemeriksaan.
- P : Waktu sosialisasi pak, berapa lama sosialisasinya? 1 hari, 2 hari?
- I : Nggak. Cuma sehari itu aja.
- P : Sampai jam berapa, pak ?
- I : Kira-kira sampai jam 12.
- P : Setelah sekian lama berjalan, apa manfaat yang dirasakan dari kegiatan ini?
- I : Alhamdulillah, manfaatnya tu ada, ada kemajuan. Pertama berkembang, Kedua itu misalnya kelompok kami ini mau kerja sama, itu jadi manfaatnya.
- P : Bantuan itu kan berupa duit pak. Bagaimana ceritanya kok langsung punya ide pelihara sapi. Itu melalui rapat kelompok apa bagaimana?
- I : Memang idenya dulu itu ya khusus ke sapi. Ada juga ke kolam ikan, artinya memelihara ikan, cuma sudah ada anjuran dari anu,
- P : Dinas?
- I : Dinas. Uang ini tidak bisa dipake mengelola kolam, tambak gitu. Tidak bisa dipakai mengelola tambak. Bisa katanya, cuma tambaknya bikin dulu, baru uang ini dipake. Misalnya umpamanya, makanannya, umpannya, bibitnya.
- P : Anggota kelompok bapak kan 10 orang, aktif semua pak ya?
- I : Nggak.
- P : Berapa orang yang tidak aktif?
- I : 4 orang.
- P : Mundur atau tidak aktif pak ?
- I : Memang dia mengundurkan diri.
- P : Kalau kewajiban anggota kelompok yang aktif apa pak?
- I : Ya itu, anggota semua harus angkut kayu, kita kumpulkan kayu. Ayo kita perlu kayu untuk kandang.
- P : Sapi pribadi bapak berapa?
- I : Pribadi sebenarnya nggak ada, saya itu bantuan semua.
- P : Bantuan dari dinas lain itu, ya?
- I : Iya. Cuma udah berkembang, artinya anak beranak sudah.
- P : Jadi berapa banyak itu, ya?
- I : Alhamdulillah, karna ada juga sapi orang masuk, dimasukkan kesini, saya memeliharanya. Jadi sapi itu sekarang sudah ada 10 ekor lebih. Diluar dari kelompok.
- P : Apakah pendamping pernah meninjau ke lokasi? Atau ke rumah bapak gitu, memberi pembinaan?
- I : Nggak pernah.
- P : Kalo dari Dinas?
- I : Dinaspun tidak ada juga.
- P : Kalau pelatihan pak, pernah ada pelatihan nggak ?

- I : Nggak ada.
- P : Mengenai keterampilan, pak. Kalo melihat cerita bapak tadi, ada orang-orang nitip, bantuan dari lain sudah beranak pinak. Kalo bapak saya yakin sudah terampil memelihara. Kalo anggota bapak?
- I : Sama saja mereka itu. Karna tiap sore turun, kasih minum sapi, kasih hidupi apinya, jadi mereka itu gantian terus.
- P : Kalo yang mundur tadi, pak. Kenapa sebabnya? Ngasih tau nggak dia?
- I : Sebabnya dia mundur gini, kami ajak gotong royong kemaren, banyak alasan. Tidak sanggup lah, anu lah...
- P : Apa dia sibuk kerjaan lain, ya?
- I : Ya, mungkin gitu.
- P : Atau tidak mau pelihara sapi?
- I : Sibuk kerja yang lain kali, atau mungkin itu anunya. Jadi diajak kemaren gotong royong tidak ada yang mau, diajak kemaren banyak alasan. Saya sibuk. Jadi belum gotong royong kedua orang nggak mau, gotong royong ketiga tidak pernah anu. Jadi ada kemaren, beli tansi ini. Kan kami beli tansi, kawat besi ini, kawat beduri ini.
- P : Iuran pak, ya?
- I : Iya, sampai ke belakang. Jadi kita patungan. Soalnya berapa kelompok itu harus beli sekian, lima gulung ini, satu kelompok ini. Tapi mereka memang tidak mau.
- P : Bagaimana cara bapak supaya anggotanya aktif, yang 6 orang itu?
- I : Caranya itu ya, kita beri motivasi, kalo sapimemang bukan jangka pendek.
- P : Jangka panjang.
- I : Iya. Jangka panjang. Itu pun tergantung dari Tuhan. Bukannya apa-apa, karena sapi itu sama dengan kita, bernyawa juga. Siapa tau besok lusa misalnya ada yang mati, kan itu semua tergantung dari Tuhan. Pengalaman aya dulu, saya dulu cuma punya 1 ekor bantuan dari peternakan, 1 ekor aja, Sekarang ini sudah 10 ekor lebih.
- P : Jadi bapak memberikan motifasi kepada mereka?
- I : Iya. Sudah 5 ekor sekarang pak, dari yang 1 ekor itu. Itu yang 5 itu sudah bunting semua pak.
- P : Kalo hambatan bagaimana, pak? Dalam hal berkelompok ini pak, hambatannya.
- I : Hambatannya itu, ya... kadang-kadang itu mereka ini tidak memahami lah artinya, tidak kompak. Jadi mau di kasih tahu terus. Kalau besok gotong royong, kadang-kadang itu, inilah, itulah.
- P : Ada yang datang, ada yang enggak. Gitu pak ya ?
- I : Iya. Tapi kami maklum itu, yang tidak datang. Misalnya, kalo dia tidak datang, menyumbang kue lah, menyumbang minuman lah. Mereka beri minuman itu sampai sekotak, ngirim kue, ngirim rokok.
- P : Terakhir, apa harapan bapak, dengan adanya bantuan modal KUBE inikedepan?
- I : Harapan sayaitu pak, ya... mudah-mudahan lah sampai bisa menyekolahkan anak nanti.
- : Baik pak, terima kasih atas waktunya,
- I : Iya. Iya.

Lampiran 12

HASIL WAWANCARA ANGGOTA KUBE

NAMA KUBE : MAJU BERSAMA 7 (DESA NATAI SEDAWAK)
(INFORMAN 9)
JENIS USAHA : TERNAK SAPI
TGL WAWANCARA : 28 MEI 2013 (pukul 09.15 WIB)
NAMA ANGGOTA : MURAT

- P** : Bapak Kelompok berapa pada KUBE?
I : Kelompok berapa ya?
P : Nama bapak siapa?
I : Murat.
P : Murat, kelompok 7. Dalam data ini Ketuanya Yanto. Bapak anggota, Nuryamami ini... istrinya Kades ya?
I : Ya. Seperti si anu itu, yang di kampung jawa. Itu kan sudah beberapa kali dapat dulunya, masih dapat juga. Coba bayangkan, di sedawak ini, terus terang saya ngomong, pilih kasih.
P : Yang pilih kasih siapa ?
I : Pejabat disini lah. Petugas disini yang pilih kasih. Yang sudah dua kali dapat masih bisa dapat. Yang belum, malah tidak dapat. Padahal yang dapat 2 kali, 3 kali bukan pribumi asli sini, orang pendatang. Maaf saya ngomong, tidak menyinggung. Saya ini kan orang pribumi disini, kenapa dibedakan. Itu bukan salah dari atasan, tidak, salah dari bawahan ini.
P : Ini kan kelompok KUBE, bapak tahu kelompok KUBE itu.
I : Tidak tahu. Tidak pernah dibicarakan (dikasih tau).
P : Tapi, nama bapak ada di kelompok ini.
I : Maka dari itu, tadi sampean nanya, saya kelompok berapa, saya tidak tahu.
P : Ketua kelompok Yanto, sekretarisnya Sahman, bendaharannya Sudarsono. Sudarsono itu yang PNS. Kemudian Muhammad Hasfi, Wati, Beti, Gumi, Konok, bapak, Murat. Bapak tidak tahu ya?
I : Tidak tahu. Cuma nama yang ada, maka dari itu kaget. Kelompok berapa, saya tidak tahu, tidak pernah dikasih tahu. Dan ketua kelompoknya siapa, saya tidak pernah dikasih tahu.
P : Inikan KUBE, Kelompok Usaha Bersama. Mendapat bantuan, satu kelompok 20 juta. Lalu 20 juta itu dibelikan sapi 4 ekor, dipelihara bersama-sama. Bapak tidak tahu?
I : Tidak tahu. Cuma nama.
P : Bapak tidak pernah diundang rapat ?
I : Tidak. Saya berani berhadapan (dikonfrontasi) dengan pengurus-pengurusnya, saya mau bilang, kenapa saya tidak diberi tahu, cuma nama saya saja yang ada disitu.

- P : Tapi nama ada.
- I : Kalausaya bilang di depan orang banyak, mungkin nanti mereka malu, saya terus terang saja, demi Tuhan saya tidak.
- P : Bapak kenal dengan Loyola Hengki?
- I : Itu menantu keponakan saya.
- P : Nah... dia itu yang mendata pak.
- I : Yanto dengan Hengki itu menantu keponakan saya.
- P : Masa' Bapak tidak tahu?
- I : Demi Tuhan, berani sumpah, hanya yang Maha Kuasa yang tahu. Saya tu apa adanya. Dulu memang Hengki menyampaikan. Ngah (Pak), angah mau ikut tidak. Kelompok sapi. Cuma bantuan ini ada 20 juta, Cuma di belikan sapi.... Aku ni, pertama-tama kalau dikelompokan seperti itu bukanapa-apa, karena mengurus sapinyabersama aku tidak mau. Tapi kalau secara pribadi aku mau.
- P : Kalau berkelompok ?
- I : Kalau berkelompok aku bukan tidak mau, nanti kan aku mengelolanya karena aku tidak ada kerjaan lain, aku yang rugi. Nanti yang lain tidak kerja. Jadi aku yang jadi tumbalnya.
- P : Saya baca anggota kelompoknya ya pak? Yanto, yanto ni sapa?
- I : Yantodisitu. Adik ipar.
- P : Sahwan?
- I : Sahwan disana, keluarga saya juga.
- P : Sudarno?
- I : Itu keponakan juga.
- P : Sudarno PNS ya. Muhammad Hasti?
- I : Keluarga saya juga.
- P : Wati?
- I : Tidak tahu.
- P : Beti?
- I : Beti,.... anak yang baru 12 tahun itu.
- P : Gumi ?
- I : Gumi istri Simar.
- P : Konok?
- I : Masih keluarga juga.
- P : Nuryamami?
- I : Itu istri pembakal (Kades).
- P : Masih keluarga bukan?
- I : Keponakan.
- P : Saya kira bapak tahu, makanya kami nanya-nanya ke sini.
- I : Tidak tahu, maka itu aku kaget. Kalau bantuan dari sana itu tidak masalah, kukira itu dari Bank.
- P : Dikira ngutang/pinjaman dari Bank?
- I : Iya, ngutang dari Bank.
- P : Jadi bapak ibu tidak mau, karena dikirang ngutang ?
- I : Iya. Dikira ngutang. Kita ini takut berhutang dengan pemerintah.

- P : Bagaimana cara menjelaskannya waktu itu?
- I : Nah, itulah. Penjelasannya kurang.
- P : Jadi salah paham gitu ya?
- I : Salah paham. Dan mereka tidak menjelaskan. Coba dia bilang, Bang, ini bantuan tunjangan dari pemerintah, dari atasan, cuma masuk Bank. Jadi kita mengambil dananya di Bank. Nah, kita kan jelas.
- P : Waktu itu tidak dijelaskan begitu?
- I : Tidak jelas. Saya kira menandatangani mengajukan pinjaman di Bank. Akhirnya dapat pinjaman uang 20 juta, dibelikan sapi. Saya tu takutnya begini pak, terus terang saja nanti yang kita hindari itu begini, sapinya tidak berkembang.
- P : Terus?
- I : Terus jaminannya tanda tangan saya. Jangankan 20 juta, sedangkan mencari uang 1 juta, namanya kita di Bank itu kalau umpamanya barang ini tidak berhasil berarti kita punya hutang biarpun sedikit, apalagi sampai 20 juta.
- P : Nah sekarang... sebenarnya bukan seperti gitu. Itu bantuan dari pemerintah kepada kelompok sebesar 20 juta melalui Bank. Jadi Bapak-bapak bukan berhutang di Bank.
- I : Nah... seandainya dijelaskan kita ini bukan berhutang di Bank, saya mau.
- P : Jadi, gotong royong tidak pernah diajak?
- I : Tidak pernah. Selama ini kami bicara itu tidak pernah.
- P : Semua anggota kelompok gotong royong.
- I : Jadi, saya mohon maaf ya, dalam masalah ini saya tidak diajak pun tidak masalah. Saya sudah punya sapi sendiri, jadi saya mau perkembangan punya saya sendiri.
- P : Terima kasih pak.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
KECAMATAN SUKAMARA
DESA NATAI SEDAWAK
Jln. Patih Fahit NO.53 Telp..... Sukamara 74172

41638.pdf

DAFTAR NAMA-NAMA PENDUDUK MISKIN THN 2010

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	MALINYUP	RT.01 Desa Natai Sedawak	Ketertinggalan
2	SAMSIAH	RT.01 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
3	IRI	RT.01 Desa Natai Sedawak	Janda
4	SEMAKAR	RT.01 Desa Natai Sedawak	Janda
5	SUCINAH	RT.01 Desa Natai Sedawak	Janda
6	SIUNIS	RT.01 Desa Natai Sedawak	Duda
7	NUUNG	RT.01 Desa Natai Sedawak	Janda
8	ARJUNA	RT.01 Desa Natai Sedawak	Janda
9	INUI	RT.01 Desa Natai Sedawak	Janda
10	PENDESA	RT.01 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
11	SERIKAT	RT.01 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
12	AMINAH	RT.01 Desa Natai Sedawak	Janda
13	ANDUI	RT.01 Desa Natai Sedawak	Janda
14	SEKUNI	RT.01 Desa Natai Sedawak	Janda
15	LANDANG	RT.01 Desa Natai Sedawak	Janda
16	MADENAN	RT.01 Desa Natai Sedawak	Duda
17	SIMAM	RT.01 Desa Natai Sedawak	Janda
18	GUNI	RT.01 Desa Natai Sedawak	Janda
19	SURA	RT.01 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
20	INOR ANANG	RT.01 Desa Natai Sedawak	Janda
21	SUMARDIP	RT.02 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
22	SUBANDI	RT.02 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
23	WAGINEM	RT.02 Desa Natai Sedawak	Janda
24	TRI KASMI	RT.02 Desa Natai Sedawak	Janda
25	TUMIRAH	RT.02 Desa Natai Sedawak	Janda
26	NUR SIAM	RT.02 Desa Natai Sedawak	Janda
27	NGADIYEM	RT.02 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
28	MATNUR	RT.02 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
28	MULYADI	RT.02 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
30	NOOR CHAYATI	RT.02 Desa Natai Sedawak	Janda
31	PADIAH	RT.02 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
32	SRI UTAMA	RT.02 Desa Natai Sedawak	Janda
33	KUSNO	RT.02 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
34	USNIAH	RT.02 Desa Natai Sedawak	Janda
35	SAWIJAN	RT.02 Desa Natai Sedawak	Duda
36	AJAI	RT.02 Desa Natai Sedawak	Duda
37	MAKLUM	RT.03 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
38	IBUR ACANG	RT.03 Desa Natai Sedawak	Janda
39	ANANG SENTIA	RT.03 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
40	SULASTRI	RT.03 Desa Natai Sedawak	Janda
41	PARMAN	RT.03 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
42	SILIP	RT.03 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
43	JAMAL	RT.03 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
44	ONO	RT.03 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
45	SRIJIS	RT.03 Desa Natai Sedawak	Janda
46	ARPEAH	RT.03 Desa Natai Sedawak	Janda
47	HAMDAN	RT.03 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
48	ISALMAH	RT.03 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
49	SITI MARIAM	RT.03 Desa Natai Sedawak	Janda

50	PIL	RT.03 Desa Natai Sedawak	Janda
51	UDAR	RT.03 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
52	MAIL	RT.03 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
53	APIN	RT.03 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
54	SEPARAI	RT.03 Desa Natai Sedawak	Janda
55	DARMA	RT.03 Desa Natai Sedawak	Janda
56	WAHYUNI	RT.02 Desa Natai Sedawak	Janda
57	EDY HERMANTO	RT.02 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
58	YANTO	RT.01 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu

Natai Sedawak, 16 Januari 2010



UNIVERSITAS TERBUKA



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
KECAMATAN SUKAMARA
DESA NATAI SEDAWAK

41638.pdf

Jin. Patih Pahit NO.53 Telp. Sukamara 74172

DAFTAR NAMA-NAMA PENDUDUK MISKIN THN 2011

NO	NAMA	ALAMAT	Keterangan
1	MALINYUP	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
2	SAMSAH	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
3	IRI	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
4	SEMAKAR	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
5	SUCINAH	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
6	SIUNIS	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
7	NUING	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
8	ARJUNA	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
9	INUI	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
10	PENDESA	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
11	SERIKAT	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
12	AMINAH	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
13	ANDUI	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
14	SEKUNI	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
15	LANDANG	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
16	MADENAN	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Duda
17	SIMAM	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
18	GUNI	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
19	SURA	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
20	INOR ANANG	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
21	SUMARDIP	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
22	SUBANDI	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
23	WAGINEM	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Janda
24	TRI KASMI	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Janda
25	TUMIRAH	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Janda
26	NUR SIAM	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Janda
27	NGADIYEM	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
28	MATNUR	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
28	MULYADI	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
30	NOOR CHAYATI	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Janda
31	PAINAH	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
32	SRI UTAMI	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Janda
33	KUSNO	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
34	USNIAH	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Janda
35	SAWJAN	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Duda
36	AJAI	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Duda
37	MAKLUM	RT.03 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
38	LIUR ACANG	RT.03 Desa Nantai Sedawak	Janda
39	ANANG SENIA	RT.03 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
40	SULASTRI	RT.03 Desa Nantai Sedawak	Janda
41	PARMAN	RT.03 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
42	SILIP	RT.03 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
43	JAMAL	RT.03 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
44	ONO	RT.03 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
45	SIULIS	RT.03 Desa Nantai Sedawak	Janda
46	ARPEAH	RT.03 Desa Nantai Sedawak	Janda
47	HAMDAN	RT.03 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
48	PERMATA	RT.03 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
49	SITI MARIAM	RT.03 Desa Nantai Sedawak	Janda

50	PIIL	RT.03 Desa Natai Sedawak	Janda
51	UDAR	RT.03 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
52	MAIL	RT.03 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
53	APIN	RT.03 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
54	SEPARAI	RT.03 Desa Natai Sedawak	Janda
55	DARMA	RT.03 Desa Natai Sedawak	Janda
56	WAHYUNI	RT.02 Desa Natai Sedawak	Janda
57	EDY HERMANTO	RT.02 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
58	YANTO	RT.01 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu

Natai Sedawak, 16 Januari 2011

MENGETAHUI
KEPALA DESA NATAI SEDAWAK



UNIVERSITAS TERBUKA



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
KECAMATAN SUKAMARA
DESA NATAI SEDAWAK

Jln. Patih Pahit NO.53 Telp.....Sukamara 74172

DAFTAR NAMA-NAMA PENDUDUK MISKIN THN 2012

NO	NAMA	ALAMAT	Keterangan
1	MALINYUP	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
2	SAMSLAH	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
3	IRI	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
4	SEMAKAR	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
5	SUCINAH	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
6	SIUNIS	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Duda
7	NUING	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
8	ARJUNA	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
9	INUI	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
10	PENDESA	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
11	SERIKAT	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
12	AMINAH	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
13	ANDUI	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
14	SEKUNI	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
15	LANDANG	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
16	M.ADENAN	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Duda
17	SIMAM	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
18	GUNI	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
19	SURA	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
20	INOR ANANG	RT.01 Desa Nantai Sedawak	Janda
21	SUMARDIP	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
22	SJ'BANDI	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
23	WAGINEM	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Janda
24	TRI KASMI	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Janda
25	TUMIRAH	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Janda
26	NUR SIAM	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Janda
27	NGADITYEM	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
28	MATNUR	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
28	MULYADI	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
30	NOOR CHAYATI	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Janda
31	PAINAH	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
32	SRI UTAMI	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Janda
33	KUSNO	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
34	USNIAH	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Janda
35	SAWDJAN	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Duda
36	AJAI	RT.02 Desa Nantai Sedawak	Duda
37	MAKLUM	RT.03 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
38	IJUR ACANG	RT.03 Desa Nantai Sedawak	Janda
39	ANANG SENLA	RT.03 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
40	SULASTRI	RT.03 Desa Nantai Sedawak	Janda
41	PARMAN	RT.03 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
42	SILIP	RT.03 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
43	JAMAL	RT.03 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
44	ONO	RT.03 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
45	SIULIS	RT.03 Desa Nantai Sedawak	Janda
46	ARPEAH	RT.03 Desa Nantai Sedawak	Janda
47	HAMDAN	RT.03 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
48	ISALMAH	RT.03 Desa Nantai Sedawak	Tidak mampu
49	SETI MARIANA	RT.03 Desa Nantai Sedawak	Janda

50	PHIL	RT.03 Desa Natai Sedawak	Janda
51	UDAR	RT.03 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
52	MAIL	RT.03 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
53	APIN	RT.03 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
54	SEPARAI	RT.03 Desa Natai Sedawak	Janda
55	DARMA	RT.03 Desa Natai Sedawak	Janda
56	WAHYUNI	RT.02 Desa Natai Sedawak	Janda
57	EDY HERMANTO	RT.02 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu
58	YANTO	RT.01 Desa Natai Sedawak	Tidak mampu

Natai Sedawak, 16 Januari 2012

MENGETAHUI
KEPALA DESA NATAI SEDAWAK

DOKUMENTASI FOTO PENELITIAN

UNIVERSITAS TERBUKA



Gambar 1. Potret Rumah Miskin di Desa Natai Sedawak tetapi tidak mendapat bantuan KUBE



Gambar 2. Potret Rumah Miskin di Desa Natai Sedawak tetapi tidak mendapat bantuan KUBE



Gambar 3. Potret Rumah Miskin di Desa Natai Sedawak tetapi tidak mendapat bantuan KUBE



Gambar 4. Potret Rumah Miskin di Desa Natai Sedawak tetapi tidak mendapat bantuan KUBE



Gambar 5. Rumah Kediaman Tasripin
Anggota KUBE Maju Bersama 1



Gambar 6. Rumah Kediaman Ali Wardana
Ketua KUBE Maju Bersama 4



Gambar 7. Rumah Kediaman Muhtar (Daeng)
Ketua KUBE Maju Bersama 5



Gambar 8. Rumah Kediaman Jaelani
Bendahara KUBE Maju Bersama 4



Gambar 9. Rumah Kediaman Ponidi
Ketua KUBE Maju Bersama 8



Gambar 10. Rumah Kediaman Nuryamami (istri Kades)
Anggota KUBE Maju Bersama 7



Gambar 11. Papan Nama KUBE Maju Bersama 2 Yang sudah roboh karena tidak terurus



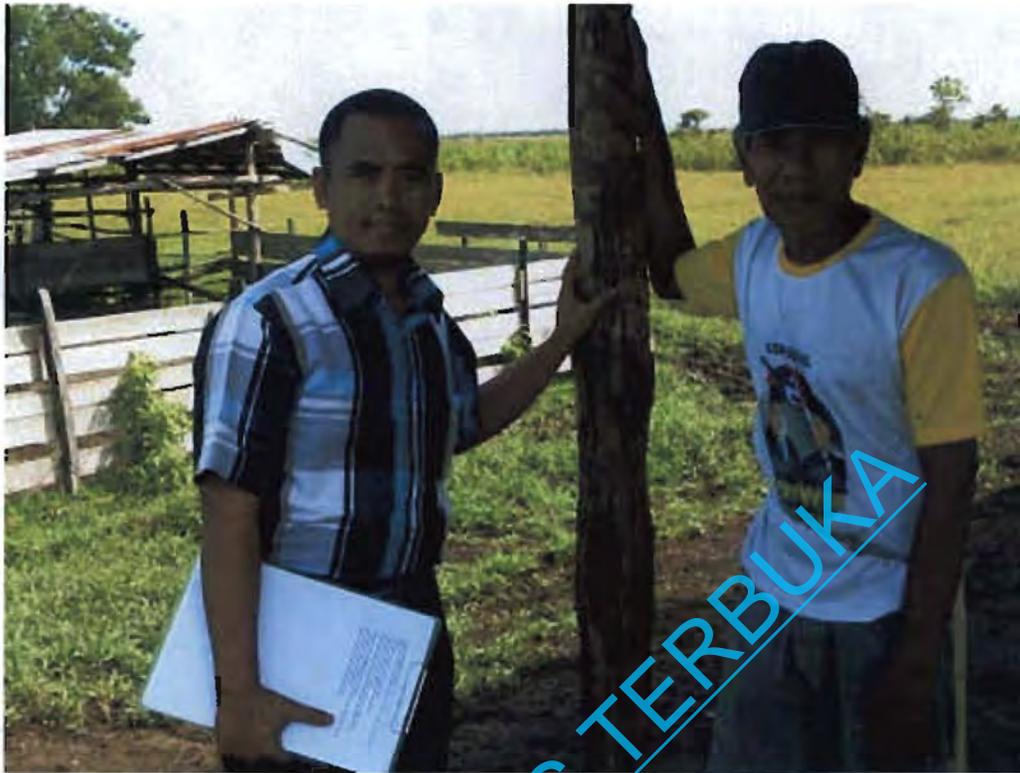
Gambar 12. Kandang Sapi milik KUBE Maju Bersama 2 yang sudah kosong Menurut warga sekitar, sapi tersebut dipindah ke tempat lain



Gambar 13. Kandang dan Padang Pengembalaan ternak Milik KUBE Maju Bersama 3



Gambar 14. Ternak Sapi milik KUBE Maju Bersama 3 Sudah beranak 1 ekor, jumlah saat ini 5 ekor



Gambar 15. Bersama Pak Muhtar di Lahan KUBE Maju Bersama 5
Di lahan ini bergabung 4 KUBE, luas penggembalaan 60 Ha



Gambar 16. Ternak Sapi di lahan KUBE Maju Bersama 5
Jumlahnya mencapai 40 ekor



Gambar 17. Bersama Pak Subandi anggota KUBE Maju Bersama 8 Ternak sudah dikandangkan dan tertata dengan baik



Gambar 18. Pak Subandi memberi makan ternak sapi
Kebutuhan pakan ternak dipenuhi dengan cara mengarit

Sukamara, 10 Oktober 2012

Nomor : -
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Data Penyaluran KUBE
di Kabupaten Sukamara

Kepada

Yth. Kepala Dinas Sosnakertrans
Kabupaten Sukamara

di -

Sukamara

Dalam rangka penyelesaian Mata Kuliah "**Tugas Mandiri**" pada semester 3 dan persiapan penyusunan **Tesis Program Pasca Sarjana (PPs) Jurusan Magister Administrasi Publik (MAP)** pada semester 4, kami bermaksud melakukan penelitian dengan tema/judul **DAMPAK KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN MODAL KUBE (KELOMPOK USAHA BERSAMA) TERHADAP PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKAMARA**

Sehubungan dengan rencana penelitian tersebut bersama ini kami mohon ijin/dukungan untuk memperoleh data penunjang terkait kebijakan penyaluran KUBE tersebut, yaitu berupa :

1. Dasar hukum kebijakan penyaluran KUBE
2. Juklak dan Juknis penyaluran KUBE
3. Data kelompok yang telah memperoleh bantuan modal KUBE di Kabupaten Sukamara
4. Data/laporan perkembangan terakhir penyaluran bantuan KUBE
5. Data-data penunjang lainnya

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan perkenannya kami haturkan terima kasih.

Yang bermohon,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**
Jl. Cabe Raya, PondokCabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telp.021.7415050, Fax. 021.7415588

**BIODATA**

Nama : MAT SALEH
NIM : 017982014
TempatdanTanggalLahir : Semarang, 30 April 1975
RegistrasiPertama : 2011.2
RiwayatPendidikan : - SDN Mendawai 3 Sukamara, lulus tahun 1989
- SMPN 1 Sukamara, lulus tahun 1992
- SMAN 1 Mentaya Hulu, lulus tahun 1995
- Fakultas Pertanian Unpar, lulus tahun 2000
RiwayatPekerjaan : - PNS Kab. Sukamara Tahun 2003
- Anggota KPU Kab. Sukamara 2008-2013
- Ketua KPU Kab. Sukamara 2013-2018
AlamatTetap : Jl. Legong Rt. 08 Rw. III No. 158 Kel. Mendawai
Kec. Sukamara Kab. Sukamara KAL-TENG
No. Telp. / Hp. : 0813 490 20 999

PalangkaRaya , Januari 2014

MAT SALEH
NIM. 017982014